

## MENJAGA MASA DEPAN

Kematian adalah “kehendak Ilahi” yang tak mungkin dilawan. Kedukaan juga “kehendak manusiawi” yang sulit ditolak, bahkan duka hari itu hingga kini ada. Persoalannya mungkin bagaimana kita memaknai “kematian” itu sendiri. Sebab setiap kematian selalu mempunyai arti, pesan dan memberi kesan yang berbeda-beda.

Ada suatu saat dimana orang tak lagi peduli pada kematian. Yakni ketika kematian itu menjadi hal yang biasa saja. Biasanya itu terjadi karena orang merasa benar atas kematian. Merasa tak ada yang salah dengan kematian. Tapi, apapun bisa berarti pada sebuah kematian. *Dan kematian tetap begitu.* Ia erat dan lekat merudung duka. Ia adalah masa yang memutuskan masa yang dijalani. Sebuah penghabisan. Dan kekal dalam alamnya. *Alam ketidakhidupan.*

Namun kesaksian, curahan hati dan harapan keluarga korban serta berbagai catatan yang memotret perjalanan Tragedi penembakan para mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dalam buku ini adalah sebuah *penghidupan*. Kesaksian, curahan hati dan harapan para keluarga korban adalah sketsa pergulatan mempertahankan hidup, memperjuangkannya sesuai harapan. Karena hakikat anak adalah harapan, maka kematian anak-anak mereka adalah kematian sebagian harapan. Seluruh kisah-kisah para orangtua ini adalah upaya menghidupkan harapan itu. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang bisa menjaga dan melindungi harapan. Melindungi anak, melindungi masa depan.

Kesedihan, kekecewaan, kegelisahan dan kesaksian mereka mengajarkan kita pentingnya menghargai hidup. Menghargai kehidupan. Menghargai masa depan.

Buku ini seharusnya tidak perlu pengantar. Sebab telah jelas, segala sesuatu yang hari ini kita syukuri adalah *resultante* pergulatan para ibu dan ayah dari anak-anak yang menghadapi kematian. Kematian yang kini dilupakan oleh para pecinta kekuasaan dan harta. Para pengabdikan ketakutan. Para pengecut yang bersembunyi dalam oligarki kekuasaan.

Namun itu bukan akhir dari harapan. Sama sekali bukan akhir masa depan! Bagai hidup di atas gunung tinggi yang menjulang. Hari ini hujan, lalu esok mungkin badai. Atau mungkin lusa lava panas berhamburan. Tapi terang pasti *kan* datang. Pasti menembus awan.

Jakarta, 20 September 2006

**John Muhammad dan Usman Hamid**

## Daftar Isi

### Pengantar

### Kesaksian dan Harapan

1. Saya Tak Percaya Reformasi Mati Suri (**Enus Junus**)
2. Seharusnya Keadilan Memenuhi Keadilan Keluarga (**Karsiah**)
3. Keputusan DPR Bukan Keputusan Hukum (**Lasmiyati**)
4. Penghargaan Saja Tidak Cukup (**Hiratetty**)
5. Mencari Keadilan Sampai Titik Darah Penghabisan (**Sumartini**)
6. Belum Tersentuh Hukum (**Zainal Khadiyanto**)
7. Patokan Saya, Kasus Munir (**Cece Sarwelli**)
8. Perjuangan Menuntut Keadilan dan Kebenaran (**Maria Katarina Sumarsih**)
9. Pengadilan Militer Itu Tidak Sah (**Ho Kim Ngo**)

### Catatan-Catatan

1. Perjuangan Melawan Lupa (**Albert Yosua Bonasahat**)
2. Pesimis Ketika Merenung, Optimis Ketika Melangkah (**Arief Priyadi**)
3. Kisah Jalan Jenderal Sudirman (**Santo Klengon**)
4. Peristiwa Semanggi: Keji Tak Henti (**Savic Aliel'ha**)
5. Refleksi Mei 1998: Ketika Korban Tak Jadi Inspirasi Politik (**Usman Hamid**)

Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian

Daftar Foto

Profil KontraS

## “Saya Tak Percaya Reformasi Mati Suri”

Nama saya **Enus Junus**. Ayahanda **Hafidhin Royan** (Idhin) atau saya biasa memanggilnya Didin la lahir pada tanggal 28 September 1976. Pada tahun 1995, Idhin diterima di Jurusan Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Berikut cerita saya.

\*\*\*

Hari itu - pagi-pagi - saya tengah bersiap-siap berangkat kerja. Dari teras, nampak mobil yang hendak saya gunakan terparkir di sisi kiri jalan. Didalamnya ternyata terdapat tabung gas elpiji yang belum diturunkan. Lantas, saya kembali masuk ke dalam rumah - membangunkan Idhin. Saya minta Idhin untuk membawa masuk tabung gas. Idhin menyanggupi, ia bangun dan langsung mengambil, mengangkat tabung ke dalam rumah. Setelah itu, kami berpisah. Ia ke dalam rumah, sementara saya masuk mobil, menyalakannya dan meluncur ke arah kantor. *Itulah, saat terakhir kami bertemu.*

Sepulang dari kantor dan seusai shalat maghrib, mendadak ada telepon dari teman Idhin yang mengabarkan kalau Idhin masuk rumah sakit. “Kenapa?”, tanya saya. Diujung telepon menjawab, “Ada kerusuhan, Pak. Idhin kena tembak.” Setelah mengetahui dimana ia dirawat, saya pun segera bergegas. Tapi, keberangkatan menuju RS Sumber Waras (Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat) mengalami kendala. Mobil saya mobil dinas sehingga tidak dapat dipergunakan. Akhirnya, saya dan istri diantar oleh tetangga - yang juga teman Idhin.

Begitu masuk ke dalam mobil, pikiran saya mulai berkecamuk. Sebegitu pentingnya pemberi kabar menghendaki kehadiran saya di rumah sakit, membuat saya curiga. Pasti ada sesuatu yang mengkhawatirkan.

Saya memang mendidik anak-anak saya untuk tidak mudah mengeluh dan belajar menghadapi persoalannya secara mandiri. Idhin sendiri tidak suka merepotkan orang lain. Selama masih dianggap mampu diatasi, jarang ia melaporkan atau terlibat hal-hal yang menyulitkan dirinya atau keluarganya. Setelah persoalannya berhasil diselesaikan, kami - orangtuanya atau saudara-saudaranya, baru kemudian diceritakan. Kalaupun ada persoalan yang memang tak sanggup ia hadapi sendiri, ia pasti akan meminta bantuan langsung. Dan kali ini, ia tidak mengabari - *tapi justru temannya.*

Setibanya di rumah sakit, temannya segera menyongsong kehadiran kami sembari mengepalkan sesuatu untuk diberikan kepada saya. Ternyata itu adalah arloji milik Idhin. Saya pun tersadar: anak saya pasti tidak sekedar sakit.

Saya terima arloji itu dan ber-istighfar, menenangkan dan menguatkan hati, sembari digiring menuju ruang ICU dan bertemu serta menerima salam dari teman-temannya. Ada yang memeluk saya dan rata-rata mata mereka merah atau berkaca-kaca seperti habis menangis. Saya sendiri dan isteri ikut menangis. Alhamdulillah, kami diberi kesabaran dan ketabahan. Kami menangis tapi tidak meraung-raung. Saya tekankan berkali-kali dalam hati, "Ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah." Begitu terus berulang-ulang.

Didalam ruangan, saya lihat ada empat jenazah. Pandangan saya segera tertuju pada jenazah Idhin. Agak terkejut juga saya melihat kondisinya. Kepalanya dililit perban yang sudah penuh darah, seolah-olah seperti kain merah yang dililit-lilitkan ke kepala. Entah mengapa, hati saya mengucap, "Kok, seperti pejuang saja?".

Kemudian saya perhatikan lebih dekat lagi, rupanya dahinya terluka, namun luka di bagian belakang kepalanya lebih hebat karena terlihat rembesan darah paling banyak keluar dari sana. Setelah itu, saya baru mulai melihat sekeliling ruangan. Saya merasa, mungkin saya termasuk orangtua mahasiswa yang datang awal. Sebab, agak sepi, hanya ada saya dan tampaknya sudah ada ayah dari pacarnya Idhin, yakni adik kandung **Taufik Kiemas** - suami **Megawati Soekarnoputri**. Beliau, tampaknya memperhatikan saya sedari tadi, lalu segera mendatangi dan memeluk saya. Setelah menerima belasungkawa, saya bergegas keluar ruangan - mencari mushalla. Dalam pikiran dan perasaan saat itu, saya ingin shalat - mengadukan hal ini pada Allah, memohon ampunan-Nya dan meminta pada-Nya agar anak saya diterima di sisi-Nya.

Setelah shalat, saya kembali masuk ruangan. Ternyata, sudah banyak mahasiswa bergerombol di dalam. Sementara itu, teman-teman sekantor mulai berdatangan, termasuk atasan saya. Beliau kemudian menawarkan bantuannya. Saya menerimanya dan meminta agar diuruskan soal mobil ambulance untuk mengantar jenazah Idhin ke Bandung.

Saat itu, saya tidak tahu kalau sudah ada keputusan untuk menginapkan seluruh jenazah di Universitas Trisakti. Kabarnya, jenazah akan dibawa ke Universitas Trisakti pukul 22.00 WIB. Tapi, pada saat yang hampir bersamaan, saya diminta untuk memutuskan otopsi pada jenazah Idhin. Saya bersama keluarga korban yang lain pun menyetujui. Akhirnya, jenazah diputuskan terlebih dahulu di-otopsi baru kemudian dibawa ke Universitas Trisakti.

Sekitar pukul 01.00 WIB, otopsi mulai dilakukan oleh Dr. **Mun'im Idris**. Saya awalnya masuk untuk menyaksikan. Namun, saat jenazah mulai dibalikkan, saya mendadak tidak tega melihatnya. Akhirnya, hanya Ibu dan kakaknya Idhin yang menyaksikan proses otopsi hingga selesai. Dari merekalah, saya tahu kalau batang otaknya Idhin sampai keluar segala, akibat lebarnya luka yang terdapat di belakang kepala. Sekitar jam 03.00 WIB, otopsi seluruh jenazah sudah selesai. Kemudian, keempat jenazah segera disiapkan ke ambulance untuk diantar ke Universitas Trisakti. Saya sendiri, memutuskan untuk pulang ke

rumah untuk menyiapkan diri ke Bandung - setelah menitipkan jenazah Idhin pada kakaknya dan beberapa anak buah atasan saya.

Usai shalat subuh, saya ditelepon dan dikabarkan bahwa jenazah sudah dapat diterima untuk diberangkatkan ke Bandung. Saya putuskan, saya tidak menyusul jenazah ke Trisakti karena khawatir tidak cukup waktu, melainkan mencegat rombongan di jalan tol. Saya pun menunggu rombongan di tol Cibubur dan akhirnya naik ambulan yang telah dikawal polisi. Sekitar jam 09.00 pagi, rombongan tiba di Bandung dan agak terkejut, karena banyaknya jumlah pelayat saat itu yang kebanyakan adalah mahasiswa.

\*\*\*

Beberapa hari sebelumnya, di sela-sela kegiatan belajar bersama, teman dekat Idhin bertanya kepadanya, "Eh, kamu kalau meninggal nanti mau dimakamkan dimana? Kalau saya *sih*, sebagai orang Yogya tentu akan dimakamkan di Yogya. Nah, kalau kamu, Din - kalau meninggal mau dimakamkan dimana?" Idhin pun menjawab, "Saya akan dimakamkan di belakang rumah yang di Bandung."

Sebagai mahasiswa, Idhin cukup aktif berorganisasi. Meski tidak menonjol, Idhin cukup populer, ia terutama dikenal sebagai mahasiswa religius yang ramah dan menyukai kegiatan alam bebas. Karena pengalamannya inilah yang membuat ia dipercaya sebagai Ketua Tim Pendahulu dalam acara Bakti Sosial pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, tatkala Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) dipimpin oleh mahasiswa angkatan 1994, Idhin sebagai angkatan dibawahnya, telah masuk perbincangan bursa pencalonan Ketua Himpunan untuk tahun selanjutnya. Hal ini amat mungkin terjadi karena menurut teman-teman seangkatannya, agenda untuk mempersiapkan pengganti dan penerus kebijakan yang disosialisasikan HMS telah membuat nama Idhin keluar. Karakter Idhin yang tidak ambisius telah menempatkan dirinya sebagai figur yang dapat diterima oleh kubu manapun.

Hal inilah yang membawanya pada kegundahan - yang membuatnya ia merasa perlu untuk berkonsultasi pada salah satu kakaknya. Saat itu, Idhin bertanya apakah ia perlu menerima dukungan kawan-kawannya dengan konsekuensi harus membagi perhatian pada kuliahnya. Sebab, ia merasa bahwa keaktifannya di organisasi bukan dengan tujuan tertentu, termasuk menjadi seorang ketua himpunan. *la risih menjadi sorotan.*

\*\*\*

Sekarang, setelah sekian tahun Idhin meninggal, saya meskipun ikhlas tetap membutuhkan ketenangan. Ketenangan itu adalah menyangkut kepastian hukum dan sejarah. Ketika saya menerima dan mengangkat piagam penghargaan gelar Pahlawan Reformasi dari Universitas Trisakti, saya katakan bahwa kami sekeluarga menyerahkan pengusutan ini sepenuhnya pada Keluarga Besar Universitas Trisakti. Pada tanggal 13 November 2000, kalau tidak salah di Hotel Santika itu, terbentuklah Tim Penuntasan Kasus 12 Mei

1998 (TPK). Karena jauh dari tempat tinggal (Bandung), saya memang tidak terlalu aktif dan mempercayai sepenuhnya pada tim ini.

Melalui tim inilah kami mengikuti perkembangan kasus Trisakti secara langsung mulai dari pengadilan militer, panitia khusus DPR, Komnas HAM hingga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahkan saya pernah bertemu Presiden Habibie, Pak Wiranto saat masih menjabat Menhankam/Panglima TNI dan Menteri HAM jaman Gus Dur, yakni Pak Hasballah M. Asaad.

Pak Habibie waktu itu menginginkan agar kami menerima penghargaan Pahlawan Reformasi secara nasional namun saat itu masih terlalu dekat dengan peristiwa sehingga para mahasiswa masih resisten terhadap kepemimpinan beliau. Padahal - kesan yang saya dapat - Habibie jauh lebih memiliki empati ketimbang Gus Dur dan Megawati.

Tentang Pak Wiranto, saya dapat mengingat persis perkataan beliau, terutama bahwa peristiwa ini mengandung kesengajaan sebab begitu beliau melihat rekaman peristiwanya beliau mendapati polisi-polisi yang membidik. "Berarti sudah punya sasaran." Pak Hasballah juga memberikan dukungannya. Saya pun sempat bertemu dengan wakil dari DPR.

Berdasarkan hasil pengadilan militer memang telah dihukum para pelakunya tetapi soal apakah saranya itu betul atau tidak saya tidak tahu. Makanya setiap saya datang ke Universitas Trisakti, saya selalu mengingatkan anak-anak (mahasiswa) bahwa kasus ini belum selesai. Universitas Trisakti sendiri menurut saya cukup komunikatif.

\*\*\*

Selama kepemimpinannya, Pak Rektor Thoby Mutis selalu menjalin komunikasi pada kami, termasuk memerintahkan anak-anak (mahasiswa dan Tim) untuk ke Bandung, berunding mengenai kelanjutan kasus ini. Tetapi terkadang saya melihat Tim seperti mandek dan kami - keluarga korban - seperti dipolitisir.

Contohnya adalah saat pemilihan presiden (Pemilu 2004), yakni ketika Ibu Tetty (orangtua korban yang lain, Elang Mulya Lesmana) mengajak bertemu calon presiden SBY. Pada saat itu, saya juga mendapat kabar kalau ibu-ibu keluarga korban di Jakarta sudah menandatangani dukungan kepada SBY. Inikan sudah dipolitisir. Padahal dibelakang saya ini kan ada banyak anak-anak (mahasiswa dan Tim) yang memiliki komitmen agar kasus ini tidak dipolitisir. Saya *nggak* mau dipolitisir. Saya ingin hal ini diselesaikan secara hukum.

Oleh karena itu, ketika Ibu Tetty dan Ibu Syahrir memutuskan masuk ke Partai Indonesia Baru (PIB), saya kecewa sekali. Saya merasa, kami (keluarga korban) sudah dimanfaatkan. Saya pun sempat SMS ke Humas Universitas Trisakti kalau saya tidak ikut-ikutan soal ini. Saya inginnya diselesaikan secara hukum.

\*\*\*

Ada satu hal yang saya rasa penting dan sudah saya sampaikan ke Pak Thoby bahwa waktu kita ketemu Presiden Habibie, kita minta supaya korban diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah.

Ini adalah pikiran kita orang tua sebelumnya. Ini berangkat dari pemikiran kalau seandainya 4 orang korban itu dianggap pahlawan oleh masyarakat. Kalau yang masih berkuasa adalah yang reformis ada kemungkinan masih dianggap, tetapi kalau yang berkuasa adalah Soeharto maka 4 anak itu dianggap pengacau atau perusuh. Apalagi sewaktu Wiranto mencalonkan sebagai Presiden mungkin keadaannya bisa berbalik. *Alhamdulillah*, dia tidak menang. Kasus ini sudah kita perjuangkan bersama tapi dari pemerintah belum ada tanggapan. Bukan saya menginginkan anak saya jadi pahlawan tapi dikemudian hari saya *nggak* ingin kalau anak-anak dan cucu-cucu saya punya om atau saudara yang dianggap pengacau.

Saya pernah bicara dengan Usman (Usman Hamid, Alumni FH Usakti, dan kini di KontraS), bahwa mungkin *nggak* kasus ini kita perjuangkan ke forum Internasional. Kata Usman, kalau mau membawa ke Mahkamah Internasional itu harus melalui lembaga negara. Adapun akhir-akhir ini ada yang membawa ke Den Haag, saya *nggak* tahu kelanjutannya.

Sejak awal posisi saya sudah begitu, kalau *nggak* bisa disini (di Indonesia) kenapa *nggak* dicoba jalur internasional. Saya juga mendapat tawaran dari perkumpulan advokat untuk mengambil alih perjuangan. Dan dibawa ke Internasional. Semua biaya akan ditanggung oleh mereka. Saya waktu itu setuju, tapi kita sudah terlanjur memberikan kuasa ke TPK.

Mahasiswa dan tim itu sudah banyak berjuang dan saya tidak mau menyalahkan mereka. Sampai saat ini, para mahasiswa dan Tim (TPK) sudah cukup banyak berusaha. Tapi ketika pemerintahnya tidak ada kemauan politik, mau diapakan. Saya sangat bersyukur kalau adik-adik mau melanjutkan perjuangan tetapi jangan dipolitisir. Cory Aquino di Filipina memang bisa menjadi presiden, tetapi dia tidak bisa mengungkap kematian suaminya.

\*\*\*

Harapan saya, secara hukum kasus ini harus terbukti bahwa ini bukan hanya kelalaian letnan dan prajurit tetapi perintah. Kalau sampai, misalnya, para jenderal itu mengatakan bahwa itu tanpa perintah kami, saya akan sangat sedih. Kenapa? Karena mempunyai negara yang Jenderal angkatan bersenjata tidak berwibawa sehingga anak buahnya bertindak liar. Kemungkinan kedua, kalau memang Jenderalnya memerintahkan, saya akan sangat sedih lagi karena mempunyai jendral yang berhati busuk begitu.

Oleh karenanya Ini harus dibuktikan mana yang benar. Meskipun keduanya buruk tetap harus dibuktikan, supaya negara kita ini bisa memperbaiki angkatan bersenjata. Kalau memang angkatan bersenjata yang bobrok, ya kedisiplinannya yang harus ditempa lagi. Harus ada penyelesaian secara hukum terhadap kasus ini.

Harapan saya, cuma satu bahwa kasus ini adalah kejadian yang terakhir. Tetapi kenyataannya tidak, kita bisa lihat di berbagai kasus misalnya di Bojong dan yang lainnya. Mereka memperjuangkan hak-nya dan hak berjuta rakyat tetapi malah dibungkam. Harapan saya pengendali massa itu bisa dilatih ke-profesionalan-nya, bisa melakukan persuasif terlebih dahulu sebelum bertindak anarkis. Bisa bertindak keras tetapi tetap tidak dibenarkan menggunakan peluru. Apalagi peluru tajam.

Secara pribadi saya juga mengambil hikmah dari kehilangan ini. Peristiwa juga saya jadikan momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kejadian itu saya pergi Umroh.

Supaya pengorbanan itu tidak sia-sia, maka perjuangannya itu harus tetap dilanjutkan. Kalau ada yang mengatakan Reformasi itu mati suri, saya *nggak* percaya. Kondisi kita bisa seperti ini, bisa bebas bicara, adalah karena perjuangan mahasiswa, termasuk pengorbanan Hafidhin. Saya yakin pengorbanannya itu tidak sia-sia. Mungkin perjalanannya agak lamban tetapi perjuangannya itu jangan sampai berhenti. Saya mengharapkan para mahasiswa sekarang melanjutkan perjuangannya.



## “Seharusnya Keadilan Memenuhi Keadilan Keluarga”

Nama saya **Karsiah**, ibu dari **Hendriawan Sie**. Anak saya lahir pada 3 Maret 1978. Hendri adalah anak kami satu-satunya. Tahun 1996, dia diterima masuk Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Berikut curahan hati saya.

\*\*\*

Sebelum peristiwa 12 Mei 1998 terjadi, posisi saya di Kalimantan. Komunikasi dengan anak saya, Hendriawan Sie, biasanya seminggu 3 kali atau 4 kali. Kadang dia atau saya yang telepon. Kalau malam minggu saya yang telepon dia.

Dia tahu kalau mamanya suka sepak bola, jadi dia pasti *nanyain*, “Lagi nonton bola ya?” Saya bilang, “Iya”. “Kamu sudah pulang kuliah?”, lanjut saya. Dia jawab “Sudah”. Dia juga tanya “Mama sehat?” “Sehat”, saya bilang. Kalau hubungan dengan almarhum (anak saya) semasa hidupnya nggak ada putusya.

Dia itu ranking satu, suka ikut bantu dosen-dosen untuk jadi pengawas, (jadi) kalau ada suatu kegiatan (mengawas) biasanya ia ikut. Tapi, kalau kegiatan demo (demonstrasi mahasiswa), dia *nggak* ikut. Apalagi kalau (sampai) berbuat nakal, anak saya *nggak* ikut. Kita *kan* orang desa, jadi saya malu kalau anak saya *nggak* sekolah (atau nakal), karena dia satu-satunya harapan saya.

Dua minggu sebelum peristiwa (tewasnya anak saya), saya masih berkomunikasi dengan dia. Dan itu adalah komunikasi terakhir saya dengan dia. Dalam obrolan-obrolan saya dengan Hendriawan, dia juga sering *nasehatin* bapaknya, “Pak, hati-hati kerjanya ya. Ini zaman krisis moneter, banyak pegawai pada dikurangi. Bapak kalau kerja, kerja yang benar. Kalau bapak *nggak* kerja saya malu putus (kuliah) ditengah jalan. Kalau saya sudah lulus, nanti saya yang kerja bapak tidak usah kerja”.

Dia juga sering mengeluh kalau bayaran kuliah naik lagi. “Ini kan susah”, dia bilang begitu. Ini anak-anak (maksudnya teman-temannya Hendriawan Sie) mau *ngajak* demonstrasi ke DPR, minta *diturunin* harga. Mereka bikin surat ke DPR. Tetapi pas kejadian dia *nggak* ikut demonstrasi. Hendriawan justru mau pulang karena habis ujian semester genap. Sekitar jam 18.30, dia dengar suara tembakan dan bertanya ke temannya. “Ada ribut, kerusuhan” kata temannya.

Pada hari Selasa, Hari Nyepi, tanggal merah, Hendriawan minta duit. Tetapi berhubung tanggal merah, besoknya baru dikirim. Pada besoknya itulah saya sampai malam menunggu telepon dari Hendriawan, karena biasanya kalau sudah terima uangnya, dia telepon.

Waktu itu, kita tunggu-tunggu telepon dari Hendriawan, anehnya perasaan saya *nggak* enak. Anehnya juga, ketika ada telepon, saya *nggak* boleh angkat telepon. Yang disuruh angkat justru isterinya ipar saya.

Waktu itu telepon berdering *melulu*. Saya dengar telepon sekitar jam delapan malam. Bapak bilang, anak kamu jatuh didorong temanya, sekarang ada di RS Sumber Waras Jakarta, diruang ICU. Saya bilang “Parah, ini anakku! Kemudian, saudara bapaknya itu pesan supaya TV jangan dinyalain. Nah, sesudah pagi tetangga dekat rumah *pada* datang loncat pagar kasih tahu kalau Hendri kena tembak, mereka bilang, “Kamu harus kuat, kamu harus berangkat”, waktu itu jam 4 subuh.

Bersama seorang tetangga yang namanya Jhon, kita naik pesawat Garuda. Saya datang ke Jakarta langsung tidak sadar, bahkan sejak berangkat, karena lihat TV dibandara yang isi beritanya anakku sudah meninggal, saya sempat mengatakan “Ya, anakku sudah meninggal itu”. Saya baru ingat benar itu sesudah seminggu. Selama tiga hari itu saya hanya minum saja, duduk dan keluar masuk (rumah). Waktu di rumah itu kan ada yang jaga-*in* dari PM (Polisi Militer), saya maki-maki dia saat itu. Saya bilang, “Kau bunuh anak saya!”

Waktu itu di RS Sumber Waras, katanya orang sudah penuh dan yang jaga saat itu Pak Sudarsa, waktu meninggal juga dipangkuan Pak Darsa. Yang paling sedih itu, (kata orang-orang) pas (sekarat) dia teriak, “Mama, badan saya panas!” katanya. Kalau saya ingat itu gemas benar, apa salah anak saya *kok* sampai dibunuh. Sudah *nggak* ada perhatian, *nggak* ada proses, cuma Universitas Trisakti saja yang mau *ngurus* dan teman-teman mahasiswa. Seperti Wanda Hamidah dan John-John (John Muhammad) itu bahkan waktu lebaran datang kesini (ketempat saya).

Sebelum dikebumikan, saya ketemu sama almarhum saat sudah dimandiin, sesudah diserahkan terimaknya di rumah (di Jakarta) dan *nggak* sempat (datang) ke RS Sumber Waras. Adik-adik ipar saya yang *ngurusin* (pemakaman). (Waktu dimandiin) saya periksa itu badannya, kalau-kalau ada yang patah tangannya, tapi ternyata *nggak* ada.

Almarhum dimandikan di RS, dimakamkan di Al Kamal, daerah Kedoya. Om-nya *nggak* mau di Tanah Kusir. Dia *pengin* yang dekat saja. Makamnya itu bagus, rata. Waktu pemakaman itu dijaga, ada pemeriksaan KTP juga. Bapaknya kalau pagi setelah Subuh datang ke kuburan dari rumah itu. Saya juga kalau minggu kesitu, menengok.

\*\*\*

Selama 7 bulan di-mahkamah militer-kan, diputus, naik banding kita menang. Tapi kita *kan* *nggak* dapat suratnya (putusan) karena dipegang sama Pak Akbar Lubis, SH (Pengacara yang ditunjuk oleh Universitas Trisakti). Dia, Akbar Lubis, menceritakan bahwa kita menang. Tapi sampai sekarang *ngga* ada kabarnya, bagaimana putusannya.

Pengadilan militer *itu* tidak ada memberikan pemberitahuan ke pihak keluarga. Seharusnya keadilan itu memenuhi keadilan keluarga, kita juga *nggak* tahu apakah pelaku itu divonis atau dipenjara, atau dipecat dari jabatannya, saya *nggak* tahu. Kalau mereka divonis mana buktinya. Waktu di pengadilan militer, Pak Erick Kadir salah seorang tersangka, pernah bicara sama saya, “Sebenarnya bukan kita *sih* yang berbuat. Kita aja yang di-*kambing hitam*-kan”. Kemudian saya katakan, “Kalau kamu di-*kambing hitam*-kan sekarang kamu *ngomong* yang sebenarnya siapa sebenarnya dibalik ini. Siapa yang perintah?” Dia bilang, “Itu taruhannya nyawa”. Dia juga bilang, “*Mendingan* saya dipenjara atau dipecat daripada saya buka mulut”.

Untuk sidang pengadilan militer tingkat I saya punya surat keputusan sidangnya. Waktu itu saya dikasih. Setiap persidangan saya mengikutinya. Satu minggu sampai tiga kali mengikuti persidangan. Tiap kali sidang kadang sampai malam hari. Untungnya saya selalu ditemani oleh Mas Aji Wibowo, salah seorang dosen di Fakultas Hukum Usakti yang juga anggota Tim Penuntasan Kasus 12 Mei 1998.

\*\*\*

Dalam perjalanan mencari keadilan itu saya melihat Mantan Presiden BJ Habibie itu yang agak benar, karena baru 25 hari anak kita meninggal, kita diundang sama Habibie dia mengakui anak kita bersama yang lain itu sebagai pahlawan reformasi. Tapi kita belum bisa bicara kalau memang (benar begitu) Bapak (harus) mengakui dan dia belum bisa bicara. Kita waktu itu belum bisa *ngomong* harusnya *kan* minta Surat Keputusan resmi. Kalau pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) *pas* mau *lengser*, dia baru mau memanggil, *ya* kita *nggak* mau ketemu. Karena (beliau memanggil) *pas* mau *lengser* tetapi *pas* masih lama berkuasa *nggak* mau. Sama saja kita (dipaksa) dukung dia. (Pokoknya) dari tiga pergantian pemimpin itu tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah.

Perjuangan kita itu *ngga* tahu sudah maksimal atau belum, karena kita *ngga* tahu hukum. Yang kita harapkan pemerintah tahu dan mengerti apa perasaan orang tua (korban). Kalau kita mau nuntut sekarang, itu susah. Sudah 7 tahun, sudah hilang (momentumnya). Yang kita harapkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu memperhatikan.

(Sekarang) karena kita sudah *nggak* ada pengacara lagi (yang mendampingi), *ya* usaha yang kita lakukan biasa dibantu Pak Heru Sanusi untuk menulis surat (protes).

Sebetulnya kami bingung, kasus ini mau dituntaskan atau tidak? Kita sebagai orang tua korban, merasa kesal. Kalau kita ini *nggak mandang* pak Rektor (Thoby Mutis) yang baik itu, mungkin kita sudah menggugat. Karena kami pernah mau menggugat bersama bapaknya Elang Mulya Lesmana (korban lainnya). Itu sempat muncul saat rapat di Hotel Ibis. Tapi gugatan tersebut kami batalkan, kita melihat beliau (Pak Thoby) itu orang baik. Saya merasakan

sendiri, dia pernah bilang, “Karena kau *nggak* punya tempat tinggal ya, kalau mau *nyewa* berapa? Tempat dan fasilitas yang bagus (saya sediakan).”

Tapi kalau ditanya masalah kasus ini, Pak Thoby jenuh, *makanya* diserahkan sama Pak Dadan Umar Daihani, John-John dan lainnya. Saya suka desak Pak Dadan, seperti saat kita buka bersama dirumah bapaknya Heri Hertanto (korban lainnya). Waktu itu *kan* kita sudah kirim surat ke Presiden Megawati, terus tidak ada jawaban, mengenai hal ini, saya pernah *ngomong* di TV. Kami tidak diterima hasil apapun.

\*\*\*

Yang lain pada ikut politik tapi saya *nggak* ikut-ikutan *nggak* boleh sama Pak Rektor, “*Mendingan* kamu ikut kerja di Koperasi”. Teman-teman, bilang itu kesempatan. *Alhamdulillah* kita dikasih kulkas, kompor gas, kamar dibagusin, pintu dan tempat tidur juga diganti. Walaupun saya ditinggal anak saya, *Alhamdulillah* masih (ada yang) bisa ngasih makan sama saya.

Saya masih bersyukur, masih dihargai karena Universitas Trisakti itu masih selalu membantu kita. Kita kalau kesana disambut dengan hormat Acara Dies Natalis dapat (ikut), Halal bi Halal juga dapat. Itu yang kita salut sama Pak Thoby Muthis.

Saat ini, pekerjaan saya sehari-hari melayani pembeli di koperasi. Kalau lagi sibuk sampai tidak bisa angkat telepon. Yang jelas, harus mau kerja karena orang dagang juga *nggak* mudah *kok*. Kalau ada yang kurang kita harus belanja.

Harapan saya kedepan itu orang tua terus dihiraukan, anaknya diberikan penghargaan. Kasusnya harus diselesaikan dan kita akan desak terus. Karena almarhum adalah anak satu-satu saya.

## “Keputusan DPR Bukan Keputusan Hukum”

Nama saya **Lasmiyati**, ibunda **Heri Hartanto**. Saat peristiwa 12 Mei 1998 dia berumur 23 tahun, lahir 5 Februari 1977. Ia kuliah di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Industri, Universitas Trisakti semester 3. Inilah cerita saya.

\*\*\*

Pada 11 Mei 1998, Heri minta izin untuk menginap ditempat temannya untuk belajar bareng (bersama) karena mau ujian semester. Esoknya, dia berangkat pagi karena mau ujian jam 12 siang. Saat itu dia berangkat jam 11 siang dari tempat temannya.

Peristiwa itu (peristiwa 12 Mei 1998) saya tidak sangka. Tiba-tiba ada temannya mendatangi saya. Kebetulan saat itu saya di Rumah Sakit Jati Bening, sekitar jam 11 malam. Temannya itu bilang mas Heri lagi di Rumah Sakit Sumber Waras dengan keadaan kritis/sakit. Saya kaget, pikiran jadi tidak enak. Kemudian saya langsung menuju Rumah Sakit Sumber Waras. Sampai di RS, sudah ramai lautan manusia. Selain itu juga ada banyak korban. Mahasiswa pun sudah marah-marah ke petugas dan marah ke polisi.

Begitu saya sampai di UGD sudah tidak ada pasien. Mereka bilang, “Anak ibu dibelakang”. Ternyata anak saya sudah di kamar jenazah bersama 3 mahasiswa lainnya yang gugur. Keempat 4 mahasiswa itu dijaga oleh dosennya masing-masing dan oleh mahasiswa. Saat itu saya kaget, saya pikir “Kenapa ini?” Ternyata ada yang *nyeletuk* pada saat saya nangis sedih “Putranya ibu *kan* ditembak”. Saya langsung histeris “Kenapa *kok* sampai ditembak?” Mahasiswa tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa kenapa dilawan dengan senjata.

Jenasah Heri mau diotopsi di RSCM tapi oleh dosen Trisakti dijaga dan tidak boleh dibawa. Oleh mahasiswa juga dicegat tidak boleh dibawa. Saya tidak sempat melihat bekas tembakannya. Karena sudah bingung begitu melihat badannya sudah dingin. Saat itu saya lemas dan menjerit-jerit.

Kemudian saya tunggu sampai pagi. Jam 3 pagi baru dimandikan kemudian mau diotopsi karena pelurunya tembus sampai ke dada. Peluru masuk menghujam dari belakang tembus kedepan karena pada saat kejadian Heri lagi menghadap ke arah gedung-gedung, saat tertembak Heri persis berada di tiang bendera Universitas Trisakti.

Waktu itu dikatakan pelurunya mau di keluarkan tetapi akan makan waktu lama. Akhirnya saya anggap dia mati syahid. Jadi *nggak* usah dikeluarkan peluru itu. Kemudian anak saya Di mandiin jam 3 pagi. Selesai dimandikan dibawa ke kampus Universitas Trisakti, di Grogol. Jenazahnya disemayankan di gedung Sjarif Thayeb Trisakti.

Dibagian depan gedung saat itu, saya lihat sudah ada Sjafrie Sjamsuddin (Pangdam Jaya-saat itu), tidak lama kemudian Megawati, Amien Rais, Buyung Nasution, Arifin Panigoro datang, serta banyak tokoh-tokoh lain yang datang. Saya menunggu sampai jam 5 pagi. Kemudian saya disuruh pulang untuk menyiapkan rumah.

\*\*\*

Tidak lama setelah sampai dirumah, sekitar jam 5.30 pagi, rombongan yang mengantar jenazah datang dirumah. Setelah berunding akhirnya disepakati jenazah anak saya akan dimakamkan bareng bersama dengan korban lainnya di Tanah Kusir Jakarta Selatan. Pertimbangannya karena anak saya memang satu perjuangan dengan korban lainnya. Urusan pemakaman selanjutnya dipersiapkan semuanya oleh Universitas Trisakti.

Sebelum diberangkatkan ke Tanah Kusir, jenazah anak saya dishalatkan terlebih dahulu, saat itu sekitar jam 12 siang. Setelah itu baru kemudian diberangkatkan ke pemakaman Tanah Kusir. Tetapi saya agak bingung saat itu, entah apa yang terjadi, di jalan-jalan sudah ramai, tempat pemakaman juga sudah ramai. Banyak mahasiswa yang datang, dari Bandung, dari Surabaya dan kampus-kampus lain di Jakarta seperti dari Jayabaya, UI dan kampus-kampus lainnya. Mereka berdatangan dengan *pake'* bis-bis. Hari itu, saya ingat, pemakaman anak saya seperti lautan manusia.

Sebelumnya, juga sempat ada mahasiswa dari Jayabaya yang mau datang melawat ke rumah. Tetapi mereka dicegah di jalan dan dilarang datang kerumah, makanya mereka akhirnya ramai-ramai datang ke pemakaman.

Esoknya, 13 Mei 1998, saya lihat di televisi terjadi *bakar-bakaran* dimanamana. Hari ketiga saya ke pemakaman untuk ziarah. Di jalan, saya lihat, mobil *dicegat-cegatin* (diberhentikan) termasuk mobil saya. Tetapi berhubung saya dan keluarga mengatakan kami dari keluarga korban penembakan di Universitas Trisakti, oleh massa kami disuruh jalan. Kejadian pada 13 dan 14 Mei 1998 menurut saya sangat menyeramkan. Saya juga bingung *kok* terjadi seperti ini.

\*\*\*

Saya dan Keluarga sesaat setelah pemakaman masih belum *ngapa-ngapain* (belum melakukan tindakan advokasi atau tindakan hukum). Kami sekeluarga masih bingung. Saat-saat setelah pemakaman banyak mahasiswa dari Trisakti yang berdatangan. Termasuk beberapa dosen juga datang berapa kali ke rumah saya. Selain itu berapa rombongan terus berdatangan, seperti ibu-ibu dari Dharma Wanita, dosen-dosen dari kampus-kampus lain juga datang ke rumah.

Selain kunjungan, banyak juga yang memberikan ucapan bela sungkawa. Ucapan tersebut datang dari berbagai kedutaan besar luar negeri, Universitas seperti ITB dan UI. Bahkan Laksamana Angkatan Laut, yang menjabat pada

saat itu juga memberikan ucapan belasungkawa. Selain itu, ada wartawan Australia yang selalu meliput.

Jatuh pada hari ke tujuh kami diundang oleh Amien Rais di Mesjid Al-Azhar. Saat itu kami masih belum mengerti politik. Amien Rais mengatakan bahwa korban Trisakti adalah pahlawan reformasi. Saat itu kami juga mendapat penghargaan dari Amien Rais. Dalam ceramahnya Amien Rais mengatakan jika dia menjadi Presiden maka perjuangan mahasiswa akan begini-begitulah. Saya baru sadar belakangan, bahwa kita diundang untuk *dengerin* dia ceramah saja *ngalor ngidul*. Nyatanya sampai sekarang buktinya tidak ada.

\*\*\*

Saya tidak berhenti untuk meminta pertanggungjawaban dan mencari keadilan. Sayangnya saya *nggak* pernah ketemu pejabat-pejabat. Justru yang peduli dan mengurus adalah tim yang dibentuk oleh Universitas Trisakti. Namanya Tim Penuntasan Kasus 12 Mei 1998/Trisakti, ketuanya waktu itu Adi Andojo, wakilnya mas Hendro (Julianto Hendro) dari Senat mahasiswa.

Dalam masa kerjanya, TPK berusaha (berjuang) melalui DPR dan pernah mempertemukan kami (keluarga korban) dengan Panda Nababan (Ketua Panitia Khusus DPR untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan II). Saya ingat sekali, Pak Panda Nababan waktu itu nangis, katanya dia sedih, dia merasa punya “utang darah”, istilahnya. Dia mengatakan bahwa dia itu duduk dikursi terhormat atas pengorbanan mahasiswa. “Kita harus malu, kita harus tuntaskan masalah ini”, Katanya.

Saat itu dia menangis tersedu-sedu dan saya percaya sama dia ketika dia benar-benar mau membela kasus ini, mau menuntaskan kasus ini. Tapi rupanya dia tidak berbuat apa-apa *gitu loh!* Setidaknya dia menuntaskan kasus ini juga *nggak!* Jadi saya pikir orang ini air matanya cuma *air mata buaya*-lah.

Ketika dibentuk Pansus (Panitia Khusus) DPR untuk kasus Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, saya terkejut dengan keputusannya. Waktu itu dari 10 fraksi di DPR, 7 diantaranya berkesimpulan tidak ada pelanggaran Berat HAM dalam ketiga kasus tersebut. Cuma 3 fraksi yang mengatakan ada pelanggaran berat HAM. Dari fraksi PAN ternyata tidak juga membela, padahal mereka tahu bahwa tanpa perjuangan mahasiswa partai-partai seperti PAN itu tidak akan ada. Bisa bentuk partai baru, bisa masuk DPR, bisa masuk ini bisa masuk itu.

Akan tetapi sekarang ketika sudah duduk di DPR tidak merasa seperti itu. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka duduk di DPR sebagai nasib (untung) belaka. Dari PKB juga sama. padahal kalau kita ambil intinya, kalau Orde Baru tidak jatuh, kalau tidak ada perjuangan mahasiswa maka tidak ada berpuluh-puluh partai, tidak ada orang bisa duduk di DPR.

Kalau tidak reformasi yang mengorbankan mahasiswa pada 1998, tetap saja partai di Indonesia hanya Golkar, PDI dan PPP. Sedang PDI saja dimasa Orde

Baru sudah jatuh dan masuk kotak, yang diakui hanya PDI Soerjadi. Momentum Kasus 27 Juli saja tidak ada tindak lanjutnya, tetapi setelah peristiwa anak saya PDI-nya Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan) baru bisa bangkit kembali. Tetapi PDI Perjuangan pun juga tidak menyadari hal itu. Mereka memang mengakui perubahan ini memakan korban dipihak mahasiswa, tetapi justru mereka merebut simpati rakyat, terus bangkit lagi menjadi partai yang besar dan Megawati jadi Presiden. Setelah jadi Presiden juga tidak *mikir kesitu* (ke perjuangan mahasiswa). Saya jadi bingung.

Gerakan mahasiswa dalam advokasi kasus Trisakti, Semanggi dan Semanggi II (semasa Pansus) beberapa kali mendatangi (mendemonstrasi/menekan) DPR tetapi tetap saja keputusan Pansus dilakukan dengan *voting*. Makanya mahasiswa juga pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sebetulnya hal ini aneh, kenapa sebuah kejahatan ditentukan dari *voting*? Seharusnya kejahatan itu ditentukan dari bukti-bukti dan ada atau tidaknya korban.

\*\*\*

Tapi menurut saya, rekomendasi dari DPR pun bisa saja tidak dipakai. Karena keputusan DPR bukan keputusan hukum. Berarti Kejaksaan Agung jika ada kemauan untuk mengungkap kasus ini bisa saja dilakukan. Karena memang dasarnya Kejaksaan Agung sudah dibawa kekuasaan Megawati (Presiden saat itu-red), lingkungan dia juga, maka susah diharapkan Kejaksaan Agung mau bekerja dengan baik. Kemauan dari pemerintah itu menjadi penting dalam membongkar kasus ini. Jika hal itu tidak ada, maka susah membongkarnya.

Kita, para orang tua korban berharap adanya kemauan untuk mengungkap kasus ini. Bagi keluarga korban proses hukum adalah syarat terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai orang (keluarga korban) yang menderita, dia (Presiden) yang menikmati.

Sejarah sudah membuktikan bahwa gerakan mahasiswa itu bisa menjatuhkan Orde Baru yang otoriter dan demokratis sekarang menuju ke arah demokrasi. Tetapi mereka yang tidak meneruskan perjuangan. Kalau mereka merasa sebagai tokoh-tokoh yang memperjuangkan dan meneruskan perjuangan mahasiswa, pastinya *nggak* sampai bertele-tele seperti ini. Paling tidak kalau perjuangan mahasiswa itu diakui sejarah akan lain ceritanya. Mungkin Megawati bisa panjang masa jabatannya sebagai Presiden.

Dari Presiden Soeharto, Habibie, terus ke Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan terus ke Megawati tiga-tiganya tidak mengakui sejarah yang terjadi dinegeri ini. Mereka semua jadi Presiden karena perjuangan mahasiswa. Kalau tidak ada demokrasi mana mungkin dulu Gus Dur sama Megawati bisa jadi Presiden atau Amien Rais bisa jadi Ketua MPR. Sekarang demokrasi sudah mengorbankan nyawa mahasiswa, termasuk dalam kasus Semanggi I dan Semanggi II. Semuanya berkorban.

Saya juga tahu persis kejadian Semanggi I dan II. Sampai jam 3 pagi tembakan langsung terhadap mahasiswa yang *nggak* bawa apa-apa. Sementara



aparatus membawa senjata, tembakan pakai peluru. tetapi mahasiswa tanpa takut, tanpa gentar apapun maju. Walhasil, perjuangan mahasiswa tetap tidak dihargai. Sangat disayangkan sekali para tokoh kita sekarang yang sudah menikmati jerih payah perjuangan mahasiswa. Kalau mereka mau menghargai sedikit saja, paling tidak mengakui, mengenang, dan menghargai mungkin keadaannya tidak sampai berlarut-larut seperti sekarang ini dan negara kita cepat pulih.

Saya sayangkan para tokoh yang katanya dia tokoh reformasi, dia berjuang mau memperjuangkan demokrasi dan segala macamnya tapi nol besar tidak ada apa-apanya. Contohnya seorang ketua partai yang dulunya sudah jatuh, sudah disingkirkan oleh Orde Baru bahkan orang bilang dihina, dicela, terlunta-lunta dan sakit hati justru bisa bangkit menjadi partai yang besar karena terus ada perjuangan mahasiswa dan ada demokrasi (maksudnya Megawati Soekarnoputri). Tapi ketika sudah menjabat tidak pernah mengakui perjuangan mahasiswa.

Kita keluarga korban juga sudah pernah mengajukan untuk ketemu Megawati Soekarnoputri. Tetapi dia tidak mau ketemu. Padahal anak-anak kita pelaku sejarah. Keluarga anak-anak itu *kan* ada, paling tidak sebagai Presiden *nanya* gimana keadaannya, keluarganya gimana? Kita juga tidak minta apa-apa, saya tidak minta macam-macam. Kita tidak minta santunan. Sebegitu sombongnya jadi Presiden padahal “lahir” di jaman reformasi dimana mahasiswa yang berjuang dan berkorban nyawanya.

Sekarang kita bisa lihat, dia sudah “masuk kotak” lagi kali *kan*. Orang yang melupakan sejarah untuk bangkit lagi akan susah. Saya yakin betul. Kayak Amien Rais jangan harap lagi dia akan maju untuk jadi Presiden untuk tahun-tahun berikut karena tidak bakalan ada yang *milih*. Megawati terbukti. Waktu reformasi saja dia tidak bisa berbuat apa-apa padahal dia adalah ketua MPR waktu itu. Kalau sudah diatas lupa diri ke orang yang dibawah. Orang yang mau maju selalu ingat perjuangan.

Kebenaran, keadilan dan demokrasi perlu kita lestarikan dan kita akui. Tapi sayangnya itu semua hanya kita yang akui. Mereka tidak mengakui kebenaran dan keadilan. Demokrasi tanpa kebenaran dan keadilan cuma akan menjadi demokrasi yang jahat.

\*\*\*

Saya mengharapkan pemerintah sekarang ini, SBY, bisa mengingat perjuangan mahasiswa, bisa melanjutkan perjuangan mahasiswa, bisa mengingat sejarah yang sudah terjadi. Hal ini merupakan motivasi untuk mendorong demokrasi kedepan terutama apa yang telah diperjuangkan mahasiswa. Jadi tidak punah begitu saja. Jangan sampai perjuangan demokrasi yang telah diperjuangkan mahasiswa itu dilupakan begitu saja.

Saya berharap kasus 12 Mei 1998 ini masuk sejarah, lembaran sejarah Indonesia di negeri kita. Katanya sebuah negara itu rakyatnya harus mengakui

sebuah sejarah, walaupun tidak menghargai pahlawannya tapi suatu sejarah itu harus diingat. Saya harap pemerintah baru betul-betul akan menuntaskan kasus Trisakti tanpa embel-embel. Hal ini penting biar kita tahu apa *sih* sebetulnya yang terjadi pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Saya juga berharap agar sekarang pemerintah tidak menganggap *enteng* masalah kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini lewat Undang-Undang Rekonsiliasi (UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Terus terang saya tidak setuju dengan UU tersebut karena ada pemaafan. Belum ada yang mengaku salah kok harus memaafkan, siapa yang mau *dimaafin*, ya?

Negara saja belum mengakui kesalahannya. Seharusnya negara mengakui bahwa pada 1998 mengeluarkan kebijakan yang melanggar HAM, yang melanggar hak warga negara-nya. Karena merasa bersalah, baru kemudian minta maaf. Maka hal tersebut bisa diterima. Pada 1998 *kan* jelas ada kebijakan dari pemerintah, entah dari Presiden atau dari Panglima, yang berakibat hilangnya nyawa warga negaranya. Kalau mereka mengakui itu bisa diterima, tapi sekarang ini (kepada) yang salah, pemerintah belum mengakui kalau mereka salah, tiba-tiba sekarang orang disuruh *maafin*, ini gimana?

Atau pejabat yang waktu itu, yang salah, sekarang mengakui bahwa dulu saya membuat kebijakan yang salah, kemudian minta maaf. Tapi kalau hitam-putihnya belum diketahui, siapanya yang bersalah kita tidak mengerti tiba-tiba kita disuruh *maafin*, apa kita semua dianggap *bego kali ya*? Oleh karena itu pemerintah harus membongkar semuanya. Siapa Pangab saat itu? Siapa Kapolri saat itu? Siapa Presiden saat itu? Jelaskan kebijakannya semua pimpinan itu? Baru minta maaf.

\*\*\*

Saya selalu terkenang dengan Heri. Semua kenangan itu selalu muncul ketika melihat ada pejabat yang korupsi atau berbuat macam-macam. Sepertinya anak kita dikhianati begitu saja. Saya juga sedih lihat Amien Rais, katanya dia tokoh reformasi tapi selama ini sudah 5 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Malah saya salut sama Hidayat Nur Wahid mudah-mudahan dia itu selalu lurus dan tercatat dalam sejarah bahwa dia yang akan meneruskan bangsa ini.

Kalau saya mikir-mikir saya selalu berandai-andai, seandainya almarhum masih ada dia sudah insyur, dia sudah kerja, sudah enak, sudah rumah tangga. Heri adalah anak yang paling *gede* (besar) yang merupakan harapan kita. Paling tidak itu untuk melindungi keluarga, untuk *senderan* kita, untuk masa depan kita, namanya anak laki-laki itu bisa menjaga adik-adiknya. Tapi semua itu kita kembalikan ke Allah, sebagai umat Islam kita harus kembali kepadaNya, Yang Maha Kuasa.

## “Penghargaan Saja Tidak Cukup”

Nama saya **Hiratetty**, ibunda dari **Elang Mulya Lesmana**. Anak saya ini nomor dua dari tiga bersaudara yang lahir pada 5 Juli 1978. Waktu peristiwa Trisakti, dia sudah semester 4 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Trisakti. Inilah cerita saya yang dimulai dengan tulisan almarhum suami saya<sup>1</sup>.

\*\*\*

Tegang karena menunggu selama 16 jam, tepatnya hari Senin pukul 20.00 WIB tanggal 5 Juli 1978, akhirnya terdengar jerit tangis bayi yang kami tunggu-tunggu, dengan perasaan penuh rasa syukur dan haru akhirnya perawat mengabarkan bahwa bayi serta ibunya dalam keadaan selamat, kami memperoleh kepercayaan dari Allah SWT untuk memelihara dan mendidik seorang bayi laki-laki.

Putra kedua seorang laki-laki, kebahagiaan kami berdua sulit untuk dilukiskan, mulutnya mungil dan hidungnya amat mancung, rambutnya hitam tebal dan ikal. Bila dilihat dari samping maka hidung mancung itu terlihat seperti paruh burung. Lalu kami sepakat untuk mengambil nama dari salah satu raja angkasa yang dilengkapi dengan nama pemberian eyangnya, maka resmi putra kami kedua bernama Elang Mulya Lesmana.

Elang tumbuh sehat seperti anak-anak lainnya, sangat aktif dan cerdas, banyak memiliki idola dari film yang ditayangkan TVRI pada waktu itu, khususnya tokoh film “CHiPs” yang diperankan Eric Estrada. Bila Film tersebut ditayangkan maka ibunya harus menemani untuk menceritakan kisah film tersebut. Selain itu setiap pagi harus berputar-putar dahulu dengan motor keliling kompleks perumahan lengkap dengan pakaian ala CHiPs seperti seragam, sarung tangan dan helm.

Karena kami masih berpindah-pindah maka SD yang ditempuh ada tiga tempat, terakhir di SDN IX Ciputat. Kepindahan kami ke kompleks Graha Permai Ciputat juga membawa kenangan tersendiri. Lokasi perumahan baru selesai dibangun dan pada waktu itu kondisi lingkungan masih asli maka banyak sekali tempat yang menarik untuk dijelajahi dengan sepeda.

Bersama teman-teman sebayanya, setiap sore ia selalu berkeliling dengan sepeda “trail” yang pada waktu itu sangat populer. Karena Elang terlalu berani maka kami akhirnya harus berurusan dengan ahli patah tulang dua kali untuk mengobati tangannya yang patah akibat jatuh terbanting dari sepeda. Setiap acara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tidak pernah ia lewatkan.

---

<sup>1</sup> Bagian masa kelahiran hingga masa remaja ini disadur dari tulisan Alm. Boy Bagus Yoga Nandita, ayahanda Elang Mulya Lesmana. Tulisan tersebut pernah dimuat pada Buletin 12 Mei, Volume I No. 1, terbit pada 12 Mei 2000, dengan nomor ISSN: 1411-4534. Saat itu beliau adalah anggota Tim Ahli Tim Penuntasan Kasus 12 Mei Universitas Trisakti.

Dengan segala gaya dan kostum pasti diikuti dengan penuh semangat. Kostum favoritnya adalah baju pejuang dengan ikat kepala merah putih.

Saat remaja, ia banyak memiliki teman, baik disekitar kompleks maupun di sekolahnya. Disinilah mulai terlihat bakat alamiah yang dituangkan ke dalam beberapa lukisan. Musik juga menjadi salah satu kesenangannya sehingga kamarnya tidak pernah sepi dari lantunan lagu-lagu yang disukai, seperti lagu *Gita Cinta Dari SMA* yang dinyanyikan oleh Chrisye, *No Surprise* dari Radiohead dan *Still* dari Lionel Ritchie. Lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang amat sering diputar pada saat-saat terakhir.

Hubungan dengan ibunya sangat dekat. Semua masalah yang menggembirakan atau yang mengesalkan hatinya pasti diceritakan, hampir tidak ada satu pun masalah yang tidak diketahui oleh ibunya, baik soal pergaulan sehari-hari maupun dengan teman-teman dekatnya.

Pada tes bakat yang diadakan sewaktu SMA, ia disarankan untuk memilih bidang penerbangan sebagai pilot atau arsitek. Sejak kecil, pilot memang menjadi pilihannya yang utama sehingga setelah pengumuman lulus SMA diterima, bersama-sama dengan beberapa temannya langsung mendaftarkan diri ke Curug, namun gagal dalam karena jatuh pada hasil tes kesehatan. Tetapi semangat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi tetap membara dan akhirnya secara resmi diterima sebagai mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Arsitektur angkatan 1996.

Pada masa ini kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya amat kami rasakan, mungkin karena lingkungan kampus yang menyenangkan hatinya atau pendidikan yang sedang ditempuh sesuai dengan bakat yang dimiliki. Namun yang terpenting bagi kami, seiring dengan pertumbuhannya selaku seorang pemuda, maka jati dirinya mulai ditemukan. Ia memiliki tenggang rasa yang amat besar terhadap lingkungannya, baik terhadap teman-temannya maupun keluarga dan selalu mendahulukan kepentingan perempuan, terlebih ibu tercinta.

Seribu kenangan akan tetap tersimpan dalam *kalbu*, kami sadar bahwa fitrah seorang pemuda adalah garda terdepan untuk merombak kebekuan dalam tatanan nilai kehidupan. Sejarah telah membuktikan. Semoga niat anak saya yang tulus dalam membela rakyat Indonesia yang sedang tertindas akibat kezaliman pemimpin-pemimpinnya di-*ridhoi* Allah Yang Maha Perkasa. Amin.

\*\*\*

Saat menjelang peristiwa Trisakti, Elang lagi ganteng-gantengnya. Dan sampai umur 20 tahun itu ia tidak pernah memberikan beban kepada orang tua, tidak pernah bikin susah orang tua. Dia memang orang yang baik dan istilahnya juga ibadahnya rajin, tenggang rasanya besar, sensitif dan memang itulah menjaga sekali kepada keluarga apalagi kepada ibunya. Kalau soal kehilangan, saya memang kehilangan *banget* karena ketiga anak itu *kan* beda-beda.

Sebelum malam peristiwa itu, memang ayahnya lagi keluar kota selama 4 hari. Waktu selama ayahnya ada, ia tidak *ngomong* sama saya (kalau ingin tidur sama saya). Selama ini *kan* saya (yang sering) *ngomong* (mengobrol) sama anak-anak. Tapi Elang itu tidak pernah (mengungkapkan kalau dia ingin tidur bersama saya). Dia selalu ingin tidur di kamarnya.

Dan malam itu, sejak ayahnya pergi itu dia bilang ke saya “Elang tidur sama mama, ya?” Saya bilang, “Kok, tumben?” “Nggak, *ah*. Pokoknya ingin tidur sama mama”, jawabnya. Kayaknya dia takut sesuatu, *gitu*. Sesudah itu akhirnya, kita tidur bertiga, *sama* Iwang (bungsu, adiknya Elang).

Pada tanggal 11 Mei itu saya memang habis pergi bertiga sama dia dan Iwang, jadi memang saya tidak pernah ada kenangan yang bagaimana *ya*, tetapi terakhir saya bersama dia kenangannya manis *banget*-lah. Pada tanggal 11 Mei itu saya siangya pergi sama mereka pergi beli *file cabinet* untuk buku dia karena tempat buku dia sudah tidak cukup.

Sorenya dia bilang, “Mam, mau ikut *nggak* mau beli kartu ulang tahun buat temanku? Saya bilang, “*Nggak ah*.” Mereka pergi berdua (dengan Iwang) malam itu naik mobil Nissan karena saat itu kita masih punya mobil pribadi.

Dia akrab benar sama adiknya pada saat itu dan beberapa hari sebelum kejadian itu kita selalu bernyanyi bertiga. Karena kalau kakaknya yang perempuan *kan* sudah nikah waktu itu dan sudah pisah rumah. Waktu itu, dia yang main gitar dan lagu-lagunya itu kayak orang yang mau pergi. Lagu Indonesia tapi kayaknya sedih *gitu*.

Kembali pada malam tanggal 11 Mei 1998, sehabis pulang dari Taman Ismail Marzuki. Dia bilang kepada saya, “Mah, temenin saya nyuci mobil, *dong*.” Waktu itu sudah jam 10 malam, saya bilang, “Kok, *pake* minta ditemani?” “Nggak, Elang takut”, Dia bilang. Akhirnya, saya *temenin* cuci mobil sampai masuk berdua ke dalam kamar.

Yang lucu lagi, waktu ingat (bagaimana) dia mau mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya. Dia beli kartu ulang tahun temannya, namanya Ema. Dia bilang “Mah, lihat telekuis, yuk. Tunggu (sampai) jam 12 malam, Mah. Saya mau SMS.” Saya bilang, “Telepon aja.” Memang dia sudah punya HP waktu itu. “Nggak, *ah*. Sudah malam. Tidak sopan”, katanya. Disitu malah saya mikir di jaman sekarang apa masih ada anak *kayak begitu* (menghargai etika waktu-red). “Dah, Mah tidur aja”, katanya. Terus dia langsung SMS temannya. Saya tidur sama dia. Dia sempat bilang, “Pagi-pagi, *bangunin ya*, Ma. Besok ada *midtest*.”

(Jakarta, 12 Mei 1998). Pagi-pagi saya bangun. Saya *siapin* makanan dan dia mandi. Sesudah *siap* (selesai-red) mandi, saya bilang ke dia agar makan terlebih dulu tapi hari itu ditolak. Saya *bilangin* sarapan dulu, tapi dia bilang, “Nggak. Nanti Elang telat. Nanti Elang pulang juga (bakal) makan.” Padahal saya sudah *siapin* makanan sudah saya panasin, *eh nggak* dimakan.

Terus dia sempat bingung bawa mobil atau naik kereta karena biasanya dia naik kereta dari Jombang kalau tidak dia naik kendaraan umum. Saya melarang, “Tidak usahlah naik mobil *kan* lagi musim demo.” Saya juga sempat ingatkan, peristiwa demonstrasi mahasiswa terakhir di Bogor yang berakhir tragis.

Akhirnya, dia berangkat pakai celan *jeans*-nya yang sobek. Tetapi dialog jalan terus dan sampai dia mau berangkat *nggak* ada *kecolongan* satu menit pun juga. Sampai saya *antarin* di depan pintu saya bilang, “Hati-hati, Lang. Kalau nanti ada demo-demo”. Akhirnya, dia naik kereta dan tidak naik mobil padahal mobil sudah dicuci sama dia untuk dipakai ketempat temannya yang akan ulang tahun itu.

\*\*\*

*Eh, pas* sorenya *kok* saya dapat kabar seperti itu. Saya sebenarnya hari itu tidak mau pergi, anak saya yang perempuan *ngajak* saya pergi dan yang kecil juga mau ikut. Saya bilang, “Tidak usah. Kamu dirumah saja karena ada penyemprotan deman berdarah.” Sesudah itu, saya pergi tapi hati itu tidak *karu-karuan*.

Hari itu saya pergi sama anak perempuan saya. Sekitar jam 5 sore, saya minta berhenti di Makro Swalayan. Saya bilang ke anak saya, “Id, Mama turun di Makro, *deh*”. Anak saya waktu itu sudah menikah dan tinggal di Bintaro. Dia bilang, “*Ngapain sih*, Ma! Nanti mama pulang sama siapa?” Saya bilang, “Mama mau beli susu. Takut nanti malam susunya Elang habis.”

Karena kebiasaan setiap malam saya selalu bikin susu 3 gelas. Elang, Si kecil (bungsu) dan Bapaknya. Anak saya kembali bertanya, “Ya sudah, nanti sore Mamah pulang sama siapa?” Saya jawab, “Sudah, gampanglah nanti mama pulang naik kendaraan umum dekat Makro Ciputat.” Terus anak saya itu pulang ke Bintaro.

Ketika di Makro, saya masuk bawa *trolley*, saya *nggak tau* waktu itu jam berapa. Pokoknya, tiba-tiba perut saya *mules* kayak orang mau melahirkan. Mau ke belakang juga *kagak* tapi keluar keringat dingin. Saya biarkan saja rasa itu, terus saya jalan lagi bawa *trolley*. “*Mules ntar ilang*”, tetapi saya sempat *mikir*, “Kenapa *ya?*”

Mungkin itu “kontak batin” atau “benang merah”, *ya pas* dia kena (tembak). Rasanya seperti teriris. Yang saya dengar waktu kejadian, kata teman-temannya yang menggotongnya, dia ngomongnya, “Aduh, Mah. Elang kena”.

Kemudian saya dengar dari *information* melalui pengeras suara “Ibu Tety dari Ciputat diharap ke *Information*.” Saya pikir bukan saya tapi *kok* sampai 3 kali dipanggil, bahkan saya sempat ngambilin susu dan segala macam. Akhirnya, saya ke bagian *information*.

“Ibu Tety?” Tanya salah satu petugas informasi. “Iya.” Saya jawab, “Ada apa, Mbak?” Petugas ini menyahut, “Ada telepon dari rumah.” Ternyata anak saya yang besar menelepon. Saya raih gagang telepon. Dari sana, terdengar, “Hallo. Mamah, *ya?* Mama jangan pulang, *ya.* Nanti Ayi jemput, *ya?*” Saya jawab, “Kenapa, *ya?*” Terus anak saya bilang, “Pokoknya Mama jangan pulang nanti, *ya.*” Saya pun jadi penasaran, “Nggak. Tapi bilang dulu kenapa?” Saya sempat *ngomong* dalam hati, “Pasti ada apa-apa. Tapi ini mengenai anaknya atau suaminya?” Ternyata tebakan saya salah.

“Nggak, Mah. Elang ketembak.” Saya langsung lemas, “Hah?”. “Elang ketembak. Pokoknya, Mama sekarang tunggu (saya)!” Sesudah itu saya keluar dari Makro. Di pelataran Makro saya mutar-mutar, cuma minta kepada Allah, “Ya Allah selamatkan anak saya.” Terus-menerus saya *ngomong gitu*. Saya pikir cuma ada kerusuhan. Elang kena tembak. Tembakan yang *nyasar*. Terus masuk ke rumah sakit, gawat darurat. Itu pikiran saya.

Tapi akhirnya itulah. Elang tewas ditembak di dalam kampusnya. Di pelataran parkir. Ia tertembak peluru tembus dari dada kirinya sampai punggungnya.

\*\*\*

Sepeninggal Elang, saya dan suami saya berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan kasus anak saya. Namun semakin lama semakin berat hingga akhirnya suami saya mulai sakit-sakitan. Ia terkena depresi. Sekitar Juni 2002, berat badannya merosot. Juga mulai berhalusinasi, memanggil-manggil Elang. Kalau sudah gitu, saya ingatkan padanya bahwa Elang sudah meninggal. Lalu, dia mengucap, “Astaghfirullah” dan menangis. Karena kondisinya semakin berat kemudian Om Boy (panggilan teman-teman Elang kepada suami saya) dibawa ke RS Internasional Bintaro. Selama beberapa hari dirawat, kondisi Om Boy justru semakin parah.

Akhirnya saya pindahkan ke RS Pertamina karena saya merasa RS Pertamina lebih bagus peralatannya. Lebih komplit. Tetapi selama di Pertamina tidak pernah didapat hasil diagnosa yang jelas tentang penyakitnya dan kondisinya pun terus menurun. Akhirnya saya bawa suami saya ke rumah saja. Saya rawat dirumah. Meski sempat agak mendingan, tidak beberapa lama, kondisi beliau mendadak kritis. Akhirnya saya bawa ke RS Pondok Indah. Setelah beberapa hari dirawat di RS Pondok Indah, akhirnya pada 3 Januari 2003, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Setelah suami meninggal, saya merasa tambah kehilangan. Jika sebelumnya kehilangan anak, sekarang ditambah kehilangan suami. Saya pun sempat bingung untuk meneruskan perjuangan ini karena sebelumnya *kan* yang aktif adalah suami saya. Namun, saya ingat betul, ketika semasa suami belum meninggal, kami pernah sering diundang oleh Dr. Syahrir (Ketua Partai Indonesia Baru-PIB) dan sering disuruh bicara di depan forum tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

Nah, suami saya saat itu pernah mengatakan, “Barangkali, kamu bisa memperjuangkan lewat partai”. Semula saya menolak. Apalagi suami saya lagi begitu (sedang depresi). Namun setelah dia meninggal, itulah yang terkenang saya, amanat buat saya. Itulah yang membuat saya masuk Partai Indonesia Baru pimpinan Dr. Syahrir.

Perjuangan saya sekarang agar pengorbanan anak dan suami saya tidak sia-sia. “Wiranto pernah berjanji kepada orangtua korban untuk mengungkap kasus ini, tapi mana buktinya?” Begitu pula dengan Habibie yang juga berjanji akan menobatkan keempat korban sebagai pahlawan reformasi, ternyata tidak jelas. Yang saya butuhkan bukan hanya pelaku lapangan, tetapi siapa yang bertanggungjawab pada waktu itu.

\*\*\*

Dulu ketika ada berita yang menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM Berat, saya kecewa sekali. Pernyataan seperti ini yang membuat suami saya meninggal. Dulu yang mengeluarkan pernyataan ini DPR, sekarang giliran Kejakung. Tidak ada hak DPR dan Kejakung berkata seperti itu sebab semua bukti dan saksi jelas menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat. Alasan bahwa para pelaku lapangan itu telah mendapatkan berbagai macam hukuman, baik penjara atau dipecat, menurut saya adalah sandiwara belaka. Bayangkan, tidak ada seorang jenderal pun yang diadili, padahal mereka itu yang harus bertanggungjawab atas tragedi Trisakti, Semanggi I dan II. Saya tidak habis mengerti kenapa elit-elit politik itu seenaknya saja menutup kasus ini dan mengatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM.

Pernah juga saya dinasihati oleh Ibu A.H. Nasution yang datang melayat saat Elang akan dimakamkan. Ibu Nas datang bersama Jenderal Besar TNI (Purn) A.H. Nasution. Ibu Nas bilang pada saya, “Tetty, kamu jangan pernah mencari tahu siapa yang membunuh anakmu. Seperti juga saya, saat anak saya tewas ditembak. Mereka tidak pernah tahu bagaimana perasaan kehilangan itu. Yang bisa merasakan kehilangan itu hanya kita.” Oleh karena itu, saya berjuang dengan ikhlas. Karena itu yang saya tagih tanggungjawab pemerintah.

\*\*\*

Sikap saya sendiri atas penghargaan Bintang Jasa dari Presiden sudah jelas. Saya masih mengharapkan pengadilan HAM. Presiden sudah menunjukkan kearifan dan pikiran jernih, tetapi saya masih mengharapkan pengadilan HAM ad hoc bisa digelar untuk mengungkap kebenaran sejarah. Jadi penghargaan saja belum cukup.



## “Mencari Keadilan Sampai Titik Darah Penghabisan”

Nama saya Sumartini, ibunda Sigit Prasetyo yang meninggal ditembak TNI tanggal 13 November 1998 jam 04.45. Sigit lahir pada 16 Juli 1980. Inilah curahan hati saya.

\*\*\*

Saya mendengar kabar dari tetangga lewat telepon kalau Sigit ada (mendapat) kecelakaan. Saya tidak langsung pergi ketempat Sigit dirawat di RSCM, tapi mampir ketempat Sigit kuliah yaitu di Jurusan Teknik Sipil, YAI (Yayasan Administarasi Indonesia).

Disana saya diterima dan ketemu oleh teman-teman, dosen dan Pureknya (Pembantu Rektor) juga. Mereka bilang saya disuruh sabar, tenang dan saya dikasih minum sama mereka. Saya merasa sudah nggak sabar untuk melihat Sigit. “Lukanya serius apa *nggak?*” Kok perasaan saya *nggak* enak banget.

Maka saya langsung bertanya, “*Ngomong-ngomong* sebetulnya ada apa *sih nyuruh* sabar-tenang. Ada apa sebenarnya?” Lalu ada yang menjawab, “Ibu tenang, ya. Ibu maafkan kami. Kami tidak bisa menjaga anak ibu”. Saya kembali bicara, “Sekali lagi, ini ada apa?” Mereka menjelaskan, “Ibu, anak ibu meninggal didepan Atmajaya tepatnya (di jalan) Semanggi, saat sedang demonstrasi meminta perubahan negara.”

\*\*\*

Pada waktu itu Soeharto sudah lengser, Habibie naik menjadi Presiden. Pangab pada saat itu adalah Wiranto, maka-nya (menurut saya) dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus Semanggi I dan II ini, harusnya diakui oleh Wiranto.

Saya sebagai Ibunya Sigit, korban kejahatan kemanusiaan, sangat-sangat sedih sekali karena nyawa tidak bisa dibeli dengan apapun. Bayangkan, mengandung selama 9 bulan, kesana-kemari dibawa-bawa, melahirkan, menyusui selama 2 tahun. Sangat susah payah membesarkan sampai menyekolahkan ke perguruan tinggi, *lah kok* malah ditembak sama tentara. Kalau anak saya lagi *nyolong* itu mungkin masuk akal-*lah*, ini kan lagi minta perubahan negara.

Pada waktu itu tepatnya tahun 1998 sedang *rame-ramenya* mahasiswa se-Indonesia berdemonstrasi. Kalau *nggak* salah itu Tentara kerjanya *kan* untuk mengurus perang, *eh* malah perang sama bangsanya sendiri. Anak-anak lagi *nggak* bawa senjata, *boro-boro* senjata, pentungan saja *nggak* ada. Semua mahasiswa menyuarakan minta perubahan negara. Sampai detik ini tentara *nggak* ada jenuhnya menembaki bangsanya sendiri. Terakhir, setelah Susilo Bambang Yudoyono menjadi Presiden di Aceh ada orang *dipentungin*, ditembakin juga.

Saya bisa bicara begini karena dulunya saya sangat *nggak* suka nonton berita, tapi membaca sangat suka. Tetapi setelah Sigit tidak ada, saya tidak mau ketinggalan untuk nonton berita-berita apapun .

\*\*\*

Setelah Sigit meninggal, 2 bulan kemudian orang KontraS datang ke rumah. Namanya Victor (Victor Da Costa), bersama temannya. Seminggu kemudian ada orang-orang dari TRK (Tim Relawan Kemanusiaan) juga pada datang untuk bergabung mencari keadilan, pengakuan dan kebenaran termasuk mengupayakan pengadilan internasional. Ternyata pertemuan-pertemuan tersebut terus berlanjut dan terus banyak keluarga korban yang lainnya bergabung. Dari kasus 65, sampai pengggusuran.

Banyak sudah yang didatangi untuk mencari keadilan. Partai-partai semuanya menjanjikan, mereka bilang, “Iya, akan saya tampung dan saya sampaikan”. Semua instansi sudah kami datangi. Ternyata mereka hanya mengatakan, “Ya, saya ikut berduka cita dan prihatin”. Bahkan Megawati dan Gus Dur juga didatangi, DPR sampai membentuk Pansus. Ternyata anggota DPR dari Golkar seolah-olah dia yang menentukan Kasus Semanggi merupakan pelanggaran HAM atau bukan. Padahal jelas-jelas bukan DPR yang menentukan itu pelanggaran HAM atau bukan.

\*\*\*

Saya sangat sedih sekali kalau sedang ingat kenangan Sigit masih hidup. Anaknya baik, sopan, tidak pernah bikin onar, rendah hati, ramah, supel banget. Teman-temannya sampai sekarang masih selalu mengunjungi saya dan makamnya.

Kalau saya sedang sendirian saya ingat Sigit. Seandainya Sigit *nggak* ditembak tentara, pasti sudah punya gelar insinyur, mungkin juga sudah kerja. Ya, gitu saya suka berkhayal. Senang rasanya apalagi kalau lihat teman-temannya yang seumurnya sudah ada yang kawin, punya anak, saya ketawa sendirian jadinya. Saya buru-buru ke makam *ngobrol* sama Sigit, tapi yang diajak *ngobrol* diam saja, rasanya Sigit sedang sakit ditembak sama tentara.

Kadang saya mendengar, “Ibu, jangan diam saja. Tolong Ibu cari keadilan.” Hal ini membuat saya semangat mencari keadilan bersama-sama dengan korban yang lain. Saya yakin jika korban bersatu tidak bisa dikalahkan.

\*\*\*

Yang saya heran adalah Jaksa Agung dan Komnas HAM saling lempar, mereka tidak punya naluri atau takut *nggak* punya kerjaan. “Takut dipecat sama Presiden, apa ya? *Nggak* di DPR, *nggak* pejabatnya, semuanya pada takut sama Presiden”. Padahal Presiden itu *kan* manusia seperti kita.

Apa memang negeri kita tidak mau tentram, saya ini *nggak* pernah minta sumbangan sama orang-orang itu. Tapi kenapa rakyatnya yang dibikin susah.

Sudah harga semakin mahal-mahal, saya mau makan *kudu' meras* keringat dulu, kalau sudah capai baru bisa makan. Itupun Senin-Kamis. Tapi, fasilitas-fasilitas para pejabat-pejabat, Presiden, *waduh*, enakunya. Semua gratis, listrik, telepon, semua *tetek-bengeknya* gratis. Sementara rakyat kecil semua harus bekerja. Pendidikan mahal, apa-apa mahal. Sementara orang-orang yang yang diatas menari diatas penderitaan rakyat kecil, seperti saya.

\*\*\*

Mana sekarang, makamnya Sigit naik lagi pajaknya. Kadang-kadang saya kesal dengan kondisi ini. Punya presiden cuma diam dan memperkaya diri sendiri. Enaknya nggak usah punya Presiden aja kali ya? Karena semua orang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan orang-orang seperti saya *nggak* pernah digubris untuk mencari keadilan.

Sekarang ini sedang bulan puasa, TRK mengadakan satu minggu sekali buka bersama ditempat Ibu Bambang, korban kerusuhan Mei '98. Disana ada penyuluhan hukum dari KontraS dan Elsam yang penjelasannya sangat bagus. Mereka menerangkan kasus-kasus yang kecil sampai kasus pelanggaran HAM berat.

(Organisasi) Kapal Perempuan sampai Suara Ibu Peduli dan lembaga-lembaga *tetek bengek* sudah saya kenal, kita saling terkait antara korban yang menolak kekerasan. Saya selalu yakin kalau korban bersatu tak bisa dikalahkan.

Dengan adanya Presiden baru karena dia dari tentara juga, jadi jangan *geer* (*gede rasa*) dulu-lah. Ipar saya juga tentara, tetapi tidak berlaku demikian. Tetapi sejak 1998 sampai 2004 kalau saya lihat tentara sama polisi rasanya marah *banget*. Maunya saya tentara sama polisi untuk mengamankan negara atau juga pertahanan negara. Jangan *nembakin* bangsa sendiri. Kalau berani dengan Amerika, jangan *berak* di kampung sendiri. Malu dilihat negara lain, kayaknya nyawa manusia di Indonesia tidak ada harganya.

\*\*\*

Kalau dipikir saya berbuat begini untuk apa *sih*? Saya cuma masih punya hati untuk lingkungan kecil saya. Saya masih punya saudara, maka-nya saya tidak mau terulang kembali pelanggaran HAM terhadap siapapun. Sayangnya perjuangan ini masih belum diakui, termasuk belum diakui oleh Wiranto.

Sebaiknya Wiranto matanya dibuka lebar-lebar dan kupingnya dipasang baik-baik dan dengarkan: "Kalau tidak ada rencana penembakan mahasiswa, mana mungkin anakku bisa mati?" Bahkan bukan hanya Sigit, tapi juga Wawan, Engkus dan masih banyak yang lainnya yang jadi korban kekerasan negara. Dan Wiranto, dengan seandainya *ngomong* bukan pelanggaran berat HAM. *Yah*, saya hanya manusia biasa, cuma berdoa semoga pengadilan akhirat yang menentukan.

Untungnya walaupun dalam konvensi Partai Golkar Wiranto menang tapi dalam pemilihan presiden dia kalah. Sebab, seandainya dia menang maka dunia akan

kiamat. Syukurlah Wiranto *nggak* jadi apa-apa. Harusnya, hal ini disadari oleh Wiranto bahwa orang *dhalim* pasti terkalahkan.

\*\*\*

Demikian juga dengan Bambang Yudhoyono, Selama tidak mau peduli dengan pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia yang harus diadili dan diselesaikan secara tuntas secara ksatria, Bambang Yudoyono belum tentu akan lama jadi Presiden. Kalau negara merasa mengakui kebenarannya dan mengadili orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM berat tak perlu takut-takut dengan jenderal atau bekas presiden karena mereka juga manusia biasa seperti kita.

Jadi untuk ini mari kita secara bersama bergandeng tangan untuk mencari keadilan demi keutuhan korban dan stop kekerasan. Oleh karena itu, meskipun selama ini saya keluarga korban belum pernah meminta apapun pada pemerintah baik yang bersifat moril maupun materil. Tapi kali ini saya keluarga korban khususnya almarhum Sigit meminta kepada pemerintah supaya kasus ini diusut tuntas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saya tidak meminta banyak, bagi kami pemberian hukuman yang adil kepada pelaku itu merupakan sebuah bentuk keberpihakan pemerintah SBY-JK kepada rakyat kecil. Padahal kami keluarga korban menaruh harapan besar pada rezim pemeritahan SBY untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai apa yang dijanjikan ketika berkampanye.

\*\*\*

Yang pasti, saya sebagai ibunya merasa berdosa sekali kalau tidak berbuat sesuatu untuk ketenangan arwah anak saya. Saya sering mengucap dalam hati, “Semoga Sigit diterima Allah dan diterima di surga yang terbaik untukmu, Git. Ibu tetap akan mencari keadilan sampai titik darah penghabisan.”

## “Belum Tersentuh Hukum”

Nama saya **Zainal Khadiyanto**, ayahanda dari **Heru Sudibyo**. Dia dilahirkan di Yogyakarta pada 1 Oktober 1973. Berikut kisah saya.

\*\*\*

Setelah selesai SMA di Yogyakarta, melanjutkan ke STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) di Rawamangun. Ditahun ke dua, almarhum itu sudah mulai mencari biaya transport sendiri. Belakangan karena almarhum sibuk bekerja, studinya agak terganggu selama satu tahun. Ada satu mata kuliah yang tertinggal tetapi setahun kemudian terselesaikan. Pada tahun 1998, Heru sudah tahap akhir dan hampir wisuda. Karena merasa berkaitan dengan pekerjaannya dan perkuliahan sudah hampir selesai, maka Heru melanjutkan ke UT (Universitas Terbuka). Satu tahun setelah Heru masuk UT, Heru juga membimbing mahasiswa-mahasiswa baru yang akan mengisi acara wisuda.

Pada masa akhir hidup sempat banyak kenangan. Diantaranya pernah Heru, saya suruh berkeluarga, tetapi jawabannya, “Ah, *ngurusin* diri sendiri saja belum bisa, apalagi *ngurusin* anak orang (maksudnya istrinya)”. Kelihatannya, memang dia itu *nggak* mau menyusahkan orang lain.

Sebagai orang tua saya merasa sangat kehilangan sekali, karena dia anak yang pertama, yang akan menggantikan posisi orang tua. Saya merasa gundah gulana sekali waktu itu. Kami memang emosi tapi sikap dendam kami cegah dengan iman, karena kami adalah umat beragama. Sehingga kita bisa menghibur diri sendiri. Tapi untuk perjuangan kami tetap bersama berjalan korban-korban pelanggaran HAM yang lain.

\*\*\*

Sebelum kematiannya, Heru oleh kantor tempat kerjanya, sempat ditugaskan ke Bali. Sekembalinya dari Bali, sebelum ke kantor, Heru mampir ke kampus mencari anak-anak yang mengisi acara wisuda. Dari pihak kampus diinformasikan bahwa anak-anak dikirim ke Salemba. Secara spontan dia menyusul ke Salemba. Padahal niatnya waktu itu ingin berangkat kerja. Sesampainya di Salemba ternyata anak-anak yang dicarinya sudah di Senayan. Setelah sampai di Senayan dapat informasi ada di Semanggi.

Pada saat itu sedang berlangsung sidang istimewa. Para mahasiswa berdemonstrasi menyuarkan tuntutan-tuntutannya. Tetapi oleh pihak aparat yang bertugas hal ini disikapi dengan cara berbeda hingga terjadilah penembakan-penembakan yang membawa korban mahasiswa. Heru adalah salah satu korban diperistiwa tindak kekerasan tersebut. Heru adalah korban mahasiswa yang tertua.

Saat peristiwa terjadi, setelah menyelamatkan anak buahnya yang dimasukkan ke pelataran Universitas Atmajaya, Heru berada paling belakang posisinya, hingga akhirnya dia ditembak dibagian kepalanya. Karena (pelaku) belum puas, dari jarak dekat Heru masih dipopor lagi mengenai belakang tengkuknya. Bagian leher belakang itu-lah yang memutuskan segala saraf-saraf. Saat itu Heru sempat dirawat dua hari di RSCM dan waktu itu saya sempat merawatnya, dua hari kemudian tidak tertolong.

Saya mendapat informasi awal mengenai kondisi Heru sesaat setelah peristiwa dari pihak kampus UT. Waktu itu saya ditelepon di rumah tidak ada, lalu saya dihubungi di tempat kerja saya di SMA (Sekolah Menengah Atas) Pelita Jaya. Awalnya saya tidak percaya karena Heru berpamitan untuk berangkat bekerja. Tapi karena informasinya itu sangat serius akhirnya saya cek bersama adiknya Heru ke RSCM. Disitu pun catatan namanya berbeda karena ada tandanya. Setelah saya cek ke ruangan ternyata betul anak saya, Heru Sudibyo. Pada waktu itu, Heru, sudah tidak dapat berkomunikasi, hanya lirikan mata saja, karena saraf lehernya putus. Waktu itu Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso juga besuk bersama sejumlah menteri-menteri, terus para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik dan masih banyak lagi.

Saat di RSCM, karena memang sudah tidak berkomunikasi, Heru masih tetap kelihatan bisa senyum. Usaha pengobatan dokter itu sangat maksimal, belasan orang dokter yang merawat. Sekitar jam 12 pada hari kedua, saya lihat jempol kakinya sudah membiru. Dan akhirnya tim dokter menyatakan bahwa jam 12 tepat Heru sudah tidak tertolong, meskipun pertolongan ekstra sempat dilakukan. Pertolongan ekstra dilakukan pada jam 11.30.

\*\*\*

Setelah peristiwa itu ada surat-surat diantaranya dari Marzuki Darussman bahwa dia ikut prihatin dan menyatakan bahwa mereka meninggal sebagai pahlawan reformasi. Dan dari sejumlah penguasa-penguasa yang tersentuh hatinya dan mengerti, juga pada datang. Apalagi simpatisan dari dunia akademis juga sangat luar biasa. Terbukti saat pemakaman saja penuh dengan semua masyarakat baik sekitar maupun dunia pendidikan. Saya saja saat pemakaman tidak terpikir apa-apa, naik mobil yang paling belakang. Dan mobil itu dari sini berjarak 23 kilo meter, sampai di samping pemakaman sudah ada bis-bis yang menunggu dan tidak putus orang. Pada waktu itu Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menginformasikan untuk membuat pagar betis, pemerintah DKI saat itu berpartisipasi juga sampai ke makam.

Setelah beberapa bulan, perhatian dari kampus masih cukup bagus, karena kita orang Jawa, jadi buat selamat. Kepedulian juga masih ada. Ada yang datang memberi ucapan, pesan, salam sampai membantu materil pun ada dengan kesadaran spontan.

Usaha saya untuk mencari keadilan waktu itu memang didukung oleh beberapa elemen, diantaranya dari Dewan Dakwah, KontraS, Ibu Peduli dan banyak lainnya. Dari kampus, yang saya *nggak* kenal, juga banyak membantu selama

dua tahun awal paska peristiwa. Apalagi pada waktu itu untuk pembuatan buku dan lainnya supaya sejarah ini masih tetap terkenang, juga banyak.

\*\*\*

Untuk advokasi secara hukum kami memang mempunyai kendala karena kesibukan. Awalnya kami sempat ikut saat ke Pengadilan. Tetapi karena kita terbentur dengan hubungan kedinasan kita *nggak* bisa ikut. Makanya kita terus mengikuti dari rekan-rekan korban lain, misalnya untuk mengusut ke Komnas HAM. Kami sepakat semua itu harus berjalan sama-sama.

Kita, dari kelompok keluarga korban, sudah berusaha maksimal, tetapi pihak yang terkait itu belum mendapatkan tanggapan yang tepat. Jadi waktu itu Komnas HAM hanya menyarankan “ini-ini” dan “itu-itu”. Tetapi ketika didesak, mereka yang di Komnas HAM mengatakan, “Oh, kapasitas Komnas tidak sampai pada peradilan”. Waktu itu diungkapkan Ketua Komnas HAM itu tidak mengarah pada penuntutan hukum dan lainnya. Dalam hati saya, “*Lha, ngapain* kalau kita kesana kalau *nggak* ada artinya.” Seolah-olah tidak diperdulikan.

\*\*\*

Menurut saya, dari beberapa suksesi kepemimpinan saya lihat tidak ada yang maksimal dalam usaha penyelesaian kasus kematian anak saya. Baik dari kejaksaan ataupun pihak yang terkait lainnya. Kita malah sering menanyakan ke Komnas HAM bersama komunitas akademis dan LSM yang lain. Katanya pemerintah ingin menegakkan hukum tapi hanya hukum penanganan korupsi, tetapi kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang mengorbankan warganya sendiri belum ada respon sampai saat ini. Sampai sekarang ini Presiden (SBY) belum ada tanggapan apapun, apalagi langkah yang konkrit.

Padahal mereka yang meninggal dalam peristiwa Semanggi I adalah pahlawan negara yang telah membawa negeri ini kepada perbaikan. Padahal kalau mereka tidak meninggal, akan menghasilkan reformasi yang sesungguhnya. Reformasi yang mungkin tidak seperti sekarang ini. Dulu itu masih sangat bersih jiwa reformasi, dan jiwa bersih ini yang berusaha membawa bangsa ini lebih baik, lebih bermartabat. Demikian juga jiwa anak-anak saat itu yang sangat murni.

Padahal kalau tidak ada gerakan mahasiswa, saat itu, tidak mungkin elit-elit itu bisa duduk di kursi pemerintahan seperti saat ini. Seperti Amien Rais saat itu *kan* sebagai dosen dan mengklaim dirinya sebagai pahlawan reformasi, tetapi malah mereka lupa tentang bagaimana kasus ini, sampai sejauh mana prosesnya dan apa bentuk pertanggung jawaban negara.

Mereka tidak melihat embrio, cikal bakal dan tidak mengevaluasi kembali kenapa bisa begini, bisa sampai pada posisi hari ini. Dan perjuangan-perjuangan kita, oleh keluarga korban, tidak ada dukungan sama sekali dari

mereka semua, para pejabat. Malah yang berkecimpung dalam kekuasaan pemerintah itu pada lupa semua.

Padahal sebagai manusia yang punya hati nurani, setidaknya mereka mampu menunjukkan solidaritasnya dari segi kekeluargaan. Makanya pantas dari segi hukum pun belum tersentuh.

\*\*\*

Harapan saya, bagaimana sejarah ini tidak akan hilang dan tidak pudar. Makanya pemerintah perlu duduk bersama korban supaya sama-sama puas dan lega hingga tidak ada yang merasa dirugikan dan direndahkan. Dalam hal penegakan hukum, selain kasus-kasus korupsi, kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Semanggi harus diprioritaskan.



## “Patokan Saya, Kasus Munir”

Nama saya **Cece Sarwelli**, ayahanda **Engkus Kusnadi**, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil Universitas Jakarta. Ia lahir pada 5 Desember 1978. Inilah kesaksian saya.

\*\*\*

Waktu itu, tepatnya hari Jumat, anak saya pergi ke kampus sekitar jam 9 pagi. Saat itu ibunya itu sudah wanti-wanti, “Hati-hati sekarang lagi musim demo. Jangan ikut-ikutanlah. Kalau waktunya pulang, ya pulang saja.” Anak saya bilang, ”Iyalah.” Habis itu, ia berangkat bersama-sama temannya.

Saya berangkat kerja duluan dan waktu saya pulang istirahat, saya nggak melihat dia lagi. Katanya, ia pergi sama temannya mengambil buku gambar dari dosennya. Suasana ibu kota waktu itu mencekam. Bisa dibilang dalam keadaan genting dan yang jadi perhatian adalah gerakan mahasiswa.

Saya pulang sore, baru datang kerja dan ngobrol dengan tetangga. Kita ramai bercerita. Dari situ, saya dengar ada tembakan, tetapi saya nggak *ngeh*. Ketika, istri saya menjerit dan menangis barulah saya *ngeh*. Waktu itu, tetangga di sekitar rumah saya spontan langsung membantu kami, tanpa ada perintah dari saya. Lalu, saya sendiri bersama istri, langsung mencari penjelasan, mencari informasi yang pasti. Akhirnya saya bersama tetangga dan istri naik mobil Kijang ke kampus Universitas Jakarta.

Sekitar setengah enam, saya bertemu salah satu pengurus kampus kalau tidak salah ke bagian kemahasiswaan. Disana saya ditanya oleh salah satu pengurusnya, “Bapak siapa?” Saya jawab, “Saya orang tua Engkus Kusnadi, mahasiswa semester 3, Fakultas Teknik Sipil.” Lantas beliau bertanya, “Ada apa, Pak?” Saya langsung menerangkan, “Saya terima telepon dari RS Medistra bahwa anak saya tertembak.” Kemudian beliau menjawab, “Oh, itu belum ada informasi disini.” Namun karena saya sudah mendapat informasi dari rumah sakit, saya yakin bahwa anak saya tertembak.

Karena pada waktu itu, kondisi jalan *nggak* bisa menggunakan mobil akhirnya tetangga dan teman-teman dekat saya berusaha membawa motor. Bagaimana pun caranya, saya harus menemukan anak saya. Akhirnya, kira-kira jam enam seperempat mulai ada informasi yang jelas, dari tetangga. Tetangga ini temannya anak saya juga.

Lalu kami, kakak-kakak saya, guru SMA 83 lalu Pak Amin, Ketua RW Tanah Tinggi, bergerak dari RS Medistra ke Aula Atma Jaya. Lalu, dari Atmajaya langsung dibawa ke RS St. Carolus. Kira-kira jam 21 00, kami mendengar kabar bahwa anak saya sudah di ruang operasi St. Carolus. Jam 23.00, saya sampai di ruang operasi.

Di ruang operasi, karena sudah melihat keadaan anak saya begitu (sudah kritis), saya sudah *nggak* tahan. Akhirnya saya langsung saya pingsan. Saya pun dibawa pulang ke rumah lagi. Sejak itu saya tidak bertemu lagi dengan Engkus sampai dia meninggal.

Yang bikin saya tidak tahan adalah kondisi mata anak saya waktu itu sampai keluar segala. Bukan, kena peluru tetapi karena dipukul sama popor senjata. Ketika saya dipegang (dijaga supaya tidak jatuh pingsan) sama kakak saya, dia bilang, “Sudah kita terima, saja.” Saya menyergah, “Tapi perlakuan TNI sampai sebegini (kejam). Kok, perlakuan TNI ini lebih-lebih dari binatang.” Nah, ini yang saya *nggak* terima.

Kalau diingat-ingat, pas kejadian itu anak pertama saya ini, seminggu lagi akan berulangtahun. Ulang tahun yang kedua puluh. Perhatian teman-temannya luar biasa, mulai sejak masuk RS Carolus sampai meninggal itu *nggak* telat, *nggak* kurang, *nggak* lebih setiap malam itu, para mahasiswa sekitar 50 orang tiap malam menunggui kami.

Bahkan ketika ada kabar Pak Wiranto mau ikut besuk, para mahasiswa sampai menahan mobilnya, sampai mau dilempar segala hingga akhirnya dia mengurungkan niatnya. Waktu itu solidaritas mahasiswa memang benar-benar dapat diandalkan. Terkadang, saya heran, mahasiswa kan membawa gerakan moral dan isi moralnya membela rakyat Tapi yah selalu diabaikan sampai terjadi *chaos* begitu.

\*\*\*

Anak saya itu sebenarnya *nggak* aktif (organisasi). Sepuluh hari sebelum Sidang Istimewa saya pernah ngomong ke anak saya, “Kamu lihat *dong*, jadi mahasiswa *nggak* ada kemauan. Orang-orang demonstrasi *kok* kamu mahasiswa apaan? Lantas dia jawab, “Kalau saya ikut demo, siapa yang mau ngasih makan, Pak? Itulah yang dia bilang. Tapi itulah nyatanya, manusia itu kehidupannya sudah digariskan oleh Tuhan bahwa beginilah kehidupan kamu.

Engkus itu lebih dekat dengan ibunya. Jadi kalau ada segala sesuatu permintaan atau apa pasti dengan ibunya. Pernah ditegur sama ibunya tiga hari sebelum meninggal, dia disuruh potong rambut. Jawabnya, “Nanti sajalah sekalian dibotakin.” Lantas langsung pergi. Itulah tanda-tanda keanehan pada dirinya (Setiap jenazah umumnya dicukur rambutnya sebelum dimakamkan - red). Itu dia bicara dengan ibunya, saya tidak menanggapi dan menyadari keanehan sebab itu *kan* timbul bila seseorang sudah mendekati ajal.

\*\*\*

Awalnya saya belum ada pikiran untuk memperjuangkan kasus ini. Sampai 40 hari, kita masih dalam suasana duka. Baru, setelah itu, saya mulai berupaya. Itu juga berkat adanya niat dari mahasiswa dan teman-temannya. Bahkan para mahasiswa juga mendatangi korban-korban yang lain karena mereka punya inisiatif ya akhirnya saya ikut.

Secara umum, upaya kami sudah cukup banyak. Bahkan bisa dibilang, saya adalah orang yang sudah frustrasi. Setiap kali saya datang ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah selalu berakhir dengan janji-janji belaka. Contoh, misalnya waktu di Pomdam Jaya, di Pasar Rumpit, selalu jawabannya, “Sedang kami proses.”

Bahkan, yang terakhir ketika saya mau naik bajaj pernah saya mau ditangkap polisi militer. Saya bilang saja, “Saudara apa (maunya)? Anda sudah menyakiti orang tua korban. Saya ini orang tua korban, kok anda malah *nangkap* saya. Boleh anda sekarang tangkap saya tapi anda bisa dipecat.” Akhirnya dia mengurungkan niat.

\*\*\*

Diantara banyak tokoh politik, yang jelas-jelas memberikan janji kepada para orang tua korban adalah Gus Dur (KH Abdurahman Wahid). Sayangnya, keburu diturunkan Amien Rais cs. Waktu itu dia bilang, “Saya akan panggil panglima (TNI) dan saya akan berkoordinasi dengan kejaksaan maupun MA untuk bongkar kasus Semanggi.” Eh, *nggak* tahunya enam hari kemudian dia dilengserkan.

Yang lain, seperti Megawati, perhatiannya *nggak* ada. Habibie juga *nggak* ada reaksi dan *nggak* ada respon. Menurut saya, itu semua karena mereka takut. Mereka itu sipil, untuk menggugat kepada militer *nggak* bisa. Adapun Gus Dur, dialah yang berani ceplas-ceplos. Sekarang kalau kita berhadapan dengan SBY yang seorang militer, pasti mereka (para pelaku) dilindungi.

Jadi perhatian pemerintah itu sampai sekarang *nggak* ada. Biasanya, ketika mereka sudah duduk di suatu kursi lembaga atau suatu kursi yang membawahi rakyat, mereka bisa saja berjanji kepada rakyat, “Nanti akan saya akan koordinasikan dengan instansi yang lain.” Tetapi, itu hanya suatu janji. Kalau nanti kalau suatu lembaga terus bergerak sendiri, iris kuping saya kalau bisa menyelesaikan masalah ini.

Seharusnya dalam perjuangan mengungkap kasus Trisakti, Semanggi I dan II, antar lembaga itu saling terkait. Saling bahu membahu. Karena disini yang mempunyai peranan besar adalah parlemen, maka presiden walaupun dia panglima tertinggi tetap harus tunduk. Itu kalau hukum itu mau ditegakkan, tapi itu *nggak* ada. Hanya janji belaka-lah.

\*\*\*

Sekali lagi saya tegaskan, SBY itu kan (latar belakangnya) militer maka saya akan lihat dulu, paling tidak selama 100 hari jangka waktunya. Karena presiden sekarang *kan* lain, dia dipilih oleh rakyat. Dan kalau saya, seorang rakyat memohon kepada beliau untuk menuntaskan kasus TSS dan ternyata beliau mengiyakan berarti dia itu benar-benar presiden rakyat. Tetapi kalau beliau misalnya masih hanya janji belaka pasti beliau itu ya istilahnya sudah membohongi rakyat.

Bahkan, menurut saya, patokannya pada kasus Munir sajalah. Kalau kasus Munir itu terkuak dan terungkap betul-betul siapa pelakunya, berarti saya punya harapan. SBY seharusnya ingat, dia itu presiden rakyat bukan presiden MPR.

Begitu pula, dengan Jaksa Agung yang latar belakangnya dari LBH (Abdurahman Saleh), seharusnya dia lebih mengerti *dong*. Jangan mau terintimidasi oleh pihak-pihak lain, jangan takut berpihak kepada rakyat. Saya menghimbau kepada para penguasa atau kepada pemerintahan yang sekarang agar secepatnya menuntaskan kasus-kasus HAM dan diadili pelakunya.

\*\*\*

Ini sebenarnya hikmah Allah SWT dari awal yang diberikan kepada keluarga kami terutama kepada istri saya. Karena saya sudah tidak mempunyai harapan hidup secerah seperti yang saya jalani. Karena ibunya sudah hampir hilang ingatan memikirkan anak yang menjadi tumpuan harapan karena anak ini benar-benar bisa diandalkan.

Dia itu dari SD, SMP, SMA dapat beasiswa. Itu *kan* tumpuan orangtua, saya sering bilang kepada Engkus, “Nanti kamu kalau mau macam-macam, sebaiknya kalau sudah kerja saja. Sekarang selesaikan dulu semuanya.” Dia itu (demi berhemat) setelah kuliah mana mau pakai motor.

Bahkan akibat kejadian tersebut, waktu itu saya sudah *nggak* punya harapan untuk melanjutkan hidup. Semangat hidup itu sudah pupus. Meski anak yang satu masih ada, tapi dengan meninggalnya almarhum ini saya selaku orang tua terpukul. Jadi harapan saya buyar gitu. Tetapi sekarang saya sudah menerima dan menyadari, “Oh anak saya sudah tidak ada.” Akhirnya inilah sifat manusia yang diberikan kepada Allah, yakni: menerima kenyataan.

\*\*\*

Kepada keluarga korban yang lain saya berharap tetap berjuang menegakkan keadilan hukum di Indonesia ini. Meski saya tidak bisa bergabung sepenuhnya dalam perjuangan tetapi saya tetap mendorong, mendukung. Sebab saya masih harus bekerja demi keluarga saya. Tetapi apabila nanti suatu instansi atau suatu lembaga pemerintah memerlukan tandatangan atau memerlukan kesaksian saya, saya siap. Saya siap membela orang banyak.

Sebab, setidaknya, kita harus melindungi sejarah. Ini *kan* bukti sejarah. Bukti yang menggambarkan dimana masyarakat bisa melihat, merasakan, lalu membuat kesimpulan bahwa pemerintahnya telah menutup-nutupi (bukti sejarah).

## “Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan”<sup>2</sup>

Nama saya, **Maria Katarina Sumarsih**, ibunda dari: **Bernardinus Realino Norma Irmawan** (Wawan), mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, salah seorang Korban Peristiwa Semanggi I, 13 Nopember 1998.

\*\*\*

*Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk DIA (Filipi 1:29)*

Pada hari Senin, 15 Mei 1978, jam 12.05, lahir anak pertama seorang bayi laki-laki. Pada hari Rabu, 17 Mei, malam, Pater J.G. Beek SJ datang mengunjungi kami di rumah bersalin dan memberi berkat kepada anak saya. Beberapa hari kemudian Mas Arief mohon nama permandian kepada beliau, dan beliau memberikan nama permandian: **Bernardinus Realino**, dengan keterangan bahwa Bernardinus adalah seorang wali kota di benua Eropa yang dengan gigih memperjuangkan keadilan bagi rakyat tertindas, sedangkan Realino lebih dikaitkan dengan nama asrama mahasiswa di Yogyakarta, yang pernah didirikannya.

Pada hari Minggu, 25 Juni 1978, si kecil Norma Irmawan dipermandikan di Gereja St. Kristophorus oleh Romo K. Bertens, MSC. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 April 1992, Wawan menerima Sakramen Penguatan di gereja yang sama oleh Bapak Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto SJ. Menjelang penerimaan sakramen penguatan, Wawan mengkonsultasikan nama yang akan dipilih, yaitu Yusuf. Dalam surat Sakramen Penguatan, nama Wawan menjadi: **Bernardinus Yusuf Realino Norma Irmawan**.

Menjelang kelahiran anak kedua, kami berdua tidak menyiapkan nama laki-laki. Doa kami dikabulkan lagi, karena lahirlah seorang bayi perempuan pada tanggal 14 Januari 1980, yang jauh sebelumnya sudah kami siapkan namanya. Untuk nama permandiannya, Mas Arief memilih nama: **Benedicta Rosalia**. Pada hari Minggu, 5 Juli 1981 dipermandikan, tepat hari ulang tahun ayahnya. Dengan demikian nama lengkap anak kedua adalah **Benedicta Rosalia Irma Normaningsih** dan panggilan sehari-harinya adalah Irma. Kehadiran Wawan dan Irma, benar-benar memberikan semangat dan harapan hidup kami sekeluarga.

Sebagai seorang Ibu, saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada suami ataupun kepada anak-anak untuk mengembangkan prestasinya. Kami menyekolahkan anak-anak di sekolah Katolik dengan maksud agar sekaligus

---

<sup>2</sup> Jakarta, 31 Agustus 2004.

saya bisa belajar tentang Katolik. Wawan dan Irma sekolah TK, SD dan SMP di Bunda Hati Kudus, Jelambar, Jakarta Barat. Kemudian Wawan melanjutkan ke SMA Van Lith Pangudi Luhur di Muntilan dan selanjutnya kuliah di Universitas Atma Jaya Jakarta jurusan Ekonomi Akutansi. Irma melanjutkan ke SMU Negeri 65 Jakarta Barat dan selanjutnya kuliah di Universitas Indonesia.

Ketika Irma merasa tidak nyaman sekolah di Bunda Hati Kudus yang kebanyakan muridnya adalah orang-orang Tionghoa yang rata-rata kehidupan sosial ekonominya lebih beruntung, maka saya mengikuti keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah negeri. Saya menjadikan hari Minggu adalah hari belajar kerumahtanggaan agar anak-anak saya bisa seperti adik-adik saya yang semuanya bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Ketika anak-anak mulai mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu, saya berada dipuncak kebahagiaan, karena Wawan dan Irma tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang tidak bermasalah.

Suka dan duka dalam keluarga kita rasakan bersama. Apabila tidak ada pembantu, Wawan paling senang mencuci perabotan rumah tangga dan Irma lebih senang menyapu dan mengepel. Makan malam adalah saat kami sekeluarga berkumpul untuk berbagi rasa, berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Kami sekeluarga saling mengetahui aktivitas dalam keseharian, yaitu saya di Sekretariat Jenderal DPR-RI, Mas Arief di CSIS, Wawan di kampus dan Irma di sekolahnya. Di meja makan kami selalu berdiskusi kecil tentang menu makanan sampai dengan masalah politik.

Kegiatan Wawan semasa kuliah cukup padat, belum lagi ia harus mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Maka untuk menghemat waktu, Wawan saya belikan sepeda motor, dan ia memilih Honda GL Pro. Ia amat senang dengan motornya itu, karena dapat mendukung aktivitasnya. Di kampus, ia aktif di beberapa organisasi, seperti: Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Anggota Redaksi Majalah "Warta", Anggota Forum Diskusi Ilmiah (Fordim), Anggota Computer Club, dan Perkumpulan Bela Diri "THS". Disamping itu, Wawan juga senang mengikuti berbagai seminar, bahkan pernah menjadi Ketua Penyelenggara seminar di kampusnya. Di gereja, ia menjadi anggota Mudika MKK yang aktif. Wawan juga aktif di Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK).

Sebagai aktivis TRuK, Wawan bergabung di posko Trotoar RS Sint Carolus. Penuturan kawan-kawan Wawan, di sekitar posko itu sering ada orang-orang bersikap aneh, yang diperkirakan mereka adalah intel. Wawan selalu menceritakan bagaimana penderitaan keluarga korban kekerasan politik di negeri ini. Wawan pernah mengunjungi keluarga Ita Marthadinata yang diperkosa dan dibunuh ketika orangtuanya akan berangkat ke PBB untuk memberikan testimony kerusakan 13-14 Mei 1998. Wawan juga mengadvokasi korban kerusakan 13-14 Mei 1998 di daerah Ciledug. Di meja makan, kami sering mendiskusikan mengapa ada banyak orang hilang, mengapa ada penculikan, mengapa ada perbedaan jumlah korban temuan TRuK dengan laporan dari institusi Negara, dan lain sebagainya. Dalam diskusi kecil itu kami

menyimpulkan bahwa itu ada kaitannya mengapa Dwifungsi ABRI harus dicabut. Semakin banyak korban diketahui maka akan semakin jelek nama Indonesia di mata dunia. Di TRuK, Wawan mengajar anak-anak jalanan untuk belajar membaca dan menulis. Di meja makan pula, Wawan mempunyai gagasan untuk meningkatkan sosial ekonomi bagi anak-anak jalanan dan program penanggulangan pengendalian banjir di Jakarta. Program penanggulangan pengendalian banjir belum sempat dilaksanakan, karena terlalu banyak korban kejahatan kemanusiaan di sekitar lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, sehingga hal itu sangat membuat sibuk seluruh Anggota TRuK. Saya pernah menonton tayangan televisi ketika Wawan sedang berada di tengah-tengah tumpukan barang-barang logistik di kampusnya untuk keperluan demonstrasi mahasiswa menentang pelantikan Presiden Soeharto periode 1998-2003 dalam Sidang Umum MPR-RI bulan Maret 1998. Wawan juga pernah menceritakan adanya bantuan air mineral beracun.

Hobby Wawan adalah membaca. Dia mempunyai bakat menulis, seperti ayahnya. Sejak SD nilai pelajaran mengarang selalu bagus. Bakat menulis itu sebenarnya sempat terpupuk ketika mengikuti pelajaran jurnalistik dalam *extra* kurikuler di SMA. Saya mengagumi artikel yang pernah ditulisnya, yaitu mengenai DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh. Bahasanya runtut, terstruktur, dan saya sempat memberi saran agar penyebutan nama orang sebaiknya dipakai nama samaran. Kami sekeluarga pernah merasa cemas, ketika Wawan bercerita bahwa ia berada pada urutan pertama dari 5 orang kawannya dalam daftar di Bais-ABRI yang akan dihabisi. Menurut kawan-kawannya di kampus, dan pernah juga dituturkan Wawan di rumah, banyak informan atau yang biasa disebut intel yang disekolahkan di berbagai kampus di Jakarta. Mereka ditugasi untuk memata-matai kegiatan mahasiswa. Dari itulah, setiap saat dan di mana saja saya selalu memohon, "Tuhan lindungilah anak-anak saya." Setiap berangkat kuliah saya selalu mencium pipinya, sambil mengingatkan agar jangan ada barang yang ketinggalan dan berpesan agar Wawan menjaga diri baik-baik.

Saya dan Wawan selalu berkomunikasi dengan menggunakan nomor telepon BPM FE Atma Jaya, telepon kantor dan telepon rumah. Pada saat rasa cemas menghantui, saya menasehati agar Wawan lebih fokus kuliah saja, agar segera selesai kuliah dan bekerja, sehingga nantinya gajinya disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya merasa agak tenang ketika Wawan menerima informasi bahwa namanya dalam *file* di Bais-ABRI sudah dihapus dari daftar orang-orang yang akan dihabisi. Ketika itu, Wawan pernah minta dibelikan *handphone*, tetapi tidak saya penuhi. Sebab, disamping pada saat itu *handphone* masih merupakan barang mewah, juga rasanya justru sangat mengganggu. Kini, saya sungguh sangat menyesal, karena mungkin apabila Wawan mempunyai *handphone*, ia bisa selamat dari kekejaman politik para penguasa. Saya sering merenungkan, bagi mereka yang memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan politik, adalah kerja kemanusiaan tanpa imbalan apa-apa, tetapi penuh dengan resiko. Sebagai sebuah "panggilan," memang hal itu tak dapat ditolak.

Apabila kegiatan Wawan dalam keseharian sangat luar biasa, tetapi untuk Irma biasa-biasa saja. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam diri Wawan terbentuk melalui pendidikan di SMA Van Lith, yang semua siswanya harus tinggal di asrama dan di sekolah itu ditanamkan soal-soal kepedulian sosial.

\*\*\*

Tahun 1998 adalah tahun bersejarah dalam gerakan mahasiswa dan rakyat prodemokrasi yang banyak menimbulkan korban nyawa manusia tidak berdosa. Pada tanggal 21 Mei 1998, gerakan mahasiswa dan rakyat prodemokrasi berhasil melengserkan Presiden Soeharto yang memerintah secara otoriter sejak tahun 1966. Kejahatan kemanusiaan diciptakan oleh para elit penguasa secara sistemik dan meluas, sehingga terjadi pelanggaran HAM yang sungguh sangat luar biasa.

Tanggal 1 Mei 1998 adalah penembakan 3 mahasiswa Universitas Muslim di Makasar; tanggal 12 Mei 1998 adalah penembakan 4 mahasiswa Trisakti di Jakarta, tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan sosial di Jakarta, Solo, Surabaya, Lampung, Palembang dan Medan dengan korban ribuan manusia meninggal dunia di/dan terbakar di gedung-gedung pertokoan; tanggal 13 Nopember 1998 adalah penembakan terhadap 7 mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan 10 warga masyarakat, semua meninggal dunia, dan tanggal 22 Nopember 1998 terjadi kerusuhan di Jalan Ketapang, Jakarta dengan korban 1 orang warga masyarakat.

Presiden Soeharto yang dipaksa meletakkan jabatannya, mengangkat Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden dengan tidak melalui proses konstitusi. Gerakan mahasiswa dan rakyat prodemokrasi memberikan kontrak kepada pemerintahan baru untuk melaksanakan tuntutan 6 agenda reformasi, yaitu: (1) adili Soeharto dan kroni-kroninya, (2) tegakkan supremasi hukum, (3) berantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), (4) cabut Dwifungsi ABRI, (5) amandemen UUD-45, dan (6) pembentukan otonomi daerah. Jenderal Soeharto sudah turun tahta, tetapi antek-antek Orde Baru masih menguasai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga agenda reformasi itu kini tinggal kata yang menjadi slogan para elit politik. Krisis moral semakin menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini bisa dilihat dalam berita-berita di media massa, di antaranya yaitu: Soeharto ternyata masih segar bugar menikmati harta jarahannya, KKN semakin merajalela, hukum diperjualbelikan, ABRI (TNI/Polri) masih berpolitik, amandemen UUD 1945 dan berbagai produk hukum *diplintir* untuk membebaskan para jenderal pelanggar HAM dan koruptor dari jerat hukum, dan otonomi daerah dimanfaatkan untuk pemerataan korupsi di berbagai daerah. Mahasiswa dan rakyat semakin tidak mampu mengawalinya karena banyak mahasiswa yang tidak tahan haus dan lapar. Tawaran antek-antek rezim Orde Baru berupa materi dan jabatan kekuasaan telah melunturkan idealisme perjuangan gerakan prodemokrasi.



Menumbangkan pemerintahan otoriter Orde Baru lebih mudah dibandingkan dengan pengawalan pelaksanaan 6 agenda reformasi yang dituntut mahasiswa dan rakyat kepada pemerintahan yang baru. Pada bulan Nopember 1998, MPR-RI menyelenggarakan sidang istimewa, namun hasil Ketetapan dan Keputusan Sidang Istimewa MPR-RI ditolak mahasiswa dan gerakan rakyat prodemokrasi, karena hasil Ketetapan dan Keputusan Sidang Istimewa MPR-RI itu hanya untuk mengukuhkan kedudukan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang adalah perpanjangan tangan pemerintahan Orde Baru. Gelombang demonstrasi untuk mengawal reformasi semakin membesar dan dihadapi oleh militer yang dipersenjatai peralatan berat untuk perang yaitu berupa senjata laras panjang, peluru tajam, tank, panser, truk berbamper kawat berduri, *water canon*, gas air mata, peluru karet dan peralatan canggih lainnya.

Tanggal 13 Nopember 1998 adalah hari Jumat Hitam yang kelam bagi kami sekeluarga karena cinta kasih kami direnggut oleh aparat bersenjata yang menjadi alat rezim. Saat itu adalah saat menjelang penutupan sidang Istimewa MPR-RI. Pada saat itu di sekitar kampus Universitas Katolik Atmajaya, tempat Wawan menuntut ilmu, terjadi tindakan represif oleh militer yang dipersenjatai peralatan perang terhadap mahasiswa dan rakyat prodemokrasi yang hanya dengan senjata moral dan hati nurani.

Sebagai aktivis TRuK, Wawan terketuk hatinya untuk menolong korban yang jatuh. Tanpa rasa takut bunyi desingan tembakan beruntun, dengan terlebih dahulu memberitahu kepada aparat militer yang masuk ke dalam kampus, Wawan mengangkat seorang korban di halaman kampusnya, namun pada saat itulah Wawan ditembak dengan peluru tajam oleh aparat militer dengan peluru tajam mengenai dada sebelah kiri tembus jantung dan paru-parunya. Peristiwa itu sungguh di luar kemampuan yang harus saya hadapi.

Sebenarnya, sebelum peristiwa itu terjadi, di kantor saya sudah mendengar kabar akan ada tembakan bebas dengan peluru tajam, tetapi saya tidak percaya karena penembakan 4 mahasiswa Trisakti telah menimbulkan keterpurukan Indonesia di dunia internasional. Rasanya hal itu tidak akan diulangi kembali.

Seperti pepatah mengatakan: “Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.” Sore itu, seorang bernama Ivon menelpon menanyakan keberadaan Wawan. Saya langsung berteriak: “Ada yang kena ya?, Wawan ada di kampus”. Ivon menjawab: “Tante tenang saja, Ivon akan mencari Wawan, nanti Ivon telepon lagi.” Beberapa menit kemudian Romo I Sandyawan Sumardi SJ menelpon, saya menjerit: “Wawan di mana Mo, Wawan di mana ...?” Saya berteriak-teriak dan semakin tidak bisa mendengarkan kata-kata Romo lagi, kemudian telepon direbut Mas Arief. Romo Sandy memberitahukan bahwa Wawan kena tembakan dan beliau menyarankan agar kami segera ke RS Jakarta. Sebenarnya kami akan dijemput, tetapi Mas Arief memutuskan untuk berangkat sendiri. Irma saya suruh tunggu di rumah saja, barangkali Ivon masih akan menelpon.

Di sepanjang jalan, saya berdoa rosario mohon keselamatan untuk Wawan. Sodik, adik ipar saya yang mengemudikan mobil. Agar bisa segera sampai di RS Jakarta, saya meminta bantuan polisi dan tentara yang bertugas di perempatan Tomang. Karena mereka tidak ada yang mau menolong, maka saya menunjukkan KTP dan kartu pengenalan pegawai DPR-RI, tetapi saya dibentak-bentak. “Segera tinggalkan tempat ini, nanti mengundang massa, silahkan Ibu cari jalan lain saja, Ibu jangan mancing perhatian orang!”

Saya kembali ke mobil sambil menangis. Tak henti-hentinya saya berdoa rosario dan tiba-tiba keluar kata-kata “Selamat jalan anakku”, saya sadar dan menjerit “Tidak, tidak Tuhan. Tidak!” Sejenak saya pejamkan mata, kemudian saya kembali berdoa Rosario. Saya tidak tahu jalan apa saja yang kami lewati. Sampai di ujung jalan masuk rumah sakit Jakarta di Jl. Sudirman, terdengar azan maghrib, suasana hiruk pikuk membuat saya ingin segera turun dari mobil, tetapi selalu dilarang oleh adik saya.

Banyak orang dengan wajah ketakutan berlari-lari, banyak kendaraan berjalan melawan arah, dan jalan raya depan kampus Atma Jaya terlihat sinar berwarna kemerah-merahan dengan kilat-kilat api meluncur di udara sehingga terlihat jelas jalan aspal yang basah, padahal seharian tidak turun hujan. Menurut dokumentasi di beberapa video, para demonstran disemprot dengan gas air mata dan juga dengan air kimia, karena banyak yang merasakan gatal-gatal. Berkali-kali saya membuka pintu mobil untuk segera turun, tetapi adik saya melarang dan meminta agar sedikit bersabar.

Begitu mobil masuk pintu RS Jakarta, saya turun dan bertanya kepada anak-anak yang duduk di halaman. “Di mana Wawan? Di mana Wawan, mahasiswa Atma Jaya yang ditembak?” Saya tidak ingat lagi bagaimana Mas Arief, adik saya Kustini dan Dik Sodik, namun yang masih saya ingat, ketika diantar masuk ke dalam rumah sakit, kemudian ada yang mengatakan Wawan ada di UGD, kemudian ada yang mengatakan Wawan ada di basement. Saya berpikir, kalau gedung perkantoran basement biasanya untuk parkir mobil, tetapi kalau gedung rumah sakit jangan-jangan untuk kamar jenazah. Saya semakin sedih dan semakin ingin bisa segera bertemu Wawan.

Di basement banyak orang, terutama para mahasiswa dan mahasiswi. Saya dipeluk beberapa orang, dinasehati agar tabah, tetapi saya semakin berteriak, “Dimana Wawan? Dimana Wawan, anak saya?” Saya meronta-ronta, kemudian pintu dibuka dan saya melihat Wawan berada di keranda terbuka, tangannya dilipat, dua jempol kaki kanan dan kiri diikat kain putih, bercelana pendek memakai kaos putih. Seluruh badannya saya raba, perutnya tipis, “Wan, kamu lapar, Oh, Wan, kamu ditembak”. Kaosnya berlubang seperti disundut rokok, di sekelilingnya agak cokelat kemerahan. Saya buka kaosnya, “Wan, kamu ditembak.” Di dada sebelah kiri dekat putingnya terlihat lubang terbakar, disekelilingnya terlihat kecokelatan juga hanya seperti disundut rokok.

Saya berdoa, entah apa yang keluar dari lidah dan bibir saya. Selesai berdoa, saya segera ke bagian administrasi karena Wawan akan segera saya bawa

pulang. Di depan pintu kamar Wawan berada, saya bertemu Romo Al. Andang, SJ. Saya lupa bagaimana awal pertemuan itu. Saya bertanya, “Bagaimana *sih*, Mo cara berdoa yang benar, semua doa saya dikabulkan, tetapi untuk keselamatan Wawan, mengapa Tuhan tidak mengabulkan. Tolong Mo, ajarin bagaimana berdoa yang benar” Saya juga lupa bagaimana Romo Andang menjawabnya.

Administrasi keuangan diurus oleh Ibu Ita F. Nadia, seorang senior di TruK. Kemudian saya kembali ke ruang Wawan, tetapi tidak diperbolehkan. Saya masih memikirkan bagaimana agar Wawan bisa segera pulang, tetapi kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Wawan akan diotopsi. Saya semula tidak mengijinkan. Berkali-kali ada orang yang mengatakan Wawan akan diotopsi. Kemudian saya tanyakan kepada Romo Andang, “Mo, kalau orang Islam meninggal dunia itu tidak boleh ada benda asing di dalam tubuhnya, bagaimana untuk orang Katolik?” Romo menjawab: “Itu terserah Ibu”. Kemudian ada yang mengatakan bahwa otopsi itu hanya operasi kecil. Tiba-tiba saja saya mengalah dan mempersilakan.

Dengan mobil ambulan, Wawan dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Mas Arief, saya, dan ada orang yang belum saya kenal namanya, duduk di belakang disamping Wawan, Kustini (adik saya) duduk di depan bersama Ibu Ita. Di sekitar Atma Jaya suasananya masih mencekam, mobil ambulan yang kami tumpangi ditembaki. Ibu Ita berteriak-teriak, “Tundukkan kepala! Tundukkan kepala! Mobil kita ditembaki”.

Sampai di RSCM, Romo Andang, Romo A. Susilo Wijoyo Pr, dan seorang dokter TRuK bergantian menunggu Wawan diotopsi. Ibu Ita sibuk menelepon untuk mempersiapkan segala keperluan Wawan. Kepada Ibu Ita saya minta agar dicarikan peti yang bagus, baju yang bagus, dan apa saja yang paling bagus untuk Wawan. Sebenarnya saya ingin mengambil pakaian Wawan di rumah, tetapi Mas Arief mengingatkan, situasi Jakarta mencekam, tak cukup perjalanan pulang pergi dari RSCM ke rumah.

Romo Susilo merencanakan, Wawan disemayamkan di kampus Universitas Atma Jaya di Pluit, bukan di Jl. Jend. Sudirman, tetapi Mas Arief berkeberatan karena kemungkinan situasi Jakarta, besok, masih mencekam dan mengerikan. Saya mulai ingat Irma di rumah. Dengan menggunakan handphone Romo Susilo, saya menelpon Irma. Di rumah ternyata sudah banyak orang. Suara Irma seperti suara orang yang sudah lama menangis. Saya bilang: “Irma, mas Wawan ditembak, sekarang sudah meninggal”. Suara tangis Irma semakin keras, dan kemudian Pak Sintardjo, mantan Ketua Lingkungan Yohanes Pemandi, menanyakan, “Bu, bagaimana kalau Wawan disemayamkan di gereja?” Saya menjawab, “Terserah Pak Sin, saya nurut saja”. Pak Sintardjo mengusulkan jam 10.00 berangkat dari rumah ke gereja. Saya katakan, “Lebih cepat lebih bagus untuk menghindari hujan.”

Otopsi sudah selesai. Dr. Budi Sampurno yang mengotopsi Wawan, kemudian mendekati kami dan mengucapkan belasungkawa, kemudian menyampaikan

bahwa beliau akan memberikan keterangan hasil otopsi. Saya dan Mas Arief didampingi Romo Andang dan Romo Susilo mendengarkan keterangan dr. Sampurno. Sambil menunjukkan plastik kecil, beliau mengatakan bahwa: “Wawan ditembak dengan peluru tajam. Baru kali ini saya melihat jenis peluru seperti ini.” Saya menanyakan, “Kalau begitu, ini peluru canggih ya dok.” Dokter Sampurno mengatakan, “Masalah canggihnya saya tidak tahu, tetapi baru kali ini saya menemukan jenis peluru seperti ini”.

Mas Arief sempat memegang dan mengamati peluru tajam itu yang berada dalam bungkus plastik. Saya disuruh memegang, tetapi saya menjawab: “Ah *enggak* dok, itu kan yang membunuh anak saya.” Saya tidak tega melihatnya, kemudian saya sampaikan: “Maaf ya dok, dokter kan disumpah, saya mohon agar dokter juga memberikan keterangan yang sama apabila nanti diperlukan”. Mas Arief juga berpesan kepada dr. Sampurno, “Dok, saya mohon agar peluru ini dijaga baik-baik agar tidak direkayasa, karena sekarang ini banyak orang membuat rekayasa.”

Wawan dimandikan di RS Sint Carolus. Kawan-kawan Mas Arief dari CSIS sudah menunggu di rumah sakit itu. Mas Arief masih selalu menangis. Bersama petugas rumah sakit, saya memandikan Wawan. Badannya gemuk, wajahnya bersih, mulutnya tersenyum dan matanya terpejam seperti sedang tidur lelap. Singletnya terlalu ngepas di badan Wawan. Setelah Wawan berpakaian rapi, saya bertanya kepada Romo Andang: “Mo, tadi katanya otopsi itu hanya operasi kecil, tetapi kok Wawan dadanya dibelah panjang sekali?.” Beliau hanya menjawab, “Ya?” Jawaban itu terasa tidak nyambung, mungkin yang mengatakan otopsi itu hanya operasi kecil bukan Romo Andang melainkan intel. Kami membawa pulang Wawan dengan menggunakan mobil jenazah, tiba di rumah sekitar pukul 24.30. Di kompleks rumah kami penuh orang-orang yang menunggu sejak sore.

Lelah, haus dan lapar tidak terasakan. Saya tidak tidur pada malam terakhir bersama Wawan di ruang tamu di tempat Wawan diistirahatkan. Bersama mbak Setya Rini, teman sekantor, saya diajak untuk merenungkan sepanjang perjalanan hidup. Saya menghitung dosa dan menimbang-nimbang segala perbuatan antara yang jahat dan yang baik. Ciuman dan nasehat yang selalu saya berikan kepada Wawan di atas motor setiap meninggalkan rumah agar menjaga diri baik-baik, seakan menjadi firasat buruk yang kini terjadi.

Pada malam itu mbak Rini menuturkan, “Wawan adalah sekuntum bunga yang belum sempat mekar. Orang-orang seperti Wawan inilah yang selalu diincar untuk dihabsi. Mbak Marsih jangan marah kepada Tuhan dan jangan gila.” Kemudian saya berdoa untuk mohon agar Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan Wawan semasa hidupnya, dan juga berdoa untuk penembak Wawan agar dia bisa kembali menjadi manusia yang mengenal cinta kasih Tuhan.

Gelapnya malam mulai pudar dalam cahaya remang menyongsong terbitnya matahari. Wartawan RCTI jam 04.30 sudah datang. Kerabat yang dikenal

maupun yang tidak dikenal datang silih berganti. Mas Sumartono Suboko, teman sekantor di DPR-RI membisikkan kata-kata di telinga, “terimalah peristiwa ini secara Kristiani.” Kemudian, ketika datang rombongan polisi, saya marah dan mengusirnya, karena kawan-kawan atau korps merekalah yang telah merenggut nyawa Wawan.

Sabtu, jam 10.00 pagi, Pak Adi Sumarnoto, Seksi Liturgi Lingkungan, menyiapkan doa pemberangkatan Wawan ke gereja Maria Kusuma Karmel (MKK). Pada saat umat mulai berkumpul di sekeliling Wawan, Romo Susilo datang, dan beliau yang memimpin doa. Bapak dr. Fathi Dahlan, Anggota DPR-RI, memberikan kata sambutan untuk mengantar keberangkatan kami ke gereja. Sepanjang jalan, dari rumah menuju gereja, banyak orang berada di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan kepada Wawan. Saya terkejut karena mobil begitu banyak, di lapangan parkir gereja tidak menampungnya. Gereja sudah dipenuhi oleh ribuan orang, tidak hanya beragama Katolik saja, tetapi banyak Ibu-ibu berjilbab dan Bapak-bapak bersongkok putih. Tempat duduk di gereja penuh, banyak umat yang berdiri, dan ada pula yang duduk di lantai gereja.

Bunga ucapan duka cita dipajang berjajar di depan gereja. Wawan dipanggul oleh kawan-kawannya, dikawal berbagai bendera elemen pergerakan dan diiringi koor yang menambah suasana haru dan khidmad. Gereja dihiasi dengan bunga yang sangat indah, prosesi Misa Requiem dan arak-arakan para misdinar bersama 10 orang pastor dengan pakaian jubah merah bagaikan para malaikat yang datang menyambut Wawan, karena Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima persembahan Wawan dalam peziarahannya di dunia. Misa Requiem dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, Bapak Mgr. Yulius Darmaatmadja SJ. Injil Yohanes 15 : (9-17): *“Perintah supaya saling mengasihi”* dibacakan oleh Romo Susilo.

Dalam khotbah itu saya mendengar bahwa Wawan ditembak ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat militer di halaman kampus Universitas Atmajaya. Apabila tidak salah mendengar, Bapak Uskup beberapa kali menyebutkan, *“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.”* Selesai misa, ada sambutan dari Bapak Thomas Suyatno, Rektor Universitas Atma Jaya, menuturkan, *“Nama Panglima Besar Jenderal Sudirman telah dinodai oleh prajurit yang kejam dan brutal.”* Bapak Frans Seda mewakili Yayasan Atma Jaya juga memberikan kata sambutan. Bapak Harry Tjan Silalahi mewakili CSIS, menuturkan: *“Wawan saya ikuti perkembangannya sejak kecil. Wawan telah menghapus awan gelap “Jumat Hitam”, semoga merintis “Minggu Cerah.”* Ivan Yanggun alumnus Atma Jaya, mewakili Mudika Paroki Gereja MKK mengungkapkan bahwa: *“Wawan cuek dan dekil, dia pernah berkata, Van, paling nama gue nanti dijadikan nama taman gereja ini.”* Kata-kata Wawan itu pernah disampaikan kepada saya ketika nonton televisi: *“Bu, tadi Wawan bilang di gereja, paling nama gue nanti dijadikan nama taman di gereja.”* Saya menjawab, *“Ah, kamu itu ada-ada saja.”* Di halaman gereja saya bertemu Romo Sandy.

Sepanjang jalan dari gereja menuju ke Taman Pemakaman Umum Joglo, banyak orang berjajar dipinggir jalan sambil melambaikan tangan, dan ada yang memberi hormat seperti parajurit bertemu jenderal. Bendera Merah Putih setengah tiang berkibar di setiap halaman rumah. Warga masyarakat di sekitar makam, banyak yang menyediakan makanan dan minuman untuk ribuan orang yang sudah lama menunggu. Ibadat Sabda pemakaman dipimpin Romo Susilo. Wawan dimakamkan di Blok II nomor 13/11. Beberapa hari kemudian, saya pernah menanyakan kepada Pak Wibowo, Ketua Wilayah Yohanes Pemandi, apakah nomor 13/11 sengaja dicari untuk menyamakan tanggal dan bulan penembakan Wawan? Ternyata Pak Wibowo mengatakan, bahwa itu sama sekali tidak disengaja dan itu hanya kebetulan saja.

Acara pemakaman sudah selesai. Ketika saya pulang masih banyak anak-anak mahasiswa dan masyarakat, tinggal di makam. Romo Andang masih tampak lelah, tetapi masih menawarkan untuk mengantar pulang. Saya pulang bersama adik-adik saya, dan tiba di rumah sudah ditunggu wartawan dan kawan-kawan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI. Saya mulai terbayang masa depan yang suram dan menakutkan. Saya tidak siap lagi berada di tengah-tengah komunitas yang selalu membahagiakan hidup saya. Perasaan itu mendorong keinginan saya untuk keluar dari pekerjaan. Keputusan itu saya sampaikan kepada mereka yang duduk dalam satu lingkaran di ruang tamu - tempat Wawan dibaringkan untuk yang terakhir kalinya. Berita itu cepat menyebar di kantor, sehingga ada beberapa mantan anggota DPR-RI yang menelpon, dan memberi nasehat agar jangan keluar dari pekerjaan.

\*\*\*

Hidup ini seperti perahu berlayar di tengah samudera. Sejenak perahu yang saya tumpangi berlayar dengan tenang, kemudian dengan tiba-tiba diguncang bajak laut yang ganas, dan kemudian perahu karam, kandas, di dasar laut yang curam. Saya menggelepar dalam himpitan batu karang, tak berdaya menahan jiwa terluka. Malapetaka itu mengingatkan nasehat kakek nenek bahwa dalam hidup di dunia ini ada yang lebih berkuasa. Sang Hyang Widhi Pencipta Langit dan Bumi adalah yang mahasegalanya; yang selalu melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan umat-Nya. Ketika lelah, DIA memberikan kekuatan, ketika dihimpit derita, DIA memberi hiburan, ketika putus asa, DIA memberi pengharapan.

Mas Arief bisa memandang jauh ke depan. Surat-surat ucapan terima kasih menjadi perhatian pertama dalam mengobati luka jiwanya. Kemungkinan hidup dan harus berjuang dalam kesendirian, jauh-jauh sudah diperhitungkan pula, karena kawan-kawan Wawan suatu saat diwisuda, bekerja, dan kemudian berumah tangga sehingga tak ada waktu lagi untuk menuntut keadilan. Para aktivis akan disibukkan oleh kejahatan-kejahatan baru yang sengaja diciptakan elit politik untuk menutup dan melupakan kejahatan masa lalu.

Mas Arief menilai saya selalu dalam kondisi labil, tetapi saya merasa seperti air mengalir ke mana saya suka. Kusurungkan doa, puasa, dan cucuran air

mata untuk melepas pergumulan kemana harus melangkah. Bangun tidur saya awali dengan membaca Kitab Suci dan berdoa, sekitar jam 07.30 berdoa di makam Wawan, jam 12.00 doa Rosario, jam 17.00 berdoa dan mendaraskan litani Nama Yesus yang tersuci, litani Hati Yesus yang Mahakudus dan litani Santa Perawan Maria, menjelang tidur berdoa dan kadang-kadang bisa bernyanyi, jam 24.00 dan setiap terbangun juga berdoa apa saja sesuai keinginan hati.

Saya percaya, Tuhan Yesus Kristus berkarya melalui umat-Nya untuk menolong mengangkat perahu saya yang karam. Kawan-kawan Wawan dari TRuK pada saat-saat tertentu mengadakan ibadat sabda dan refleksi di makam Wawan. Kemudian dilanjutkan berkunjung ke rumah dengan suasana hangat dalam keluarga. Sapaan para Pastor dan para Frater, meneguhkan iman dan memberi kekuatan untuk bangkit menatap realita yang menimpa. Anak-anak mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta, dan anak-anak dari KontraS, selalu menemani sampai larut malam. Ria, keponakan Wawan, yang duduk di TK. St. Andreas selalu mencarikan buku Satu Perjamuan Satu Jema'at. Kustini, selalu memberikan buku Saat Teduh. Adik sepupu saya, Menuk, sering berjam-jam membacakan Kitab Suci melalui pesawat telepon.

Ibu Titiek, seorang pendeta yang juga wartawan majalah D & R, sering menelpon memberikan rangkaian kata-kata doa dan ayat-ayat Kitab Suci di antaranya Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi 4:13, berbunyi: *“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*. Ibu Titiek sering datang ke rumah dan juga ke kantor, untuk berdoa bersama. Terakhir berjumpa di kantor dengan kata-kata, “Ya sudah, Ibu lebih suka menikmati penderitaan. Mangga muda itu asam rasanya, tetapi Ibu hamil senang menikmatinya.” Dan masih banyak lagi, umat-Nya yang diutus untuk menghibur dan menguatkan jiwa kami sekeluarga.

Wartawan dalam dan luar negeri banyak berkunjung ke rumah. Dua orang wartawan dari TV Belanda menuturkan kekejaman militer dalam insiden Jumat Hitam, 13 Nopember 1998, adalah 10 kali lipat insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Mereka juga menuturkan gerombolan militer maju ke depan, berhadapan dengan massa, mengokang senjata dan mengarahkan ke mahasiswa, kemudian mundur dengan bergembira ria sambil menyanyi dan menari-nari. Surat-surat melalui pos, e-mail dan faksimili berisi penghiburan dan hujatan terhadap militer datang dari dalam dan luar negeri. Banyak orang memberitahukan, bahwa banyak gereja di beberapa tempat di Indonesia banyak yang mengadakan Misa/Kebaktian untuk Wawan dan kawan-kawannya yang telah gugur.

Hidup saya menjadi berubah, rasa enggan untuk bergaul selalu menimbulkan pertengkaran dengan Mas Arief. Berhari-hari saya tidak bisa meninggalkan ruang tamu tempat Wawan diistirahatkan. Berhari-hari duduk di pojok ruang tamu dekat jendela, berdoa, sambil menunggu perkembangan berita penembakan Wawan di harian Kompas. Berbulan-bulan tidur di ubin dan di gudang. Bertahun-tahun pekerjaan di rumah dikerjakan Mas Arief dan Irma.

Berminggu-minggu saya tidak merasa lapar. Pertama kali bisa merasakan lapar, saya bilang kepada Tuhan sambil menangis, “Tuhan Yesus, saya lapar.” Sudah berkali-kali mencoba makan nasi, tetapi setiap melihat nasi leher terasa diikat.

Akhirnya sampai sekarang saya pantang nasi dan berpuasa setiap hari Kamis, hari Jumat yaitu hari penembakan Wawan, dan hari Sabtu yaitu hari pemakaman Wawan. Setiap hari, setelah jam 12.00 sampai menjelang malam saya juga tidak makan. Apabila tidak mampu keluar dari suatu pergumulan, rasanya ingin bercerita panjang lebar dengan Romo Sandy, tetapi apabila sudah bertemu yang keluar hanya kata-kata, “Mo, mengapa saya selalu menangis dan mudah marah?”. Romo Sandy selalu memberikan jawaban standar sambil tersenyum, “Itu wajar.” Ibu Dr. Karlina L. Supeli juga dengan lemah lembut selalu memberikan jawaban standar, “Itu perlu proses.”

Makam Wawan adalah taman bagi kami sekeluarga. Setiap hari kami ke makam untuk berdoa dan merawatnya. Bunga tabur selalu menghiasai makam Wawan, dan setiap hari Minggu kami panjatkan doa rosario. Kadang-kadang ada peziarah yang tiba-tiba bergabung untuk berdoa bersama dan sampai sekarang masih ada kawan-kawan Wawan yang berziarah. Kadang-kadang ada yang meninggalkan pesan lewat sepucuk surat, ada juga yang hanya menabur bunga. Tetapi beberapa orang petugas makam selalu memberitahukan apabila ada kawan Wawan yang datang.

Sodiq, adik ipar saya, memberitahu ada berita di televisi bahwa pemerintah akan memberikan santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi yang dirawat di rumah sakit Rp 200.000,-. Kalau memang itu benar terjadi, Mas Arief dan saya merencanakan agar penyerahan itu di depan wartawan dan di sebuah kantor pemerintah. Namun di luar dugaan, pada hari Senin, 1 Desember 1998 ada 4 orang petugas Palang Merah Indonesia datang mengantarkan santunan dari Negara berupa satu lembar cek senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) beserta satu lembar surat ucapan belasungkawa dari Menteri Sosial, Ibu Yustika Baharsyah.

Saya di rumah sendirian, karena Mas Arief ke kantor dan Irma kuliah. Seperti ada yang mengatur, cek itu saya terima, tetapi kemudian secara lisan dan tertulis di bawah tanda terima, saya minta bantuan kepada empat orang petugas PMI itu untuk memberikan sumbangan itu kepada yang menembak Wawan. Apabila yang menembak Wawan tidak ditemukan, agar diberikan kepada aparat militer yang bertugas pada hari Jumat sore tanggal 13 Nopember 1998. Dan apabila itu pun sulit ditemukan pula, agar diberikan kepada 163 prajurit yang dikenakan sanksi.

Setelah petugas PMI pulang, saya menangis sambil membenturkan kepala beberapa kali ke tembok. Sudah hilang kepercayaan saya terhadap setiap orang. Saya berpikir tidak mungkin bantuan itu disampaikan sesuai permintaan saya. Saya berdoa, mohon petunjuk apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian berkali-kali saya telepon ke Departemen Sosial untuk bisa berbicara



dengan Ibu Menteri, tetapi tidak berhasil. Kemudian saya menelepon Ibu dr. Ida Yusi Dahlan, Wakil Ketua Korbid Kesra Fraksi Golkar DPR-RI, pimpinan yang saya layani di kantor. Beliau membuat konsep surat melalui telepon untuk dikirim kepada Ibu Menteri Sosial. Berhari-hari saya menunggu jawabannya, tetapi tidak ada kabar beritanya.

Kemudian Marlini, wartawan Majalah Femina, menyarankan agar membuat surat terbuka di media massa. Beberapa hari kemudian, Marlini datang lagi dan memberitahukan bahwa Tabloit Detak memuat surat terbuka itu dan kemudian diikuti oleh berbagai media massa lainnya. Beberapa minggu kemudian, kawan sekantor memberitahukan bahwa keberanian mengembalikan santunan negara itu mendapat pujian beberapa anggota DPR-RI. Pengembalian santunan itu juga diangkat dalam khotbah Romo Sandy dalam misa di Jawa Timur.

Saya selalu menanyakan kepada siapa saja yang datang ke rumah, tentang apa yang dilakukan Wawan pada saat menjelang ditembak. Saya juga ingin mendengar pesan terakhir Wawan untuk kami sekeluarga. Pada peringatan untuk mengenang 40 hari, saya mengundang Ibu Ita F. Nadia untuk memberikan kesaksian. Ibu Ita adalah senior di TRuK. Beliau menuturkan bahwa hubungan beliau dengan Wawan sangat dekat. Katanya, Wawan berhati lembut. Ketika Ibu Ita membonceng motor dan tidak memperlambat kecepatannya saat melintasi polisi tidur, tiba-tiba Wawan berhenti dan minta maaf karena motornya loncat. Wawan berjiwa penolong. Ketika Ibu Ita mendapat terror, Wawan menawarkan diri untuk menjaga putra-putrinya.

Sebelum ditembak, bersama 6 orang kawannya mengangkat dan menyemprotkan air hidran di depan kampus Atma Jaya untuk menetralkan gas air mata. Ketika ditembak, di leher Wawan masih menggantung tas berisi obat-obatan. Saat itu, tembakan aparat secara beruntun diarahkan ke kampus Atma Jaya dan banyak korban berjatuh. Ada tiga orang, yang meloncat terkena tembakan di kakinya, yang membungkuk terkena pundaknya. Dan Wawan, ketika dalam posisi mengangkat korban, terkena tembakan di dadanya. Di akhir hayatnya, Wawan hanya sempat mengatakan, "Haus, panas, haus". Orang yang ditolong Wawan itu pernah datang di makam Wawan dengan menggunakan krek.

Pada tanggal 12 April 2000, Dian, seorang wartawan radio, menuturkan: "Ibu, saya baru siap menemui Ibu, karena saya tahu Ibu sangat mencintai Wawan. Sebelum ditembak, Wawan ada di samping saya. Pada saat itu militer masuk ke dalam kampus. Di halaman kampus ada korban jatuh. Wawan memberitahukan kepada seorang tentara: "*Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak,*" Jawab tentara, "*Boleh ..., boleh ..., silahkan*". Kemudian Wawan melambaikan bendera putih sebagai tanda akan menolong korban, tapi justru Wawan kena tembakan di tempat itu".

Pada bulan Januari 2003, Pak Noor seorang pegawai asuransi Wahana Tata pada waktu menyampaikan polis asuransi, dan tahu bahwa Mas Arief adalah

orangtua Wawan korban Semanggi, menuturkan: “*Alhamdulillah, saya akhirnya bisa bertemu dengan oran tua Wawan.*” Pak Noor adalah seorang yang mengemudikan ambulans swasta, yang membantu mengangkut korban Semanggi, 13 Nopember 1998. Dia masih ingat ketika mobil ambulans itu ditembak.

Misa peringatan untuk mengenang 100 hari Wawan di rumah, dipimpin Romo Andang. Bacaan Kitab Suci diambil dari Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi (1:18-26) “*Kesaksian Paulus dalam penjara*”. Dalam bacaan itu, saya merasakan seperti kisah perjalanan peziarahan Wawan di dunia. Sedang Injil Yohanes 15:13, berbunyi: “*Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya*” yang dipakai untuk mengantar Wawan ketika misa requiem, seakan-akan buah peziarahan semasa hidup Wawan.

Pada hari Minggu, 21 Februari 1999, TRuK mengadakan misa peringatan untuk mengenang 100 hari Wawan, di gereja Santo Yosef, Jl. Matraman Raya 27, Jakarta Pusat dilanjutkan dengan dialog tentang Pekerja Kemanusiaan. Misa dipimpin oleh Romo Sandy, dengan para selebran yaitu Romo Andang, Romo I Nyoman SVD, dan Romo J. Sudarminto SJ. Dalam kotbahnya, Romo Sandy menyebut Wawan adalah seorang *Human Right Defender*. Dalam dialog, Mas Arief menyampaikan bahwa Pomdam Jaya, katanya, menghadapi kesulitan untuk mencari saksi. Itu sangat mungkin, karena mereka takut menjadi saksi. Sebab ada kecenderungan aparat penyidik mengarahkan para saksi menjadi tersangka. Saat itu beberapa aktivis TRuK siap menjadi saksi, dan untuk sementara terdaftar nama 5 orang, yaitu: Romo Sandy, Ibu Ita, Renato, Rinto dan Apong. Apabila 5 orang tersebut sudah dipanggil, masih banyak anggota TRuK yang siap menjadi saksi.

Daftar itu saya kirim ke Pomdam Jaya melalui pos, faksimili dan berkali-kali saya tanyakan melalui telepon, tetapi 5 orang saksi yang saya ajukan itu tidak pernah mendapat panggilan. Ketika saya menanyakan hal tersebut kepada Pomdam Jaya dalam audiensi dengan keluarga korban, “Mengapa 5 saksi yang saya kirim tidak dipanggil?,” Bapak Ir. Kol. CPM Wempi Hapan, Kabag Sidik Pomdam Jaya, menjawab: “Saksi sudah cukup.” Namun ketika dicecar pertanyaan oleh Ketua Pansus DPR-RI tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum, Pomdam Jaya mengakui tidak melakukan penyidikan terhadap penembakan mahasiswa tanggal 13 Nopember 1998, peristiwa Semanggi I.

Misa peringatan untuk mengenang 1 tahun kepergian Wawan dipimpin oleh Romo A. Susilo Wijoyo Pr. Sebelum misa dimulai, beliau menceritakan tentang kehidupan Ayub yang tabah menerima apapun yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan misa peringatan untuk mengenang 2 tahun kepergian Wawan, dipimpin oleh Romo Ign. Widodo Kartautama, OCarm Kepala Paroki gereja MKK. Melalui kotbahnya menuturkan, bahwa beliau yang mengusulkan kepada Bapak Uskup agar dalam misa *requiem* untuk Wawan menggunakan jubah merah sebagai lambang kemenangan.

Sekitar bulan Desember 1998, warna jubah merah lambang kemenangan itu, ditanggapi dengan sinis oleh sebuah tabloid. Misa peringatan 1000 hari mengenang kepergian Wawan, dipimpin oleh Romo Sandy. Dalam kotbahnya, beliau menyebut Wawan adalah seorang *Human Right Defender*. Beragam orang memberikan sebutan untuk Wawan, ada yang menyebut sebagai seorang pejuang demokrasi, ada yang menyebut sebagai bunga gereja, dan lain lagi dengan Partai PIB, yang menyebutnya sebagai pahlawan reformasi.

Dalam peringatan 3 tahun mengenang kepergian Wawan, di Kampus Universitas Atma Jaya juga menyelenggarakan peringatan khusus yaitu mengabadikan nama “B.R. Norma Irmawan (Wawan)” sebagai nama sebuah ruangan ujian, di lantai V gedung Woytyla. Hidangan makan siang disediakan tumpeng 3 buah, 2 berwarna putih dan satu berwarna kuning, lengkap dengan lauk pauknya. Hidangan khusus itu dimasak oleh Dekan Fakultas Ekonomi yaitu Bapak Drs. Sofian Sugioko, MM. Pada acara peringatan dan pengabdian nama itu dihadiri oleh Rektor Atma Jaya, Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana. Pada saat DPR-RI menggelar rapat-rapat Pansus tentang Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, beliau ikut long march dari Kampus Atma Jaya menuju DPR-RI, dan beliau juga memberikan orasi di depan pintu gerbang gedung DPR-RI.

Misa peringatan 5 tahun mengenang kepergian Wawan dipimpin oleh Romo Henrikus Suwaji OCarm, Pastor Kepala Paroki Gereja MKK. Misa diselenggarakan di gereja, dimaksudkan agar semangat Wawan bisa membangkitkan kepekaan sosial di masyarakat, terutama bagi anak-anak muda di Paroki Gereja MKK. Beliau memberikan kenang-kenangan untuk umat berupa sekat buku dengan gambar foto Wawan bertuliskan: “B.R. Norma Irmawan (Wawan), Akulah biji gandum yang jatuh ke tanah” dan dibaliknya berisi biografi singkat Wawan.

Nama Bernardinus Realino Norma Irmawan juga dikenang oleh Romo Patrisius Mutiara Andalas SJ. Beliau ditahbiskan di gereja Kota Baru Yogyakarta pada hari Rabu, 28 Juli 2004. Kenang-kenangan untuk umat berupa sekat buku dengan gambar foto Desmond Tutu, seorang Pastor pejuang kemanusiaan di Afrika Selatan. Ketika masih Frater, Romo Andalas adalah aktivis TRuK di posko Trotoar, bersama-sama dengan Wawan. Dia pernah memimpin ibadat sabda di makam Wawan. Dia sekaligus kawan diskusi dan pendamping, yang selalu mengikuti setiap acara unjuk rasa yang dilakukan oleh keluarga korban Mei 98 dan Nopember 98 untuk menuntut tanggung jawab Negara.

Pada tahun 2002, Tino Sarungalo memproduksi film dokumenter berjudul “Student Movement” yang di dalamnya tertulis nama-nama mahasiswa yang gugur dalam peristiwa Trisakti - 12 Mei 1998, Semanggi I - 13 Nopember 1998 dan Semanggi II - 24 September 1999, termasuk nama B.R. Norma Irmawan. Tahun 2004, Bapak Lukmantoro Ds memproduksi film dokumenter yang dikemas dalam kisah romantika remaja berjudul “Kutunggu di Sudut Semanggi, fakta yang nyaris terlupakan Tragedi Semanggi November 1998.” Di dalamnya tertulis nama mahasiswa yang gugur, termasuk nama B.R. Norma Irmawan.

Bapak Frits Herman Pangemanan menulis puisi kenangan untuk Wawan - Bernardinus Realino Norma Irmawan - mahasiswa Unika Atma Jaya yang tertembak dalam Tragedi Semanggi, 13 November 1998 yang berjudul "Cinta di Antara Duka" dalam buku Mencinta Hingga Terluka, dan juga puisi untuk mengenang Tragedi Semanggi, 13 November 1998 berjudul "Kubur semanggi" dan "Darah Memerah" yang ditulis dalam buku "Tragedi Peradaban". Buku-buku tersebut diluncurkan di ruang Pastoran Kemakmuran, Jakarta.

*Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;  
carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.*  
(Mat. 7:7; Luk. 11:9)

Wawan adalah satu-satunya mahasiswa yang ditembak tepat sasaran yaitu di dada sebelah kiri mengenai jantung dan paru. Wawan ditembak dari depan, maka saya berkeyakinan penembaknya selalu mengingat wajah Wawan yang dibunuh. Kawan-kawannya ada yang ditembak mengenai punggung tembus ke ulu hati dan ada yang tembus di kepala. Saya sering terbayang peluru tajam berupa timah panas yang mengeram di dada Wawan. Hati terasa sakit, lalu saya berbisik: "Wan, maafkanlah Ibu, Ibu mencintaimu dengan hati yang tulus."

Kasih dan cinta saya menumbuhkan niat melanjutkan perjuangan Wawan yang belum selesai. Tetapi terkadang, saya ragu dan merasa berlebihan. Tetapi tidak mengapa, saya mencoba berbuat sesuatu agar peristiwa penembakan Wawan tidak dilupakan, dan agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Berkali-kali beberapa instansi kami kunjungi, ada yang menerima dengan baik sehingga bisa audiensi, tetapi berkali-kali pula dilarang dan dihadang oleh aparat militer. Saya sering mendatangi beberapa instansi hanya berdua dengan Mas Arief. Beberapa artikel Mas Arief mengenai kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pernah dimuat di media cetak.

Hari Senin, 12 Pebruari 1999 saya mulai masuk ke kantor. Badan terasa melayang, sempoyongan dan air mata selalu mengalir. Saya bersandar di tembok sambil menangis, kemudian ada kawan yang memapah sampai di ruang kerja. Pikiran saya kosong, membaca surat undangan Anggota DPR-RI, berulang-ulang pun, tidak mampu menangkap isi surat undangan itu. Berhari-hari saya menyesuaikan dalam hidup baru. Saya menyesali diri, mengapa terlalu patuh, taat, dan loyal kepada penguasa Negara yang zalim, dan telah merenggut kebahagiaan hidup kami sekeluarga. Sampai sekarang saya tidak pernah ikut upacara di kantor, karena saya tidak bisa lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi keluarga korban, lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan pada saat-saat negoisasi menghadapi jalan buntu untuk menemui pejabat yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM di negeri ini.

Seiring dengan perjalanan waktu, secara perlahan saya bisa menyesuaikan lingkungan. Sebagai pegawai Sekretariat jenderal DPR-RI, yang diperbantukan di Sekretariat Fraksi Partai Golkar, saya bisa memperoleh dukungan sarana dan prasarana untuk menggugat dan mempersoalkan penembakan Wawan. Beberapa koran bisa saya baca, pesawat telepon, ruang kerja, dan ruang rapat, bisa saya pergunakan untuk mengadakan koordinasi dengan teman-teman di jaringan aktivis Hak Asasi Manusia.

Pada saat Sidang Umum MPR-RI tahun 1999, saya menyambut baik ajakan seorang Anggota MPR-RI untuk membagikan buku "Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, Membongkar KKN Keluarga Besar Habibie," karya George J. Aditjondro kepada seluruh Anggota MPR-RI. Entah dari mana 700 buah buku itu, tetapi pada akhirnya pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak, dan jabatan Presiden RI periode 1999 - 2004 adalah Abdurrahman Wahid. Saya sering berpikir, seandainya pada hari Jumat, 13 Nopember 1998, Presiden B.J. Habibie yang juga sebagai Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan instruksi: "jangan tembak mahasiswa," saya yakin tidak akan terjadi pertumpahan darah.

Hari Jumat pertama bulan Mei 1999 saya mengikuti misa perayaan Paskah karyawan karyawan kawasannya Slipi yang dipimpin oleh Romo Sandy di gereja Salvator, Jl. K.S. Tubun, Jakarta Barat. Saat bertemu, saya sampaikan bahwa saya mengikuti demonstrasi aksi damai di bundaran Hotel Indonesia. Romo Sandy menjawab, "Ya, nanti ikut Ibu Karlina saja," Tidak lama kemudian Sekretaris Umum TRuK dijabat oleh Ibu Dr. Karlina L. Supeli.

Berita demonstrasi aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia itu saya baca dalam harian Kompas. Aksi damai akan diadakan setiap hari Jumat oleh aktivis perempuan dan diselenggarakan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Saya menghubungi Kalyanamitra untuk mencari kawan. Di sekitar Bundaran HI banyak polisi lengkap dengan senjata, tameng dan pentungan, panser, dan truk tronton. Saya diperkenalkan dengan Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ibu Lies Markus, dan para aktivis lainnya. Acaranya adalah pembacaan statement, berjalan perlahan-lahan mengelilingi Bundaran HI dengan membawa spanduk dan poster sambil menyanyi. Saya berkerudung agar tidak dikenal, dan sambil menangis mengikuti rangkaian acaranya.

Pada hari Jumat berikutnya saya ditugasi membacakan statement untuk solidaritas masyarakat Timor Timur yang sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatannya, karena militer Indonesia sangat dahsyat melakukan tindak kejahatan kemanusiaan. Pada kesempatan itu, Anton dari TRuK memberitahukan bahwa hari Sabtu akan ada pertemuan korban dan keluarga korban Mei 98 di Wisma SJ Depok. Kalau mau, Ibu boleh datang.

Saya datang bersama Mas Arief menghadiri acara pertemuan itu, dan Irma menyusul setelah selesai kuliah di kampus UI Depok. Pertemuan dipandu oleh Ibu Ita dan Bang Tigor. Kami berkumpul tanpa membedakan pribumi dan non

pribumi, sharing dengan cucuran air mata menceritakan derita yang dialami. Banyak yang hanya memegang mikrofon tanpa ada sepele katapun bisa keluar dari mulutnya. Saya juga menangis. Kemudian dalam pertemuan itu disepakati untuk memperingati setahun peristiwa 13 -14 Mei Berdarah 1998.

Rapat-rapat selanjutnya diadakan di Kantor TRuK di Jl. Arus Dalam, Jakarta Timur. Dalam rapat, diputuskan untuk melakukan unjuk rasa ke Istana menemui Presiden B.J. Habibie untuk menuntut tanggung jawab peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Semanggi Berdarah 13 Nopember 1998, dilanjutkan tabur bunga di depan kampus Atmajaya. Acara peringatan itu di dukung oleh berbagai lapisan masyarakat, tetapi TNI/Polri yang ditugaskan dan peralatan perangnya juga tidak kalah banyak.

Pada umumnya keluarga korban membawa foto-foto keluarganya yang meninggal sambil menangis. Saya tidak membawa foto Wawan, saya kasihan dan tidak tega memandang wajah Wawan. Ketika rombongan baru bergerak beberapa meter dari lapangan Monas menuju ke istana, sudah dihadang barikade polisi berlapis-lapis dengan membawa tameng dan pentungan. Tiba-tiba aparat militer memasang garis polisi dan rombongan dilarang mendekati Istana Merdeka. Saya sangat sedih, takut, dan marah, karena keluarga korban yang sudah tidak berdaya harus berhadapan dengan orang-orang yang kekar, sangar, dan tampak beringas. Kami keluarga korban adalah orang-orang rendahan yang tidak layak diterima para penguasa. Setelah bernegosiasi dengan alot, akhirnya kami melakukan *long march* ke Atma Jaya untuk doa dan tabur bunga. Romo Sandy, Ibu Gedong Oka, Ibu Karlina, Bapak Permadi, SH ikut berjalan kaki. Doa dipimpin oleh 5 orang pemuka agama.

Sebelumnya, saya dan Mas Arief diminta TRuK untuk menemui korban dan keluarga korban Tiong Hoa di daerah Cengkareng. Agak lama kita berdiskusi karena mereka masih menderita trauma, kemudian saya menyarankan agar untuk unjuk rasa pada tanggal 14 Mei nanti mengenakan pakaian warna gelap, boleh hitam atau cokelat agar warna kulit Bapak-bapak dan Ibu-ibu kelihatan seperti warna kulit saya, dan ternyata mereka banyak yang datang.

Dalam sebuah rapat evaluasi acara tersebut, disepakati perlu adanya pertemuan rutin untuk membangun semangat dan harapan hidup yang telah hilang. Guna mewedahi banyaknya korban kekerasan politik, kemudian dibentuk Paguyuban Korban/Keluarga Korban Tragedi Mei Berdarah 1998, Korban/Keluarga Korban Tragedi Semanggi Berdarah 13 Nopember 1998 dan TRuK. Kegiatannya adalah menuntut keadilan, advokasi keluarga korban yang masih trauma, mendirikan koperasi, arisan dan pengajian. Saya dan Mas Arief mencari beberapa keluarga korban yang belum bergabung dalam paguyuban sesuai dalam data TRuK.

Bentrok fisik terjadi di depan kantor Pomdam Jaya, ketika keluarga korban ingin menjumpai Komandan Pomdam Jaya. Menurut informasi, semula akan diterima Komandan, tetapi ternyata yang menerima adalah Kabag Sidik yaitu Bapak Kol. CPM.Ir. Wempy Happan. Oleh karena itu kami keluarga korban akan

menunggu sampai bisa diterima Komandan Pomdam Jaya. Selanjutnya kami minta izin untuk menunggu di aula tapi tidak diperbolehkan, kemudian minta izin untuk menunggu di halaman atau dipinggiran gedung agar bisa berteduh, juga tidak boleh. Kemudian kami diusir dan pintu pagar digembok. Keluarga korban melakukan orasi di pinggir jalan dengan dijaga oleh polisi dan disiapkan 2 truk tronton.

Ketegangan terjadi ketika ada provokator yang masuk ke dalam rombongan keluarga korban, menekan dan mengancam koordinator lapangan agar segera membubarkan diri. Kemudian provokator itu dikroyok, tetapi tiba-tiba pintu gerbang Pomdam Jaya dibuka dan provokator diselamatkan oleh Pomdam Jaya dari amukan massa, ia dilindungi oleh prajurit yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang. Tidak timbul korban, tetapi ada seorang Bapak yang pingsan pada saat timbul aksi provokator itu. Baru sekitar jam 17.15 beberapa perwakilan keluarga saja yang diterima Komandan Pomdam Jaya, Kolonel Mungkono, dan memberikan keterangan standard, bahwa saksi untuk kasus Semanggi sudah cukup, dan Pomdam tetap melakukan penyidikan.

Bentrok fisik juga terjadi di depan Pasar Sarinah Jl. MH. Thamrin, ketika rombongan ingin menuju Dephankam Pangab. Kami dihadang dengan barikade polisi bertameng dengan membawa pentungan. Kemudian satu persatu kami melakukan orasi. Ketika terdengar bunyi tembakan beruntun, saya terbangong-bengong mengapa barikade rapat pasukan polisi itu tiba-tiba buyar. Saya menoleh ke belakang melihat semua orang berlai-lari, dan saya menyaksikan pukulan polisi-polisi muda usia dengan sekuat tenaga mendarat ditubuh anak-anak TRuK yang mempertahankan kunci mobil komando yang akan direbut oleh aparat polisi.

Di sebelah kanan mobil, saya selipkan telapak tangan dipinggang anak yang sedang pegang stir mobil, dengan teriakan "Ini tangan Ibu, ini tangan Ibu" tiba-tiba ia bisa lepas dari kroyokan polisi. Kemudian pindah ke sebelah kiri mobil, saya tarik telinga polisi sambil berteriak, "Hei, ini manusia! Ini manusia! Hei, kita sama-sama manusia!" sambil kembali saya selipkan telapak tangan di tengah-tengah himpitan keroyokan polisi hingga menggapai dipinggangnya, juga dengan teriakan "Ini tangan Ibu, ini tangan Ibu ..." tiba-tiba ia bisa lepas dari kroyokan polisi lagi. Bapak-bapak dan Ibu-ibu keluarga korban dikejar-kejar, ditendang, dipukuli sehingga ada yang kesleo, patah tulang, dan babak belur di tubuhnya.

Kemudian dari jauh saya melihat Bang Tigor, koordinator lapangan, dikeroyok dan dipukuli, saya menjemputnya dan saya rebut dengan telapak tangan untuk menggapai pinggangnya, tiba-tiba pula beberapa polisi itu pergi entah ke mana. Saya dan mbak Titiek, sekretaris Romo Sandy, memapah Bang Tigor yang kemudian roboh di tengah jalan aspal yang panas. Mbak Titiek lari entah kemana, kemudian Bang Tigor rebah di pangkuan saya, dan saya berteriak: "Tolong, tolong! Taksi, taksi!". Bang Tigor bersuara lirih, "Bu, saya kena" tetapi saya tidak tahu kalau dia ditembak.

John, salah seorang yang saya selamatkan, mendapatkan taksi blue bird, dan kami seret Bang Tigor ke dalam taksi, tetapi saya dihalang-halangi masuk ke dalam taksi. Polisi gemuk setengah tua berkali-kali memberi perintah, “Tangkap dia! Amankan dia! Bawa ke Polda!”. Saya marah dengan berteriak sambil mengeluarkan KTP, “Saya jangan ditangkap sekarang, kalau memang diperlukan saya akan datang ke Polda, ini KTP saya!”

Saya bisa masuk ke dalam taksi tetapi ditarik-tarik polisi. Kemudi mobil sudah dipegang intel, sopir taksi dipaksa keluar, dan saya sudah kehabisan tenaga. Saya hanya bertahan dengan memegang dashboard, tapi tiba-tiba seorang wartawan ada di samping saya dengan kaki diangkat untuk menghalangi saya, dengan berteriak: “Ini Ibu korban, kasihan jangan ditangkap. Ini Ibu korban, jangan ditangkap!” Tiba-tiba pula sopir taksi sudah kembali di samping saya, dan wartawan itu memberi aba-aba, “Ayo jalan cepat, kita dibuntuti polisi, ambil kanan, ambil kiri, lampu merah jalan terus.” Akhirnya tiba di RS St Carolus. Sopir taksi diberi kartu nama, dan besok agar ke kantor TRuK untuk dibayar ongkosnya.

Punggung Bang Tigor bersimbah darah, saya menangis dan baru tahu kalau ia ditembak. Wartawan itu berkata: “Ibu silahkan pergi entah ke mana, karena kita dalam kondisi tidak aman, biar saya yang mengurus Bang Tigor.” Saya ke TRuK bersama John yang memangku Bang Tigor didalam taksi. Romo Sandy menugaskan anak TRuK untuk mencari Mas Arief agar segera ke RS Sint Carolus dan jangan setir mobil sendiri. Banyak orang mengira saya yang tertembak. Mas Arief menyusul saya ke TRuK, kemudian kami ke RS Sint Carolus dan tiba disana sudah malam. Mahasiswa yang ikut demonstrasi menunggu operasi selesai, sambil duduk-duduk di halaman rumah sakit. Di tubuh Bang Tigor bersarang dua buah peluru karet.

Perjuangan Paguyuban Korban/Keluarga Korban Tragedi Mei 1998, Korban/Keluarga Korban Semanggi I, Korban/Keluarga Korban Semanggi II dan TRuK untuk menuntut keadilan selalu kandas. Kemudian dicoba dengan system terpisah tetapi tetap dilakukan secara simultan.

Pertemuan saya dengan Bapak Agustin Teras Narang, S.H., Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, membuka hati beliau untuk mengangkat kasus Semanggi dan Trisakti. Beliau minta bahan-bahan yang saya miliki, dan agar diantar ke Kantor DPP PDI Perjuangan, di Jl. Lenteng Agung, Jakarta Selatan untuk bahan rapat DPP. Tidak lama kemudian Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI memperjuangkan di dalam rapat Bamus agar peristiwa Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti ditangani. Selanjutnya, DPR-RI membentuk Panitia Khusus tentang Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Saya dan Mas Arief dengan tekun mengikuti sidang-sidang pansus. Selesai rapat Pansus, bersama para mahasiswa yang tergabung dalam AKKRA (Aliansi Keluarga Korban Kekerasan Negara), berkumpul di ruang kerja saya, di Gedung Nusantara I lantai XII Ruang 1225, menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk dibagikan kepada para Anggota Pansus agar dikembangkan dalam pembahasan



rapat berikutnya. Mas Arief membuat tabel kehadiran anggota pansus yang setiap hari hanya dihadiri dibawah 25 %. Tabel itu menjadi heboh di media massa, karena menjadi ukuran penilaian kinerja Anggota DPR-RI secara keseluruhan.

Dalam rapat Pansus DPR-RI, mengenai kasus Trisakti, antara kubu TNI dan kubu Polri saling menuding siapa yang lebih bertanggung jawab. Dua belah pihak saling menantang berani diklarifikasi di depan pansus, tetapi itu tidak pernah terjadi. Mengenai kasus Semanggi I, terungkap bahwa Polri tidak melakukan penyidikan karena Pomdam Jaya telah melakukan penyidikan. Tetapi Pomdam Jaya mengakui bahwa penyidikan itu tidak pernah dilakukannya. Mengenai kasus Semanggi II, penyelidikan Polri menemukan penembak Yan Yun Hap, adalah Prada Tuaputi dari kesatuan Kostrad. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR-RI, Komnas HAM secara lisan dan tertulis menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II terjadi unsur pelanggaran HAM berat.

Pengambilan keputusan Pansus mengalami *deadlock*, kemudian dilakukan voting. Jumlah anggota Pansus ada 50 orang, dalam lembar absent ada 26 tanda tangan, tetapi secara fisik hanya ada 19 orang dengan suara 5 orang menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ada pelanggaran berat HAM dan 14 orang lainnya menyatakan tidak.

Pada hari Senin, 9 Juli 2001 Ketua Pansus melaporkan pembahasan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dalam sidang Paripurna DPR-RI. Dalam pembukaan diumumkan bahwa sidang dihadiri oleh keluarga korban. Ketua Pansus melaporkan, 2 fraksi yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (FPDKB) memutuskan bahwa ketiga kasus tersebut terjadi pelanggaran berat HAM, kemudian fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memutuskan diselesaikan melalui rekonsiliasi, sedangkan tujuh fraksi lainnya yaitu fraksi Golkar, fraksi TNI/Polri, fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi Reformasi, fraksi Daulatul Umah (FPDU), fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) dan fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI) menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak ada pelanggaran berat HAM, dan merekomendasikan untuk diselesaikan melalui pengadilan militer yang sedang dan akan berjalan.

Bapak Firman Djaja Daeli dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan interupsi, dan menyatakan bahwa voting dalam rapat Pansus tidak ada dalam peraturan Tata Tertib Dewan, maka beliau mengusulkan agar voting dilakukan dalam sidang paripurna. Interupsi tidak digubris, Pimpinan sidang yaitu Soetardjo Soerjogoeritno langsung ketok palu diiringi gemuruh sorak sorai para anggota DPR-RI. Laporan hasil kerja Pansus DPR-RI itulah yang kemudian dikenal dengan "Rekomendasi DPR-RI" tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Hati saya menjadi tersinggung, dan saya melemparkan 3 butir telur dari 7 butir yang sudah saya siapkan dari rumah, di mana sebenarnya Romo Sandy

melarang dan menghalanginya. Telor itu saya lempar ke arah tempat duduk anggota Fraksi TNI/Polri, ke arah Pimpinan sidang dan ke arah Fraksi Partai Golkar. Untuk mengantisipasi pemeriksaan petugas, 7 butir telor itu saya masukkan ke dalam bok kue ditutup dengan kue pisang dan kue unti. Semula Mas Arief tidak tahu, kalau saya jadi membawa telor. Sebelumnya dia mengingatkan, bahwa peristiwa penahanan mahasiswa ITB itu disebabkan karena mahasiswa melemparkan telor ke arah Mendagri Bapak Rudini. Tetapi akhirnya Mas Arief melempar 1 butir untuk melampiaskan kekesalannya terhadap para Anggota DPR-RI.

Setelah peristiwa pelemparan telor, ada beberapa Anggota DPR-RI yang menemui saya untuk memberikan dukungan perjuangan kami keluarga korban, tetapi ada pula yang mengusulkan kepada Pimpinan Fraksi Partai Golkar agar saya diberikan sanksi. Sejak saat itu pula, saya melakukan kampanye secara kecil-kecilan di pasar, di kantor, di kendaraan umum dan di mana saja saya berada, agar tahun 2004 jangan memilih partai-partai yang sekarang anggotanya duduk di DPR-RI.

Upaya hukum masih dilakukan. Pada hari Selasa, 4 September 2001 didampingi KontraS dan TRuK audiensi ke Mahkamah Agung, diterima oleh beberapa Hakim Agung: M. Taufik Wakil Ketua Mahkamah Agung, Laica Marzuki Hakim Agung, Said Harahap anggota Pokja HAM, Abdurahman Saleh, Mugihardjo - Direktur Pidana, dan Girman Hudiardjo - Ketua Muda Urusan Lingkungan Pengadilan Militer. Kesimpulan dalam audiensi itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Rekomendasi DPR-RI atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, karena itu diabaikan saja.

Pada hari Jumat, 13 Juli 2001 keluarga korban didampingi AKKRA, FAM Atmajaya, FPPI, Posko Teknik UI, TRuK, KontraS dan Institut Studi Arus Informasi ke Komnas HAM dengan membawa setangkai bunga sepatu dan sebuah sepatu lars, sebagai lambang cinta dan kekerasan, yang harus dipilih Komnas HAM. Pak Soegiri marah, tetapi Pak Mohammad Salim memilih bunga sepatu. Tidak lama kemudian, Komnas HAM membentuk KPP HAM Trisakti, Semanggi, I dan Semanggi II, namun Surat Keputusan pembentukan KPP tersebut tidak segera ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. Sikap protes dilakukan oleh Dr. Karlina L. Supeli dengan mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Kemudian diikuti oleh Bapak Hermawan Sulisty, yang juga mengundurkan diri.

KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak berhasil memanggil para jenderal yang diduga pelaku pelanggaran HAM. Upaya hukum untuk memanggil secara paksa tidak mendapat tanggapan dari Mabes TNI/POLRI. Berbagai kesulitan yang dihadapi KPP HAM mendapat perhatian oleh berbagai media massa. Ketika saya mendengar siaran radio Jakarta News FM yang memberitakan bahwa KPP HAM didemo dan ditutup untuk dibubarkan, saya menelpon KontraS dan diterima oleh Haris, kemudian diputuskan untuk segera mengadakan rapat dengan keluarga korban dan beberapa mahasiswa. Beberapa alternative aksi diusulkan oleh KontraS. Dalam rapat disepakati

untuk mengunjungi rumah para jenderal yang dipanggil KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Pada hari Senin, 11 Maret 2002, keluarga korban mendatangi rumah Jenderal Wiranto, yang menurut jadwal, ia pada hari itu jam 10.00 dipanggil KPP HAM. Untuk mengantisipasi apabila tidak bertemu para jenderal, maka Mas Arief ditugaskan untuk membuat surat yang berisi maksud dan tujuan kedatangan keluarga korban, dan KontraS yang akan menyiapkan bunga sebagai lambang bahwa kami keluarga korban adalah orang baik-baik.

Di Komnas HAM diterima Bapak Dr. Albert Hasibuan (Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II) didampingi Usman Hamid,SH (Sekretaris KPP HAM). Kami minta KPP HAM menunggu kehadiran Jenderal Wiranto, karena kami akan menjemputnya. Kemudian delegasi berpamitan dengan berjabat tangan satu persatu. Pada saat itu Bapak Dr. Albert Hasibuan berkali-kali berpesan kepada saya, agar berhati-hati karena beliau tahu kondisi di sana. Wartawan yang standby di Komnas HAM mengikuti rombongan delegasi.

Setiba di rumah Jenderal Purn. Wiranto, Haris dari KontraS menekan bell di samping pintu, kemudian ajudannya, bernama Suharlan, membuka pintu gerbang. Dia memberitahukan bahwa Pak Wiranto ke luar kota, padahal ada seorang wartawan yang memberitahukan bahwa pada siang nanti akan mengikuti acara Pak Wiranto di hotel Santika Jakarta. Kemudian Ibu Maria, orangtua Tedy Mardani membacakan surat, Ibu Martini, orangtua Sigit Prasetyo menyerahkan surat, dan saya menyerahkan setangkai bunga. Para wartawan minta agar keluarga korban foto bersama dengan memegang poster, yaitu: saya, Mas Arief, pak Cece Sarweli (orangtua Engkus Kusnaedi) dan ibu Martini. Tiba-tiba datang segerombolan polisi, sebelum ditanya saya memberitahukan: "Pak, kami hanya menyampaikan surat dan sekarang sudah selesai, kami akan segera pulang."

Tiba di KontraS, langsung mengadakan rapat evaluasi dan saya menyarankan kunjungan ke rumah Pak Diby Widodo dan para jenderal lainnya ditunda saja, sambil menunggu perkembangan kunjungan hari ini. Esok harinya ada 2 orang datang ke Kantor KontraS marah-marah dan menuduh KontraS memprovokasi keluarga korban mendatangi rumah Jenderal Wiranto. Kemudian pada hari berikutnya, ada rombongan yang menamakan diri Korban tragedi Cawang Berdarah datang menyerbu Kantor KontraS, kaca-kaca dan komputer hancur berantakan, banyak data dibawa kabur. Meja, kursi pun berantakan. Pak Munir tangan dan mukanya berdarah, Edwin lebih parah dan menjalani operasi di rumah sakit, dan beberapa staf KontraS lainnya juga terkena pukulan. Saya sangat sedih dan menangis mendengar berita di Radio 97.5 Jakarta News FM di siang itu. Saya segera memberitahukan kepada Mas Arief, dan kami bergegas ke KontraS.

Perjalanan tugas anggota KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II banyak menghadapi protes tuntutan untuk dibubarkan, yaitu dari: para Jenderal yang diduga melanggar HAM, Mabes TNI, anggota DPR-RI pro Orde Baru, pakar

hukum pro pelanggaran HAM, gerombolan aktivis yang menamakan diri Gerakan Ekponen Mahasiswa '98, dan milisi yaitu masyarakat sipil yang diperalat oleh militer. Menjelang berakhirnya tugas KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, anggota yang aktif tinggal beberapa orang saja dan bekerja tanpa bantuan dari Asistensi kesekretariatan. Berkas KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan, tetapi berkali-kali berkas itu dikembalikan ke Komnas HAM dan kini menjadi bola panas yang dihindari oleh Kejaksaan Agung. Berkas Komnas HAM mengenai kerusuhan 13-14 Mei juga mengalami nasib yang sama, bolak-balik Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Perjuangan panjang yang tidak berujung itu sempat menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa korban diperalat oleh lembaga swadaya masyarakat dan ada pula yang mengarahkan ke dalam isu agama. Dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada mahasiswa yang menanyakan, "Mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang menyangkut umat Katolik selalu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan juga oleh dunia internasional?"

Mas Arief memberikan jawaban bahwa, "Yang jelas, pemerintah lamban, tidak optimal, bahkan terkesan tak ada kemauan penuh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terangkatnya suatu peristiwa/kasus, siapa pun korbannya, umat Kristen atau Muslim, adalah karena adanya tuntutan kuat dari korban dan keluarga korban. Terangkatnya kasus Tanjung Priok, di mana korbannya adalah saudara-saudara Muslim, juga karena adanya tuntutan atau tekanan kuat dari korban, keluarga korban, dan simpatisannya.

\*\*\*

Penuturan saya yang panjang lebar ini, tidak kurang dan tidak lebih dari keinginan saya mengungkapkan liku-liku perjuangan menuntut kebenaran dan keadilan, yang sampai sekarang masih jauh dari depan mata saya. Perhatian berbagai pihak, datang secara pribadi, termasuk juga dari warga umat Katolik. Sampai seberapa lama perhatian itu mengalir, memang akan bergantung pada daya ingat kolektif masyarakat.

Saya merasa, bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah hal yang wajar bagi setiap orang yang keluarganya dirampas hak hidupnya. Terlebih ketika membaca spanduk "Carilah Kebenaran dan Keadilan" yang terpampang di atas altar Gereja MKK yang dipergunakan untuk tempat misa penutupan Sidang KWI pada tanggal 13 Nopember 2003, saya menjadi terpana karenanya. Saya bersyukur ketika membaca "Surat Gambala Pemilihan Umum 2004 KWI dengan tema: Carilah Kebenaran dan Keadilan." Selanjutnya, kini saya akan selalu menantikan Surat Gambala atau apa pun macamnya, yang selalu mengedepankan soal "kebenaran" dan "keadilan," karena itulah merupakan bagian dari inti pengorbanan Kristus di kayu salib.

Saya senang terhadap Pastor yang dalam kotbahnya tidak terlalu "Kitab Suci Centris", melainkan mau sedikit mengupas masalah-masalah aktual

kemasyarakatan yang berkembang di negeri ini. Sebab, umat sebagai makhluk sosial memerlukan informasi secukupnya agar tidak menjadi asing di negeri sendiri, dan tidak terlalu berorientasi hanya pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dan kini para Pastor muda usia tampak telah merintisnya.

Pada hari Sabtu, 14 Agustus 2004, dalam suatu resepsi di gedung Granadi, ada seorang mendekati saya dan Mas Arief. Dia bercerita: “Saya kawan Wawan, dulu mahasiswa Atma Jaya lebih banyak yang bertugas memberikan pertolongan kepada korban. Pada waktu itu baju kami basah semua. Bona mengajak Wawan: “Ayo Wan, cepetan, *nggak* usah ganti baju”. Wawan bilang: “*Ntar* dulu, gue mau pamitan”. Bona bercanda: “*Emangnya* mau mati apa, pakai pamitan segala?.” Wawan menjawab: “Habis kaya begini.”

Sebelum peristiwa penembakan itu, Wawan sempat menulis beberapa puisi yang kemudian selalu diudarkan oleh Radio Jakarta News FM, yaitu setiap tanggal 13 Nopember untuk memperingati Peristiwa Semanggi I, tanggal 12 Mei untuk memperingati peristiwa Trisakti, dan tanggal 24 September untuk memperingati Peristiwa Semanggi II. Puisi-puisi yang tertulis di akhir lembar bukunya, di antaranya ada yang belum sempat diberi judul.

Apakah aku pejuang atau pahlawan reformasi,  
Aku tak tahu, itu hanya ungkapan orang.  
Aku bosan dilecehkan, ketika aku berkata perjuangan  
Seakan aku seorang pelawak  
Aku bukan pelawak, aku hanya mencoba  
Aku mencoba menuruti hati nurani  
Aku berusaha untuk orang lain  
Aku tak peduli akan balas budi  
Aku hanya bisa berusaha agar semua orang bisa tersenyum  
Aku hanya ingin orang bisa bebas  
Aku hanya ingin mencintai  
Terlalu besar yang aku korbakan, kuliah, jodoh dan kedamaian  
Berkulan-bulan aku dicekam rasa takut, takut disiksa  
Berkulan-bulan aku lari dari hidup normal  
Tapi perjuangan yang hampir selesai musnah  
Reformasi kini hanya kedok para penguasa  
Aku masih ingin berjuang, tapi itu tak mungkin  
Kiri kananku jurang, depan belakanku tembok  
Aku sendiri, haruskah aku lari kelur seperti yang lain?  
Belum, aku masih punya nyawa, dan itu pengorbanan terakhirku  
Aku ingin bebas, aku ingin menjadi manusia biasa  
Tapi itu melawan nurani  
Manusia harus bebas  
Pejabat harus melayani bukan dilayani, menindas, memeras dan menyiksa  
Aku harus menang

**Aku dambakan reformasi dan demokrasi.**

***Wawan***

\*\*\*

Puncak gunung itu masih jauh  
Ia selalu diimpikan untuk diraih

Aku melihat burung yang terbang bebas di angkasa  
Aku hanya bisa tersenyum iri, karena aku terbelenggu  
Aku melihat sepasang merpati asik bercinta  
Aku hanya bisa memalingkan muka, karena aku malu  
Aku mendengar ayam berkokok nyaring  
Aku menutup mata, aku sudah lemah

Aku manusia hina yang hanya bisa meratap  
Aku melihat mimpi dan bermimpi meraihnya  
Aku hidup bagai jagoan yang hina, yang menghilang  
Aku berjuang tanpa peduli nyawa  
Aku bosan lari dari siksa  
Aku bosan hidup dibalik topeng  
Aku benci tirani, aku benci rezim  
Kini aku lelah, terlalu lama aku main  
Aku baru sadar akan bahaya kini  
Aku sadar aku telat  
Aku siap mati demi bangsa dan rakyatku  
Aku siap dikatakan sampah  
Aku siap dihina  
Aku siap untuk dibuang atau dihilangkan

Aku hanya berharap orang tuaku tabah  
Aku berharap semoga perjuanganku tidak sia-sia  
Aku berharap semoga aku masih ada tempat  
Aku kini hanya bisa pasrah  
Kapan pun aku mati, aku sudah siap  
Bagaimana pun caranya, aku sudah siap  
Aku tidak pernah bermimpi dihormati  
Aku hanya bermimpi hidup makmur sejahtera  
Walaupun di alam baka.

***Wawan***

## “Pengadilan Militer Itu Tidak Sah”

Nama saya Ho Kim Ngo, ibunda dari Yun Hap. Anak saya mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Industri, Jurusan Elektro. Dia lahir pada 17 Oktober 1977 di Pangkal Pinang. Inilah cerita saya.

\*\*\*

Pernah waktu itu ada telepon, dari suaranya, penelpon itu seorang perempuan. Dia bilang, “Awat! Jangan macam-macam nanti saya *matiin* kamu”. Itulah yang terjadi *pas* Peringatan Dua Tahun Semanggi I (2000). Sewaktu kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR, saya juga sudah laporkan bahwa saya mengalami teror.

Pernah juga saya juga didatangi petugas dari Pomdam Jaya. Petugas tersebut juga hadir saat rapat Pansus. Hal ini saya laporkan ke Pak Asmara Nababan (Sekjen Komnas HAM, waktu itu). Saat itu, Pak Asmara bertanya, “Katanya didatangi orang dari Pomdam?” Saya jawab, “Iya.” Kemudian petugas tersebut ditunjukknya, “Benar ini orangnya? Ibu jangan takut dia *nggak* apa-apa”. Petugas tersebut, menurut pengakuannya, pertama, mau silaturahmi. Kedua, petugas tersebut menanyakan, “Apakah sewaktu Yun Hap pamitan kuliah ada sakit-sakitan, pusing-pusing, atau kena narkoba?”

\*\*\*

Yun Hap masuk kuliah tahun 1996. Sekitar tahun 1997, dia sudah mulai sering bicara soal penderitaan orang kecil dan rakyat miskin di Indonesia. “Kasih masyarakat kecil berebutan kalau ada mobil antri beras dan gula”, katanya. Dia juga sering ngomong kalau dia *kan* sekolah dibiayai rakyat maka harus berjuang untuk rakyat.

Sebelum tanggal 23 September 1999, Yun Hap sempat *ngomong* kalau tanggal 23-24 akan ada demonstrasi besar-besaran. Seluruh mahasiswa akan keluar menentang UU PKB karena tidak bagus untuk rakyat, merugikan rakyat. Saya masih *ngingetin* kalau semakin hari semakin kacau dan banyak orang tembak sembarangan. Tapi Yun Hap bilang, “*Nggak* bisa, UU PKB harus ditolak karena ini merugikan rakyat”.

\*\*\*

Saat hari-hari terakhir Yun Hap dirumah, dalam suatu pembicaraan, sekitar jam 11 siang, saat Yun Hap sama-sama nonton TV dengan saya, ada tayangan tentang anggota TNI yang ditembak yang dibawa pulang ke Bali. Saya bilang ke Yun Hap, “Tuh, lihat dia (TNI) saja kena (tembak) apalagi kamu nanti bisa kena juga”. Sekitar jam 12 lewat *pas* setelah makan siang dia berangkat, katanya mau ke kampus. Saya sempat bilang, “Kamu jangan ikut lagi, ya”.

Pernah juga dalam sekali waktu, Yun Hap mengatakan, “Ma, kita hidup itu sudah *digarisin* sampai mana kita hidup itu.” Itu dia berkata sewaktu ada saudaranya yang meninggal tertabrak motor. Salah seorang temannya juga

pernah mengatakan bahwa Yun Hap pernah lemas *banget* karena dua hari demo *nggak* pulang-pulang. Temannya pernah tanya, "Hap, kamu *nggak* takut sama peluru?" Dia malah jawab, "Kenapa harus takut sama peluru?"

Pada tanggal 23 September 1999, temannya ada yang menelepon dari UI. Temannya ini menanyakan, "Yun Hap sudah pulang belum?" Temannya ini mengingatkan agar hati-hati karena ada *sweeping*. Malam itu Yun Hap, bilang kalau dia ikut demo dan terjebak *nggak* bisa pulang, dia sempat menelepon sekitar jam 09.00 malam, "Saya *nggak* bisa pulang dimana-mana sudah ada *tekap* (baca: intel), saya nginap di Atmajaya. *Nggak* bisa pulang". Temannya juga ada yang bicara, pada tanggal 23, saat mau keluar dari UI dia ngomong "kalau saya meninggal nama saya dibikin nama jalan bagus barang kali".

Besok harinya tanggal 24, sekitar jam 09.00 barulah Yun Hap pulang, lalu dia mandi. Di rumah, waktu tanggal 24 pulang itu dia duduk, mondar-mandir, buka komputer, baring, bangun. Jam 11.00, Yun Hap lihat berita di TV, setelah itu dia masuk dan sekitar jam 12.00 dia keluar bawa tas. Saya tanya "Hap mau kemana? Dia jawab, "Ke kampus." Saya pesan, "Jangan ikut demo lagi ya". Terus dia jalan.

Pada hari itu kita *nungguin* terus di rumah karena dia *nggak* pulang-pulang. Sekitar jam 12 malam baru dapat telepon dari temannya. Teman tersebut menyampaikan bahwa Yun Hap dia sudah meninggal. Setelah itu temannya datang menjemput kita (keluarga) menuju ke RSCM. Di RSCM sudah ramai, banyak orang. Bahkan masih ada bunyi tembakan, saat itu sekitar jam 2.00 pagi. Malam itu juga *Cak Munir* datang.

Saat saya ke RSCM, Yun Hap sudah meninggal. Di RSCM, kami keluarga disuruh menandatangani surat otopsi. Saya baru lihat (jenazahnya) Yun Hap saat mau ditempatkan dipeti mati. Tetapi, saat itu adiknya menolak karena pada Sabtu pagi akan disembahyangkan dahulu di Salemba dan dibawa ke rumah duka "Abadi".

Saya dapat berita bahwa yang menolong Yun Hap seorang mahasiswa Trisakti, yang juga berada di tempat kejadian saat Yun Hap ditembak. Mahasiswa Trisakti tersebut yang menolong Yun Hap dan membawanya ke RS Jakarta. Tapi, sayangnya, saya dapat kabar, bahwa dokter di RS Jakarta saat itu tidak mau menerima Yun Hap.

Salah seorang temannya, menceritakan, bahwa saat itu ia bersama Yun Hap, tetapi ia meninggalkan Yun Hap sesaat karena ingin mencari teman yang lain. Tetapi saat kembali, Yun Hap sudah tidak ada lagi, diketahui kemudian, Yun Hap sudah ada di RSCM.

\*\*\*

Setelah kejadian itu saya ketemu ibunya wawan dan dibawa ke TRK. Anak-anak mahasiswa juga langsung datang melaporkan ke *Cak Munir*. Dalam



Kegiatan mahasiswa kita, keluarga korban, juga sering diajak, misalnya pas aksi, juga diajak ke UI saat pemasangan papan nama.

Harapan saya setidaknya-tidaknya kasus Semanggi II terungkap, supaya Yun Hap tidak mati sia-sia seperti binatang. Saya sangat kesal dengan Jaksa Agung yang baru (Abdul Rahman Saleh) yang katanya kasus Trisakti-Semanggi sudah selesai disidang dan hal itu sesuai mekanisme. Saya merasa kesal *banget* dengan pernyataan itu. Walaupun sudah disidangan di Peradilan militer, tapi para korban *kan* punya orang tua, sudah seharusnya ibu-bapaknya dipanggil. Kenyataannya, kita sebagai orang tua tidak tahu apa-apa waktu disidang. Aneh, orang tua korban tidak dilibatkan dan tidak dikasih tahu apa-apa.

Menurut saya pengadilan militer yang dilakukan pemerintah itu tidak sah. Melalui pengadilan Militer sebenarnya yang dihukum itu hanya petugas lapangan, padahal tindakan mereka ada yang perintahkan. Mereka *kan* tahu konsekwensinya kalau menembak orang itu, dan saya yakin pasti ada yang suruh. Pengadilan yang digelar itu sama sekali tidak ada rasa keadilannya.

Selama pergantian pemerintah sampai saat ini tidak ada yang komitmen untuk menegakkan keadilan ini. Dari Habibie, Gus Dur, Megawati tidak ada sedikitpun yang serius untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam pemerintahan SBY ini saya juga pesimis dia akan menyelesaikan kasus ini.

\*\*\*

Setelah almarhum pergi, semakin hari semakin jauh. Kalau dulu masih ada teman-temannya yang datang main kerumah, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi makin terasa jauh dengan Yun Hap dan merasa makin kehilangan.

Yun hap meninggal itu umur 22. sewaktu ada kerusuhan 1998 kita sekeluarga pulang kampung dan meninggalkan duit ke Yun Hap. Dia bilang kalau duit itu mau dipakai buat beli komputer buat bikin skripsi. Dan kalau sudah kerja, duit tersebut akan dikembalikan. Dan saya hanya bilang terserah kamu.

Sebenarnya Yun hap itu harapan bapaknya. Bapaknya sangat berharap besar dengan Yun Hap karena bapaknya sekolah hanya sampai kelas 3 SD dan tidak diurus keluarganya, tidak seperti anak sekarang. Cita-cita bapaknya adalah kelak Yun Hap dapat bekerja.

Sebelum meninggal saja Yun Hap minta dibelikan buku, oleh karena itu bapaknya kerja cari sampingan/pendapatan tambahan sampai sore. Kata Yun Hap, buku itu penting untuk buat skripsi. Setelah dapat *lebihan* bapaknya langsung kasih ke Yun hap. Waktu itu bapaknya juga bilang sama Yun Hap kalau mau kuliah di UI saja yang cukup murah dibanding universitas swasta yang lain. Maka dari itu Yun Hap belajar rajin sekali biar bisa masuk UI.

## Perjuangan Melawan Lupa

Albert Yosua Bonasahat<sup>3</sup>

Emosi yang dulu ada ketika menyaksikan peristiwa melalui layar kaca berangsur hilang ditelan emosi atas kondisi lain yang juga seakan berpacu menekan masyarakat.

\*\*\*

*Mereka yang melupakan sejarah  
akan dikutuk untuk melakukan kesalahan yang sama.  
(George Santayana, filsuf, 16 Desember 1863-26 September 1952)*

Anda masih ingat Tragedi Semanggi I, 13 November 1998? Beberapa kawan yang kebetulan menyaksikan melalui layar kaca adegan kekerasan yang terjadi di seputar kawasan Semanggi, Universitas Atma Jaya, Jakarta, berkisah bahwa mereka seakan tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Sebuah tayangan langsung kekerasan sedang terjadi dekat dengan mereka! Saat itu, salah satu TV swasta di Jakarta meliputnya secara penuh, gamblang, dan langsung kebrutalan militer dalam menindas aksi damai mahasiswa (AJI News, 17/11/1998).

Terasa sekali bahwa saat itu masyarakat marah dan bersedih bersama para keluarga korban. Namun, tujuh tahun setelah tragedi tersebut berlalu tampaknya ingatan sebagian masyarakat akan tragedi tersebut luruh. Emosi yang dulu ada ketika menyaksikan peristiwa melalui layar kaca berangsur hilang ditelan emosi atas kondisi lain yang juga seakan berpacu menekan masyarakat.

Kondisi "natural" pelupaan ini sebenarnya juga dipercepat oleh mekanisme pelupaan atau penyangkalan terstruktur dari pemerintah atas sebuah (atau berbagai) peristiwa represi yang pernah terjadi sebelumnya. Stanley Cohen dalam bukunya, *Denial: Knowing about Atrocities and Suffering* (2001), mencatat, paling tidak ada sepuluh model penyangkalan terorganisasi (*state-organized denial*) negara atas sebuah peristiwa kejahatan atas kemanusiaan.

Dua di antaranya dengan cara mengulur-ulur waktu pengungkapan serta dengan meminta kesediaan masyarakat untuk melupakan tragedi yang terjadi, membiarkan luka lama menutup dan mengering. Mengapa harus membangkitkan luka lama? Demikian biasanya apologi yang disampaikan.

Nasib Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang selesai sejak Maret 2002 satu bukti konkret atas salah satu model penyangkalan terorganisasi negara. Sejak awal,

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Utrecht, Belanda

jelas terlihat adanya kehendak untuk mengulur waktu pengungkapan tragedi melalui jalur hukum.

Berbagai alasan dikemukakan, mulai dipersoalkannya ketiadaan sumpah jabatan bagi para anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, laporan yang dianggap banyak kekurangan, sampai alasan terbaru yang digunakan Kejaksaan Agung, yaitu bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan II sudah "dibebaskan" dari tuntutan setelah pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc (sebagaimana rekomendasi Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II), berkat rekomendasi politik yang dikeluarkan oleh DPR periode 1999-2004.

Ajakan untuk melupakan masa lalu pun gencar disampaikan para elite politik. Dalam konteks pelanggaran HAM secara keseluruhan, mantan Panglima TNI Wiranto, yang berkali-kali menolak diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, pada satu kesempatan kampanye calon presiden di dalam pemilu presiden 2004 pernah menyerukan perlunya sikap untuk tidak terjebak pada masa lalu (Kompas, 14 Mei 2004).

Atau misalnya dalam konteks eks Timor Timur, Wakil KSAD Kiki Syahnakrie berujar tentang perlunya "menatap ke depan daripada ke belakang" (Kompas, 3 Mei 2002). Bukan tidak mungkin, besok atau lusa, seiring dengan makin lamanya rentang waktu antara peristiwa Tragedi Trisakti-Semanggi dan kekinian kita, akan ada muncul pernyataan elite politik kita yang secara khusus mengajak melupakan Tragedi Trisakti-Semanggi.

\*\*\*

Sebuah luka yang mengering memang mengindikasikan luka yang telah sembuh. Mengoreknya kembali sama saja dengan mengembalikan rasa sakit dan penderitaan. Namun, dalam konteks apology para elite politik untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu, "agar tidak membuka luka lama", satu pertanyaan mendasar sebenarnya perlu dijawab terlebih dulu: siapa dapat mengatakan bahwa "luka" itu memang telah sembuh dan mengering?

Kematian empat mahasiswa Trisakti dalam Tragedi Trisakti (Mei 1998), kematian puluhan mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya dalam Tragedi Semanggi I serta kematian Yun Hap dalam Tragedi Semanggi II (September 1999), yang diikuti dengan begitu banyak korban luka lainnya, jelas tidak layak untuk didiamkan, dilupakan, dalam apology demi masa depan bangsa.

Sebuah Pengadilan HAM Ad Hoc atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II justru diharapkan dapat menjadi penutup luka bangsa ini, terutama bagi para keluarga korban. Keseluruhan penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan itu sendiri menjadi penting artinya bagi kesembuhan salah satu luka bangsa ini. Bukan sekadar untuk menghukum atau mengutuk peristiwa biadab tersebut, tapi lebih dari itu, untuk belajar dari wajah buruk masa lalu kita.

\*\*\*

Mungkin perih, mungkin pedih, ketika luka itu "disembuhkan", tapi bukankah rasa pedih, perih ketika sang Dewi Keadilan menebaskan pedang keadilannya dengan mata tertutup, adalah sebuah proses yang memang layak dan harus kita lalui. Maksudnya, agar darah tak perlu lagi tumpah ketika rakyat berhadapan dengan kekuasaan negara, dan agar tangis tak perlu lagi terdengar dari para ibu yang kehilangan anak-anak mereka.

**Selasa, 15 November 2005**

## Pesimis Ketika Merenung, Optimis Ketika Melangkah Arief Priyadi<sup>4</sup>

Peristiwa Semanggi I terjadi pada hari Jum'at, 13 Nopember 1998, sore, petang dan malam. Beberapa mahasiswa dan sejumlah warga sipil lainnya gugur dalam peristiwa itu. Para mahasiswa yang gugur adalah: *B.R. Norma Irmawan (Wawan)*, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta; *Sigit Prasetyo*, mahasiswa Yayasan Administrasi Indonesia (YAI); *Teddy Mardani*, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong; *Engkus Kusnaedi*, mahasiswa Universitas Jakarta (Unija); dan *Heru Sudibyo*, mahasiswa Universitas Terbuka.

*“Lho, ini Pangabnya gaimana? - tuli, budheg, buta, atau begok?,  
Atau ini jangan-jangan perintahnya?, Sudah jatuh korban  
kok dibiarkan sampai berjam-jam?, Berapa  
orang lagi yang mau ditembak? ...”*

Begitulah gumam atau makian saya teralamatkan ke Pangab pada petang hari tanggal 13 Nopember 1998. Makian itu keluar karena pada siang harinya sudah beredar berita bahwa ada himbauan dari Wiranto agar kantor-kantor segera memulangkan karyawannya sebab akan ada demo besar-besaran dan akan ada tembakan bebas. Siang hari ketika saya ke BRI, saya melihat nasabah-nasabah lainnya kelihatan gelisah, tak seperti biasanya. Ternyata karena mereka mendengar berita itu. Maka seperti nasabah yang lain, saya ikut-ikutan membatalkan urusan, cepat-cepat meninggalkan BRI dan kembali ke kantor. Sampai di kantor ternyata teman-teman sudah banyak yang pulang, juga karena mendengar berita yang sama.

Keadaan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998 petang menjelang maghrib, tepatnya di depan Kampus Universitas Katolik Atma Jaya, betul-betul mengerikan.

Pada waktu itu kami (saya, istri dan adik) dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Jakarta untuk mengambil Wawan, dan mengalami kesulitan ketika mau membelok ke arah Rumah Sakit. Saya melihat dengan mata kepala keadaan yang sungguh-sungguh hiruk-pikuk, jerit, teriakan histeris dan umpatan terhadap aparat bersenjata terdengar di sana-sini.

Dari dalam mobil yang kami tumpangi, kami melihat tembakan gas air mata berseliweran warna-warni mirip pelangi melintas di atas Jalan Sudirman, semprotan air dari *water canon* ke arah massa, senjata api menyalak dan memberondong. Sejumlah tank, panser, truk berbemper kawat berduri melaju dari arah Hotel Hilton dengan beringasnya merangsek massa di Jalan Jenderal Sudirman kawasan Semanggi, dan mendesaknya ke arah utara. Massa tampak

---

<sup>4</sup> Orangtua dari B.R. Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Semester 5, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, korban Peristiwa Semanggi I. Saat ini bekerja di CSIS.

panik, dan banyak gerobak pedagang dan kendaraan berebut untuk berbalik arah ke utara.

*“... kebrutalan aparat bersenjata di Semanggi sepuluh kali lipat dibandingkan dengan peristiwa di Trisakti. Betul-betul biadab.”*

Itulah sepotong cerita atau kesaksian dari seorang bule, wartawan Televisi Belanda, yang diturkannya kepada kami ketika dia datang ke rumah bersama crew-nya pada tanggal 15 Nopember 1998 siang. Dia bercerita dengan penuh empati terhadap kami. Kesaksian seorang bule ini sangat kontradiksi dengan penjelasan pejabat militer dan kepolisian yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu ketika dimintai keterangan oleh Pansus DPR tentang Kasus Trisakti dan Semanggi I-II dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan aparat keamanan pada waktu terjadi peristiwa Semanggi sudah serba sesuai dengan protap (prosedur tetap). Saya menjadi bertanya-tanya, apakah penggunaan peluru tajam dalam menghadapi warga sipil yang tak bersenjata, menurut protap juga harus menggunakan peluru tajam?

*“Kamu jangan provokasi mahasiswa, jangan harap kasus Semanggi bisa diungkap, itu sudah jadi garis Mabas ABRI, telepon dan alamat kamu ada di tangan saya, korban penculikan tidak terbatas termasuk kamu.”*

Kata-kata itu terlontar dengan nada keras, gertak, kaku dan *to the point* dari seorang penelpon. Saya hanya menjawabnya singkat: *“Maaf, Anda salah sambung.”* Telepon itu saya terima sehari setelah saya diminta berbicara pada waktu deklarasi berdirinya SMUKS (Solidaritas Mahasiswa Untuk Kasus Semanggi), 13 April 1999, di Aula Sekolah Tinggi Teologia Jakarta (STTJ), Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat.

*“Bapak dan Ibu jangan terlalu banyak berharap bahwa kasus Semanggi yang baru saja terjadi bisa segera terungkap. Sebab, peristiwa penembakan terhadap Presiden John F. Kennedy yang terjadi pada tahun 1960an, di negara besar Amerika Serikat yang memiliki peralatan serba canggih pun, sampai sekarang juga belum bisa terungkap tuntas.”*

Kata-kata yang bernuansa mengedepankan semangat *“esprit de corps,”* atau melindungi sesama anggota korp/kelompok ini terlontar dari salah seorang anggota Fraksi ABRI DPR-RI pada waktu menerima Keluarga Korban Peristiwa Semanggi dalam sebuah audiensi tanggal 4 Maret 1999.

*“Pak, mungkin lebih baik kasus ini, kasus Semanggi, kita bicarakan saja secara baik-baik. Soal tempat kita bisa mengambil di hotel mana. Hal begini sudah kita lakukan pada kasus Trisakti.”*

Kata-kata bernada tawaran ini pernah terlontar dari seorang perwira di Pomdam Jaya pada 29 Juli 1999, yaitu ketika Keluarga Korban yang didampingi mahasiswa ingin beraudiensi dengan Danpomdam Jaya. Tawaran ini tidak sayaanggapi.

*“Tolong sampaikan Pak Panda, Pak Wiranto jangan disudutkan. Dia itu Jenderal bersih, Jenderal ompong, dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Kalau mau disudutkan, itu Prabowo dan Safrie.”*

Sebuah pesan yang tidak etis ini sampai ke telinga saya oleh dua orang yang berbeda, pada hari yang berbeda. Pesan ini terlontar pada waktu Pansus DPR untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I-II yang diketuai Panda Nababan sedang gencar-gencarnya menggelar RDPU. Pesan ini tidak sayaanggapi, dan saya hanya tersenyum kecut.

Beberapa *event* tersebut, terlepas dari benar-tidaknya isi pesan, membuat saya tidak heran ketika para perwira yang diduga terlibat dan bertanggungjawab terhadap kasus Trisakti dan Semanggi berusaha menghindari dari proses peradilan. Demikian pula ketika Mabes TNI melalui Babinkumnya memanfaatkan celah hukum untuk menolak pemanggilan oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM terhadap sejumlah perwira untuk dimintai keterangan. Dari itu semua saya memperoleh kesan bahwa hal itu merupakan bagian dari sebuah skenario mewujudkan impunitas.

### **Dalam Ketidakpastian**

Geliat kami untuk menuntut keadilan berawal dari keinginan mengetahui *visum et repertum* atas nama Wawan. Otopsi dilakukan oleh dokter Budi Sampurna, dokter forensik RSUP Cipto Mangunkusumo. Juga didorong oleh keinginan mengetahui keberadaan peluru yang mengenai Wawan. Oleh dokter Budi kami disarankan minta fotocopy *visum* ke Pomdam Jaya, dan menurutnya pihak keluarga korban boleh memiliki fotocopynya. Saran itu kami lakukan pada awal Februari 1999. Ternyata keinginan tersebut tidak dikabulkan oleh Danpomdam Jaya dengan alasan, karena belum berlangsung gelar sidang di Peradilan Militer. Perihal belum terlaksananya gelar sidang, Pomdam Jaya mengemukakan alasan yaitu kurangnya alat bukti dan keterangan saksi. Dikatakan, tidak ditemukan senjata yang digunakan menembak, dan tidak ada mahasiswa yang mau memenuhi undangan memberikan keterangan sebagai saksi.

Sejak itu kami semakin sadar akan kemungkinan terjadinya rekayasa: kasus dibiarkan menggantung atau diarahkan ke proses Peradilan Militer melalui teknis hukum. Dan kami pun bertanya-tanya, apakah bisa dijamin obyektivitasnya? Sejauh mana bisa dijamin bebas intervensi dan rekayasa? Sebab, semua yang terkait, terlibat, dan berperan dalam proses itu adalah dari kalangan aparat keamanan. Mulai dari pelaku/terdakwanya, penguasaan alat bukti termasuk senjata yang digunakan menembak, penyidikanya, oditurnya, pembelanya, hakimnya dan lain-lainnya. Apalagi korbannya adalah warga sipil atau di luar korp, apakah tidak akan bertiup semangat *esprit de corps*?. Oleh karena itulah kami kemudian datang ke Komnas HAM. Meskipun di lembaga itu kami mengalami kekecewaan, karena pengaduan kami ternyata hanya akan ditampung saja dengan alasan bahwa Komnas HAM hanya berwenang melakukan pemantauan, dan kasus itu sudah ada di tangan instansi lain.

Dalam masa-masa yang tidak menentu, di mana belum adanya alternatif lain selain Peradilan Militer dan terdapat kesan kuat akan dipeti-eskannya kasus Semanggi, kami dengan dukungan banyak pihak melakukan berbagai aktivitas untuk mencegah dipeti-eskannya kasus Semanggi. Aktivitas itu meliputi antara lain lobby, audiensi, menulis di media massa, berbicara di media elektronik dan kampus-kampus, unjuk rasa, dan sebagainya.

Banyak pihak atau instansi telah kami datangi antara lain: Puspom, Pomdam Jaya, Komnas HAM, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Dephankam, Istana, Kantor Perwakilan PBB, Fraksi ABRI DPR-RI, Fraksi Utusan Daerah MPR-RI, Fraksi PPP DPR-RI, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, DPP-PKB, DPP-PDIP, DPP-PAN, Kantor Perwakilan PBB untuk HAM, Sidang Paripurna DPR-RI, Raker Komisi I DPR-RI dengan Mabes TNI/Polri, dan Mahkamah Agung RI. Seiring dengan langkah perjuangan itu, terbitlah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif yaitu memungkinkan terbentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum undang-undang tersebut terbit.

Di samping itu dengan adanya peningkatan wewenang Komnas HAM, bukan lagi hanya sebagai lembaga pemantau melainkan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang diduga terjadi pelanggaran berat HAM. maka langkah kami untuk menuntut penyelesaian kasus terasa semakin terarah. Apabila sebelumnya langkah kami disertai perasaan pesimis dengan melihat dan merenungkan kondisi obyektif, namun ketika kami memperoleh pegangan yang pasti dalam menuntut penyelesaian maka perasaan optimislah yang menyertai langkah-langkah kami.

## **Antara Harapan dan Kekecewaan**



Dengan terbitnya UU No. 26 Tahun 2004 membuka babak baru bagi perjalanan korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM dalam menuntut kebenaran dan keadilan. Desakan untuk mengusut kasus penembakan mahasiswa menjadi semakin intens. Perhatian serta kekecewaan publik terhadap kecenderungan memeti-eskan kasus Semanggi mampu menjadi daya desak masyarakat. Terbentuklah Pansus DPR RI untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I-II yang beranggotakan 50 anggota DPR-RI meliputi 10 Fraksi yaitu: 1. Fraksi PDI Perjuangan (*Roy BB. Janis, SH, Jusep Purwosuganda, Rusman Lumbantoruan, H. Wisnu Kuncoro, Don Murdono, SH, Imam Soeroso, Haryanto, Ir. Meilono Soewondo, MBA, Royani Haminullah, Dr. Rekso Ageng Herman, Panda Nababan, Drs. Zoned Moesni, Firman Jaya Daeli, SH, Hj. Indira Damayanti Bambang S, Ir. Mindo Sianipar*); 2. Fraksi Golkar (*H. Ahmadi Noor Supit, MBA, Drs. H. Agusman St. Basa, Drs. A. Gumiwang Kartasmita, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Drs. Priyo Budi Santoso, Drs. Hajriyanto Y. Tohari, MA, H. Effendi Jusuf, SH, Drs. H. Djamaluddin Sahidu, Dr. Ny. Mariani Akib Baramuli, Drs. Idrus Marham, H.M. Malkan Amin, Drs. Djelantik Mokodompit, H. Abdullah Syarwani*); 3. Fraksi PPP (*H. Abdullah Syarwani, SH, H. Achmad Farihal, Drs. H. Endin A.J. Soefiara, MM, Drs. H. Suryadharma Ali, Drs. H. Djabaruddin Achmad, HM. Danial Tandjung*); 4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (*Drs. Ali Masykur Musa, Msi, Drs. A. Effendy Choirie, Sag, Rodjil Ghufron AH, SH, Andi Najmi Fuadi, SH, H. Abdul Wahib Aziz Bisri*); 5. Fraksi Reformasi (*Dr. Irwan Prayitno, Msc, Psi, Drs. Djoko Susilo, MA, Drs. H. St. Ambia B. Boestam, Alvin Lie, MSc*); 6. Fraksi TNI/Polri (*H. Suwadji M, SIP, I.N.T. Aryasa, Drs. Taufiequrahman Ruki, SH, Ronggo Soenarso, SIP*); 7. Fraksi PBB (*H.M. Zubair Bakr*); 8. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (*Tjetje Hidayat Padmadinata*); 9. Fraksi Partai Daulat Ummah (*Sayuti Rahawarin*); 10. Fraksi PDKB (*Prof. Dr. Mahasse Malo*). Ada beberapa nama yang tidak disebut dalam Surat Keputusan pembentukan Pansus namun sering hadir dalam RDPU yaitu *Syaifullah Adnawi* (Fraksi Kebangkitan Bangsa), *Drs. Chotibul Umam Wiranu* (Fraksi Kebangkitan Bangsa), *Drs. Sidharto Danusubroto* (Fraksi PDI Perjuangan), dan *Nurdiati Akmal* (Fraksi Reformasi).

Kekecewaan masyarakat terutama keluarga korban terhadap Pansus, pertamanya dari jumlah kehadiran para anggota Pansus dalam setiap RDPU yang tidak pernah mencapai 30 persen. Hanya dua kali RDPU dihadiri oleh 20 orang yaitu ketika Pansus mengundang Wiranto dan Prabowo. Pada RDPU yang lain jumlah anggota Pansus yang hadir hanya berkisar 8 sampai dengan 17 orang, dan itu pun tidak pernah bertahan sampai selesai rapat. Di samping itu, pertanyaan yang dilontarkan kepada para mantan pejabat militer dan polisi yang pada waktu peristiwa Trisakti dan Semanggi mempunyai posisi yang terkait, tidak eksploratif. Pertanyaannya tidak menggali temuan-temuan baru yang signifikan. Bahkan RDPU sering berubah menjadi semacam ajang klarifikasi oleh para jenderal berkenaan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pansus juga tampak tidak siap, atau memang sengaja tidak mau, membongkar pembelaan diri para perwira yang dimintai keterangan.

Melalui RDPU terlihat bahwa upaya pembelaan terhadap gugatan telah terpola, yaitu dengan mengemukakan bahwa komandan militer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jatuhnya korban dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Menurut mereka, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah si pelaku penembakan di lapangan. Pola itu dapat disimak dari pernyataan yang mengatakan bahwa dalam operasi militer ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab secara berjenjang. Pimpinan di tingkat kebijakan tidak bertanggungjawab atas penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana di tingkat lebih bawah yaitu operasional, taktis, dan teknis (*Wiranto*). Kasus penembakan terhadap mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak bisa dikategorikan pelanggaran berat HAM, dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Dikhawatirkan prajurit bakal tidak mau menjalankan tugasnya (*Wiranto*). Jatuhnya korban meninggal dalam peristiwa-peristiwa itu merupakan korban dari eksekusi menegakkan konstitusi, dan agar diterima sebagai kenyataan (*Wiranto*). Semua pihak diminta berjiwa besar untuk menerima proses penyelesaian kasus dengan pendekatan teknis hukum (*Wiranto*). Selaku penanggungjawab keamanan ketika berlangsungnya Sidang Istimewa MPR 1998, hanya bertanggungjawab atas keamanan/kelancaran jalannya sidang dan keselamatan para anggota MPR/DPR dan pejabat negara serta tamu undangan. Soal jatuhnya korban meninggal adalah tanggungjawab materiil pelaku penembakan (*Djadja Suparman, Noegroho Djajusman*). Selaku penyidik, telah melaksanakan tugasnya dalam koridor hukum, non-politis, di mana pelaku penembakan sulit ditemukan karena anak peluru bukti yang mengenai korban tidak bisa diidentifikasi karena mantel pelurunya rusak, hanya serpihan (*Hendardji*).

Dari berbagai pernyataan itu sebenarnya merujuk pada satu kata kunci yaitu ingin menghindari dari tanggungjawab. Permintaan agar penyelesaian kasus dilakukan melalui pendekatan teknis hukum, mudah ditangkap maksudnya yaitu agar kasus-kasus itu tetap menggantung. Sebab, dengan pendekatan itu bakal mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti sehingga kasus tak memenuhi syarat untuk diproses lanjut. Untuk hal-hal semacam inilah anggota Pansus DPR tidak mampu atau tidak mau mengkritisi secara mendalam. Padahal cukup jelas bahwa melalui keterangan, pendapat, kesaksian dan lain sebagainya dalam RDPU menunjukkan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi melekat dengan persoalan tanggungjawab dari sebuah hirarki. Untuk itu pendekatan politis mestinya perlu dilakukan pula karena justru potensial untuk menguak kisi-kisi persoalan secara lebih dalam dan luas. Tampaknya tak terjangkau oleh perhatian Pansus, bahwa persyaratan teknis hukum seperti alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat, petunjuk dan lain sebagainya bukan hal yang mudah dipenuhi, apalagi kalau intimidasi atau rekayasa sudah ikut bermain.

## Lempar Tanggungjawab

Perihal pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam operasi militer, hal ini mudah mengusik orang untuk berkomentar. Adanya pemilahan tanggungjawab, katakanlah dalam tataran kebijakan oleh pimpinan, dalam tataran operasional oleh pasukan di lapangan, seakan-akan merupakan isyarat bahwa hanya pasukan di lapangan saja yang bisa berbuat salah. Posisi pasukan di lapangan memang sangat rentan karena bisa dipojokkan dengan fakta peristiwa, sedangkan pimpinan bisa berlindung di balik ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif. Menjadi pertanyaan, apakah pelimpahan tanggungjawab kepada pasukan pelaksana di tingkat operasional dan terputusnya tanggungjawab komandan, merupakan salah satu manajemen komando dalam militer atau hanya penafsiran sesaat? Sebab sosialisasinya baru merebak sejak pelanggaran HAM di Timor Timur menjadi sorotan gencar di dunia internasional.

Seperti pada bulan Februari 2000, seorang senior TNI memaparkan pandangannya melalui media massa bahwa sekalipun ada prajurit yang terlibat dalam pelanggaran HAM harus dipandang sebagai penyelewengan orang-perorangan dan tidak bisa dihubungkan dengan kenyataan bahwa ia adalah anggota sebuah pranata bernama TNI. Alasannya, lagi-lagi dikatakan bahwa terdapat berbagai jenjang pengambilan keputusan. Keputusan tertinggi di tangan pimpinan, yang kemudian diterjemahkan secara operasional pada tingkat bawah. Kemudian diterjemahkan secara taktis pada jenjang yang lebih ke bawah, dan pada akhirnya diterjemahkan secara teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Bila terjadi penyelewengan di tingkat lapangan dalam pelaksanaan teknisnya, hal itu harus dipandang sebagai penyelewengan perorangan dan tidak boleh digeneralisasi sebagai representasi dari institusi TNI.

Argumen tersebut meskipun terasa logis tetapi menimbulkan pertanyaan, apakah semua penyelewengan harus diasumsikan hanya terjadi pada pelaksanaan teknis di lapangan? Apakah tidak mungkin akibat salah terjemahan di tingkat taktis, atau bahkan di tingkat operasional? Kalau kesalahan terjadi pada jenjang yang lebih tinggi, apakah juga masih dinamakan kesalahan perorangan, bukan kesalahan institusi? Bukankah garis komando militer selalu mengalir dari atas ke bawah?

Konon, dalam komando militer kejelasan informasi harus cukup terjamin agar tidak terjadi makna ganda yang dapat memberi peluang bagi interpretasi lain dari yang dikehendaki komandan. Kalau terjadi penembakan dan mematikan, dapat dipertanyakan apakah ini terjadi karena para prajurit di lapangan telah sengaja menyelewengkan instruksi atau karena ketidakjelasan instruksi? Ini dapat dipersoalkan bukan saja mengenai kualitas pendidikan dan pembinaan terhadap para prajurit selama ini, melainkan juga apakah para komandan sudah cukup terlatih dengan baik sehingga mampu memberi instruksi yang tidak mudah disalahtafsirkan? Kalau tindakan itu memang penyelewengan,

maka dapat dipersoalkan disiplin ketaatan dalam pendidikan militer kita. Sementara itu bagi orang di luar militer cenderung memandang bahwa hanya di militerlah berlaku asas taat - yang berarti benar-benar taat secara buta. Kalau tindakan prajurit di lapangan itu akibat instruksi yang tidak jelas, apakah pemberi instruksi itu tidak layak dihukum?

Secara etika kelembagaan dapat dipertanyakan pula, di mana tanggungjawab TNI sebagai lembaga kalau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan teknis di lapangan harus dianggap sebagai kesalahan orang-perorangan? Kalau prajurit berprestasi baik, maka dianggap sebagai anggota atau bagian institusi, namun bila prajurit menyeleweng, melanggar HAM, dianggap sebagai tindakan perorangan dan seperti dicopot dari afiliasinya dengan lembaga.

Kinerja Pansus DPR-RI tentang Kasus Trisakti dan Semanggi I-II ternyata mengecewakan keluarga korban, meskipun pada setiap RDPU selalu dikemukakan oleh Ketua Pansus bahwa Pansus dibentuk dan bekerja didasarkan atas dorongan kenyataan setelah melihat perjuangan keluarga korban dalam menuntut pengungkapan kebenaran dan keadilan atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa anggota keluarganya, selalu menjumpai hambatan. Hasil kerja Pansus yang dilaporkan pada Sidang Paripurna DPR, 9 Juli 2001, tidak menyuarakan kepentingan korban melainkan menggaungkan "pesan" bahwa aparat keamanan tidak melakukan pelanggaran berat HAM. Pesan itu senada dengan pernyataan Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dalam kesempatan RDPU tanggal 21 Mei 2001.

Perkembangan di Pansus DPR terdapat usulan-usulan yang berbeda, sehingga dapat dipetakan menjadi dua kelompok yang berbeda. *Kelompok pertama* terdiri dari *Fraksi Partai Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Bulan Bintang, dan Fraksi Partai Daulat Ummah* menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran berat HAM serta merekomendasikan agar proses hukum yang telah dan sedang berjalan dalam ketiga kasus tersebut diselesaikan secara tuntas dengan proses pengadilan umum/militer yang transparan, jujur, adil serta obyektif, dan perlu dilakukan evaluasi bersama untuk mendapatkan sebuah peraturan perundang-undangan pengendalian huru-hara dan atau aksi-aksi massa agar tidak mudah terjadi korban.

Kemudian *kelompok kedua* terdiri dari *Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi PDKB* merekomendasikan berupa usulan kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Kasus Trisakti dan Semanggi, guna penyelidikan lebih lanjut dan menuntaskannya. Dan salah satu pilihan yang diusulkan untuk mengatasi kontroversi politik sehubungan dengan kewenangan Pansus adalah

merekomendasikan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM kepada Komnas HAM.

Dalam pembahasan finalisasi laporan Pansus ke Bamus (Badan Musyawarah) DPR, yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2001, muncul dua pandangan yang berbeda mengenai rekomendasi yang akan dilaporkan Pansus ke Bamus. *Pandangan pertama* menghendaki agar Pansus melaporkan apa adanya, di mana dalam pembahasan di Pansus terdapat dua rekomendasi yaitu: 1. Rekomendasi yang menghendaki penyelesaian kasus melalui pengadilan umum/militer; dan 2. Rekomendasi yang menghendaki segera diterbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. *Pandangan kedua* menghendaki agar Pansus melaporkan hanya satu rekomendasi saja. Dalam Rapat Pleno Pansus tidak dapat dicapai mufakat bulat untuk mengambil keputusan terhadap dua opsi tersebut. Akhirnya melalui *lobby* dihasilkan satu tawaran yaitu hanya melaporkan satu rekomendasi saja kepada Bamus, dan pilihan opsi diputuskan melalui *voting*.

Pilihan opsi atau rekomendasi itu jelas bermuatan kepentingan politik dari kelompok-kelompok kepentingan. Pilihan Peradilan Militer dan Pengadilan HAM *ad hoc* mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Pilihan Peradilan Militer yang lebih tertutup jelas akan lebih menguntungkan militer, dari pada Pengadilan HAM *ad hoc* yang mempunyai peluang untuk memasukkan penyidik sipil dan hakim *ad hoc* melalui proses yang terbuka.

*Voting* untuk menentukan rekomendasi mana yang akan dilaporkan ke Bamus, seharusnya diikuti oleh 26 orang anggota Pansus, sesuai daftar hadir yang tercatat sebanyak 26 orang. Namun ternyata, *voting* hanya diikuti oleh 19 orang dengan hasil sebagai berikut: 14 suara setuju merekomendasikan pengadilan umum/militer dan 5 suara setuju merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Berdasarkan hasil *voting* tersebut maka laporan Pansus kepada Rapat Paripurna DPR merekomendasikan untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan. Laporan Pansus tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPR yang berlangsung tanggal 9 Juli 2001, dipimpin oleh Soetardjo Soerjogoeritno dan terbuka untuk umum. Sebenarnya, pada saat Rapat Paripurna DPR itu muncul interupsi dari beberapa anggota Pansus yang ingin menyampaikan keberatannya atas rekomendasi tersebut. Tetapi oleh Pimpinan Rapat, interupsi itu tidak mendapat tanggapan dan rekomendasi tersebut diterima.

Rekomendasi inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Rekomendasi DPR” yang menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan pelanggaran berat HAM. Rekomendasi ini kemudian dimanfaatkan baik oleh para pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab dalam peristiwa

itu, sebagai alasan untuk tidak perlu memenuhi pemanggilan KPP-HAM Kasus Trisakti dan Semanggi I-II. Juga dimanfaatkan oleh Kejaksaan Agung untuk menggajal terbentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Alasan mereka, pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus berdasarkan usul DPR. Sementara itu, ketika Keluarga Korban mendatangi Mahkamah Agung pada bulan September 2001 diperoleh penjelasan bahwa Rekomendasi DPR itu adalah produk politik dan bukan produk hukum, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan sebaiknya diabaikan saja.

## Harapan Baru

Terbentuknya KPP HAM untuk Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II oleh Komnas HAM, setelah keluarnya Rekomendasi DPR yang mengecewakan itu, merupakan harapan baru bagi Keluarga Korban bahwa ketiga kasus itu tidak akan dibiarkan menggantung. Apalagi susunan KPP HAM itu terdiri dari anggota-anggota Komnas HAM dan tokoh-tokoh serta para aktivis di bidang penegakan HAM seperti: *Dr. Albert Hasibuan, SH* (Ketua), *Dr. Todung Mulya Lubis* (Wakil Ketua), *Usman Hamid, SH* (Sekretaris), dan beberapa orang anggota KPP yakni *Prof. Dr. Saporinah Sadli, Hendardi, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, Munarman, SH, Zoemrotin K. Susilo, Ita F. Nadia, Ruth Indah Rahayu, dan Prof. Dr. Azyumardi Azra*. Dalam masa kerjanya, KPP HAM telah menemukan berbagai bukti kuat yang menyatakan bahwa dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semnggi II diduga keras telah terjadi pelanggaran berat HAM.

Dalam proses penyelidikan KPP HAM melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak untuk dimintai keterangan, termasuk 19 mantan pejabat militer dan kepolisian. Ternyata dari 19 mantan pejabat itu hanya satu orang yang memenuhi pemanggilan yaitu *AKBP Zulkarnain* (Mantan Wakapolres Jakarta Selatan), dan 18 orang lainnya tidak bersedia memenuhi panggilan yaitu: *Jenderal TNI (Purn) Wiranto* (Mantan Pangab), *Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi* (Mantan Kapolri), *Komjen Noegroho Djajusman* (Mantan Kapolda Metro Jaya), *Jenderal Polisi (Purn) Diby Widodo* (Mantan Kapolri), *Irjen Hamami Nata* (Mantan Kapolda Metro Jaya/Wapangkoops Jaya), *Mayjen Safrie Syamsoeddin* (Mantan Pangdam Jaya/Pangkoops Jaya), *Letjen Djadja Soeparman* (Mantan Pangdam Jaya), *Kombes Timur Pradopo* (Mantan Kapolres Jakarta Barat), *Kombes Arthur Damanik* (Mantan Kaditsamapta Polda Metro Jaya), *AKBP Aqil* (Mantan Danpam VIP Komp. MPR/DPR), *AKBP Imam Haryatna* (Mantan Kapolres Jakarta Pusat), *AKBP Ciptono* (Mantan Kapolres Jakarta Timur), *Kolonel (CPM) Hendardji* (Mantan Danpomdam Jaya), *Kolonel (Art) Priyatno* (Mantan Dansatgas Jaya), *Letkol Amril Amin* (Mantan Dandim 0503 Jakarta Barat), *Letkol Dj. Nachrowi* (Mantan Kapendam Jaya), dan *Kolonel George Tuisuta*.

Hasil penyelidikan KPP HAM, meskipun tidak dilengkapi dengan keterangan dari 18 orang tersebut, kemudian dilaporkan kepada Komnas HAM dan diterima. Komnas HAM kemudian mengirimkannya ke Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut. Namun ternyata hasil penyelidikan yang dikirim Komnas HAM itu menjadi “bola panas” yang menggelinding, dan saling lempar antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Semula Kejaksaan Agung menggunakan alasan penolakan yakni bahwa secara administratif hasil penyelidikan tidak memenuhi syarat formal, juga karena telah ada Rekomendasi DPR yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat HAM. Tetapi kemudian, ketika DPR membentuk sebuah Pansus untuk meninjau kembali Rekomendasi DPR, Kejaksaan Agung mengemukakan alasan lain yaitu dengan menggulirkan dalih adanya asas *nebis in idem*. Menurut Kejaksaan Agung, pelaku lapangan telah diadili di pengadilan militer dan tidak bisa diadili dua kali dalam perkara yang sama. Sedangkan terhadap komandan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pengadilan HAM.

Di sini tampak bahwa Kejaksaan Agung dan DPR tidak ada niat untuk menuntaskan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II seturut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Itu berarti para elit politik yang kini berkuasa telah mengkhianati reformasi, di mana salah satu agendanya adalah mengadili pelanggar HAM. Berarti pula, bahwa pemerintahan di bawah Megawati Soekarnoputri tidak ada niat untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Kini kami menjadi bertanya-tanya, apa yang ada di benak tokoh-tokoh Ciganjur seperti K.H. Abdurrahman Wahid, Dr. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengku Boewono X dan juga para tokoh Reformasi lainnya? Kami khawatir bila mereka telah terbuai oleh jabatan atau kekuasaan yang pernah berhasil diraihinya, sehingga lupa akan darah yang tumpah dari sejumlah mahasiswa ketika terpanggil untuk mewujudkan dan mempertahankan Reformasi demi runtuhnya rezim otoriter.

Perihal dibentuknya Pansus DPR untuk meninjau kembali Rekomendasi DPR pada dasarnya bukan inisiatif murni dari DPR, melainkan atas desakan keluarga korban yang didampingi KontraS (*Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan*). Pada waktu itu kami diterima oleh Pimpinan DPR, Ir. Akbar Tandjung, tanggal 9 Juli 2003. Ketika itu keluarga korban minta agar DPR meninjau kembali, dan kalau perlu mencabut Rekomendasi DPR agar tidak menjadi alasan institusi lain untuk menghambat atau tidak menindaklanjuti kasus Trisakti dan Semanggi. Akbar Tandjung selaku Pimpinan DPR mengatakan bahwa DPR tidak bisa begitu saja mencabut rekomendasi tersebut, tetapi harus kembali kepada mekanisme Dewan. Ia akan mengundang Pimpinan Komisi II DPR untuk membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan dalam rangka merespon aspirasi keluarga korban. Ia akan merekomendasikan agar Komisi II DPR menyelenggarakan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

## Benturan Baru

Sementara kasus Trisakti dan Semanggi masih menggantung, kini keluarga korban dihadapkan dengan permasalahan baru di mana Pemerintah telah melimpahkan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU-KKR) kepada DPR untuk dibahas. Naskah RUU-KKR ternyata lebih menitikberatkan pada rekonsiliasi dari pada mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Dalam RUU-KKR justru terdapat celah bagi terwujudnya impunitas (*impunity* yaitu terbebaskannya pelaku dari sanksi hukum dan politik atas tindakan yang dilakukannya). Apalagi DPR yang akan melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut adalah para anggota DPR periode sekarang. Mereka adalah wajah-wajah lama yang telah terbukti menelorkan Rekomendasi DPR yang menghalangi penuntasan kasus Trisakti dan Semanggi melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Dapat diduga bahwa kehadiran UU-KKR justru berpotensi membuat korban dan keluarga korban menjadi semakin rentan.

Keinginan Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan alasan demi persatuan dan rekonsiliasi nasional, ternyata lebih berbasis pada keinginan memberi pengampunan kepada pelaku ketimbang kesadaran untuk membongkar kejahatan masa lalu. Dalam RUU-KKR ternyata kepentingan para pelaku yang lebih terwakili dari pada kepentingan korban dan keluarga korban. Korban justru akan diminta (atau diarahkan, dipaksa) untuk berkorban lagi berupa kesediaan memberi pengampunan kepada pelaku. Dan walaupun korban atau keluarga korban tidak bersedia mengampuni, hal itu tak menjadi masalah sebab bisa saja diabaikan oleh Komisi. Pada hal bagi korban, pemberian pengampunan bukanlah hal yang mudah karena harus jelas permasalahannya. Bagaimana mau mengampuni kalau para korban tidak pernah tahu siapa yang harus dimaafkan.

Kesediaan memberi pengampunan atau tidak, adalah wilayah kompetensi korban setelah kebenaran dan keadilan tersingkap. Jadi bukan urusan Pemerintah yang setiap kali bisa berganti sosok penguasanya, berganti paradigma/pandangannya. Peranan Pemerintah dalam hal ini mestinya di wilayah kemauan untuk menyingkap kebenaran dan mewujudkan keadilan, termasuk membongkar berbagai kasus pelanggaran berat HAM atau tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Apabila “minta maaf” dan “memberi maaf” diarahkan melalui sebuah ketentuan dan berdimensi politik, maka wajar bila terjadi pemberian pengampunan oleh korban secara tidak ikhlas. Dan pengampunan akan bersifat semu karena bertentangan dengan suara hati

Sedangkan oleh pelaku, kata “mengampuni/memaafkan” sangat mungkin dimaknai seturut kepentingan sesaat dan dapat disalahgunakan dalam wacana publik yaitu dijadikan strategi jitu bus moral politik, di mana memaafkan



diartikan sebagai “melupakan.” Oleh karena itu secara nalar, pemberian maaf mungkin dapat diberikan setelah tabir kebenaran dan keadilan dapat dibuka. Untuk itu, terutama untuk kasus Trisakti dan Semanggi, jalur untuk membuka kebenaran dan keadilan sudah ada yaitu melalui Pengadilan HAM *ad hoc*. Masalahnya adalah, adakah niat Pemerintah untuk mengungkap tuntas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan masa lalu?

RUU-KKR sangat potensial untuk menutup mata terhadap tuntutan keadilan dan pelurusan sejarah. Yang banyak diatur adalah soal mekanisme menuju rekonsiliasi. Pada hal tanpa ada “penjeraan” berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan, tak ada jaminan bahwa tidak bakal terjadi keberulangan. Dan rekonsiliasi yang direka itu pun tidak lebih dari sebuah kepalsuan. Dalam sebuah pemerintahan yang masih ditandai oleh bergabungnya para pendukung rezim otoriter dalam kendali kebijakan politik dan hukum, sehingga pelaku memiliki resistansi atau ketahanan yang begitu tinggi, maka pengakuan kesalahan oleh pelaku sebagaimana disinggung dalam RUU-KKR bakal sulit terlaksana. Sehingga pada akhirnya KKR nantinya hanya akan menjadi sebuah instrumen “akal-akalan” oleh pelaku untuk mencuci dosa masa lalu.

Menyimak RUU-KKR, dapat dikemukakan bahwa UU-KKR berpotensi melanggengkan praktek impunitas, sekalipun secara terselubung, baik ketika misi KKR itu berjalan mulus maupun ketika mengalami hambatan. Hal ini dapat dirunut pada mekanisme penyelesaian kasus versi RUU-KKR. Ketika pengungkapan kebenaran bisa berlangsung, di mana pelaku mau mengaku kesalahannya, korban mau memaafkan, permohonan amnesti dikabulkan, pemberian kompensasi-rehabilitasi-restitusi terlaksana dan kedua pihak menandatangani kesepakatan damai, tidak akan saling menggugat, maka ratalah jalan menuju rekonsiliasi. Dalam hal ini bisa dicatat bahwa pelaku pada akhirnya bebas dari sanksi hukum. Ini berarti terjadi impunitas. Kemudian, ketika misi KKR gagal, karena pengakuan pelaku tidak jujur, korban tidak bersedia memaafkan dan Komisi juga tidak bisa menerima pengakuan pelaku, dan permohonan amnesti oleh pelaku ditolak, maka kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM *ad hoc*. Apabila pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* bisa digagalkan, maka kasus tetap menggantung dan ini berarti terjadi pula impunitas. Apabila kasus kemudian berhasil diproses di pengadilan pun bisa dipertanyakan, apakah benar-benar berlangsung obyektif? Bila yang terjadi adalah rekayasa, maka terjadilah impunitas pula.

### **Permasalahan Kongkrit**

Apa yang tertutur di atas pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa peristiwa Trisakti dan Semanggi kental dengan kepentingan penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Atau setidaknya berbau *abuse of power*. Peristiwa seperti ini bukanlah kali yang pertama, sebab terjadi pula peristiwa-

peristiwa lain seperti kasus Tanjung Priok, Marsinah, pembantaian puluhan rakyat Papua dan Aceh, kasus Nipah di Sampang, Madura, penembakan mahasiswa di Ujung Pandang, di Lampung, kasus Moses Gatotkaca di Yogyakarta, penculikan para aktivis politik termasuk Wiji Thukul di Solo, kasus 27 Juli 1996, kasus Udin di Yogyakarta, dan sebagainya. Dari berbagai kasus itu kita dapat membuat beberapa catatan antara lain:

*Pertama*, ada kasus yang hingga kini belum diketahui pelakunya meskipun ada indikasi pelakunya adalah pihak kekuasaan atau aparat keamanan. Untuk itu berbagai cara dilakukan guna menggelapkan si pelaku, baik melalui teror maupun skenario di pengadilan. *Kedua*, Meskipun sudah diketahui pelakunya dan diduga keras adalah aparat keamanan, pelakunya tidak pernah diajukan ke pengadilan. Kemudian *ketiga*, meskipun pihak keamanan mengakui keterlibatannya dalam suatu kasus, bentuk pengakuan itu didekonstruksi menjadi sekadar oknum saja, atau kualifikasi kesalahannya hanya menjadi kesalahan prosedural agar hukuman yang dijatuhkan menjadi sangat ringan.

Catatan tersebut menggambarkan sebuah kecenderungan yang terjadi, dan merupakan suatu permasalahan kongkrit yang dihadapi oleh korban dan keluarga korban. Yang jelas, korban dalam perjuangannya menghadapi banyak kendala terutama karena masih berperannya orang-orang *pro-status quo* serta kaum oportunist dalam pengendalian pemerintahan pasca Soeharto (1966 - 21 Mei 1998) dan BJ. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999), baik pada masa K.H. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001) maupun Megawati Soekarnoputri (21 Juli 2001 hingga sekarang).

Apa yang terungkap dalam tulisan ini mengandung penuturan yang lebih dalam lagi, yaitu sebuah perenungan bahwa ketika kami menghadapi “kekuatan” atau kekuasaan riil, terkadang merasa pesimis. Namun ketika kami yakin bahwa dalam setiap langkah pasti ada sesuatu hal yang positif yang bisa kami raih, maka kami merasa optimis. Apalagi, kami korban dan keluarga korban dalam langkah perjuangannya tidak mengenal batas waktu sampai kapan. Mungkin kami tidak sempat bisa melihat hasil upaya kami - karena usia, namun kami yakin bahwa perjuangan atau upaya kami akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Masalah “nyawa” bukanlah masalah sederhana.

**Jakarta, Medio Maret 2004**

## Kisah Jalan Jenderal Soedirman Santo Klingon<sup>5</sup>

Berawal di ruang depan rumahku (yang sekaligus ruang tengah, ruang makan, juga ruang kerja) yang disibukkan dengan warta berita diradio—sebuah barang elektronik yang berharga saat itu yang kami punya, maklum pada saat itu adalah krisis yang paling kritis—tentang keberadaan ribuan mahasiswa yang berkonvoi sejak pagi menuju MPR/DPR menuntut: menolak Sidang Istimewa untuk mengukuhkan BJ Habibie sebagai Presiden .

Di ruangan itu diskusi kecil terjadi antara aku dengan bunda-ku, “To, kalo Bunda jadi kamu, Bunda udah di barisan depan ini! Saking aja banyak kerjaan kalo *nggak seeh* udah jadi...”

“Martir, begitu bund...” sahutku dengan cepat yang diiringi lagu Aerosmith;  
'..Ohhh I'm Leaving on jet plain  
don't know when I'll be back again,  
.. OOOh Beib I'had too goo.'

Yang melagu begitu syahdu di Radio (sebuah '*request*' dari seorang mahasiswi untuk kawannya yang sedang berada di medan perjuangan demokrasi..). Lagu itu juga mengajak dan menggugah diriku melangkah kaki ke Kampus Universitas Pancasila (Jl. Borobudur, Menteng Jakarta Pusat yang jaraknya hanya selangkah jalan dari rumahku).

“Tapi kau bukan mahasiswa gimana dong bisa gabung *nggak..*”  
“Loh kita kan berjuang untuk rakyat *man*, tenang aja *coy ..*”

Kawan dari Fakultas Ekonomi yang selama beberapa hari sebelumnya berkumpul di kampus Universitas Pancasila (yang menjadi Sentral Informasi juga tempat berkumpulnya mahasiswa dari luar Jakarta yang tergabung dalam Gempur (Gerakan Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi) dan SORAK (Solidaritas untuk Rakyat). Dan aku mau di masukkan ke 'Sorak'. Yang juga bersama kelompok dari Aldera dan beberapa elemen lainnya yang tidak hanya mahasiswa juga semua elemen rakyat -bahkan ada yang membawa serta dagangannya untuk ikut 'berjuang'. Ini yang membantu kita dalam logistik di jalan, Juga ada kawan ku yang dari kolong jembatan ikut serta bahkan mereka

---

<sup>5</sup> Seniman Jalanan. Santo Klingon sering berteaterikal sejak 1998 hingga saat ini untuk demonstrasi atau pertunjukan seni, yang bekerjasama dengan Kontras, Komnas HAM, Walhi EkNas, YLBHI, JATAM, IKOHI dan lembaga lain bahkan juga pernah main lenong untuk hajatan pernikahan, atau pantomim untuk acaranya Garuda, atau MC untuk promosi sebuah sabun mandi, juga pengarang lagu untuk perjuangan korban penggusuran oleh negara.

yang sedang mengamen turun dan ikut rombongan kelompok unjuk rasa yang sangat bersemangat untuk berjuang bersama.

Ucapan dari seorang kawan karena sebelumnya ketika bergabung dengan mereka para mahasiswa ada yang menolak kehadiran dari elemen rakyat, yang bagi mereka *nggak* jelas. Bahkan jika dari kalangan yang tak punya kampus yang jelas seperti aku ini yang pernah di tuduh sebagai intelejen ...

Dan dengan sebatang bambu sebagai bentuk semangat perjuangan aku ikut gerombolan 'perjuangan untuk rakyat' di siang hari 12 Nopember 1998 yang berjalan lebih dari 10 Km menuju MPR/DPR dengan rute dari Jln. Salemba Raya lewat Jatinegara melintasi Cawang dan di tengah perjalanan gerimis menemani *Long march* sepanjang kurang lebih setengah Kilometer, membuat aku dan temanku (teman SD) bernyanyi; 'November Rain'.

Tak terasa matahari sudah ke arah Barat juga membawa kami ke jalan tol dan menuju arah Komdak (Markas Polisi Daerah Jakarta, dan sempat tertahan di depan LIPI) hingga menjelang maghrib itu. Kami berada di depan komdak yang menuju arah grogol sementara rombongan lain berada di jalan (yang bukan bebas hambatan\ tol) menuju arah cawang/Kampung Rambutan. Dengan gerimis yang masih menemani, kami yang bersama dengan waktu menjadi hujan tak menyurutkan aku untuk membaca puisi di depan ribuan massa yang kebanyakan mahasiswa (dan rasa 'minder'ku waktu itu menyusut seiring puisiku yang mengalir di senja itu) tak menyurutkan puisi yang sering ku baca di bus sebagai mata pencaharianku untuk menghidupiku:

"Sajak A

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

sejak sejarah manusia di ciptaa

cerita duka selalu melanda demi sebuah kekuasaan

...

1965, 1973, 1983-84, 1989, 1991 ...

penghapusan noda untuk membersihkan kursi yang terus mengakar

dan terus bergulir pergulatan meraih kursi di dunia fana fatamorgana

...

Dan sadar mereka bahwa kita akan kembali ke tempat kita di cipta!"

(dan massa yang mendengar menjawab serentak dengan tangan terkepal .. dan beberapa di antaranya ada yang berteaterikal menembaki para polisi anti huruhara..)

Setelah aku berpuisi kami bernyanyi Padamu Negeri dan aku diminta kembali membaca puisi namun belum selesai kami bernyanyi rombongan unjuk rasa di jalur menuju arah cawang sudah mulai '*chaos*' (itu adalah awal aku mengenal istilah lain dari rusuh) dan aku langsung menghindari dari aksi kekerasan itu dan berlindung di truk polisi yang berada persis menghadang kami juga kamera para jurnalis yang bekerja dengan sigap pada saat kondisi seperti itu.

“Waduh *bung lu* masih hidup *gua* pikir *lu* kepukul tadi”, ujar kawanku yang cemas dengan keberadaanku sontak ia memelukku (*waduh gua merasa seperti melakukan perjuangan dalam peperangan yang biasanya aku saksikan di TV saja namun kini aku memainkannya bahkan sebagai peran utama hehe.. memang lucu*)

...

hidup ini memang lucu semua mengejar sesuatu yang semu,  
fana nan fatamorgana  
sesuatu yang tak akan kita bawa ke dunia kita akan  
kembalikan...  
semua berawal dari unsur adat budaya balas budi (ilmu budi pekerti)  
yang mengluluh-lantahkan hukum  
hingga sang raja lalim tak bisa di hukum karna sudah luntur  
(dengan budaya balas budi)  
mengakar hingga ke aorta pembuluh darah kita  
aa aa a a

A

*Lantas apa yang bisa kita lakukan selain menyatu dengan berjalan di jalan  
Sang Kuasa yang tiada dua -kadang kita mendua-kannya bahkan men-lima kan  
NYA..*

*Tetap berjalan dan terus berjalan...  
September 1998..*

Itulah goresan puisi yang merupakan satu kesatuan dari puisi yang kubacakan dari sehalaman polio yang kini mulai basah di kantong celanaku dan mulai ku pindah kan di tas plastik atau kantong kresek yang ku pungut dari pinggir jalan, menyatu dengan recehan yang kemarin ku sisihkan dari hasil mengamen kemarin.

Detik mulai merambat menjadi jam diatas waktu Isya..

“Hei, kalian *ngapain* disini, jangan mundur dulu. Kawan kita sudah ada yang mati satu orang.”

Sebuah teriakan yang tak lagi jernih karena dinginnya malam dari sebuah mobil kijang dan seorang perempuan yang menyentak kami yang menimbang kebenaran berita itu.

Di tempat yang sama berdekatan dengan Jl. Jend Gatot Subroto yakni Jln. Jend Sudirman aku yang dulu tak lagi menjadi relawan SIP: Suara Ibu Peduli - yang membawaku ke dunia “unjuk rasa” untuk kali pertama dan yang merasakan ditodong oleh pasukan bersenjata saat para mahasiswa di usir dari Gedung MPR\DPD aku berada di sebuah gudang bersama ratusan kardus logistik yang ‘di rampas’ oleh ABRI itu dan kami relawan SIP di evakuasi dari rumah ke rumah di malam hari yang menikmati keadan Jakarta yang mencekam seperti

situasi Jakarta tahun 1965 pada film dokumenter buatan Arifin C Noer yang menjadi film wajib di bulan September.

Aku kini juga salah satu anggota dari ormas jalanan yang di bentuk di LBH Jakarta yang bernama FRAM (Front Rakyat Anti Militerisme) yang beranggotakan pengamen jalanan (dan masyarakat jalanan; pedagang asongan, bahkan pencopet) pengacara juga mahasiswa. Kita bersama menolak RUU PKB usulan Wiranto yang mengekang kebebasan berpendapat juga pastinya demokrasi di Indonesia.

“Coy, kawan di daerah Benhil banyak yang ketangkap bahkan banyak yang hilang juga ada beberapa sudah kedapatan tinggal mayat di daerah Cilincing, *pokoknya* di dekat pantai tempatnya buang mayat coy.. gimana dong..”

Seluruh kawan ku dengan wajah yang pucat karena memang kurang asupan gizi namun pengeluaran energinya luar biasa.

“Tapi temen pengacara sudah ada yang membebaskan kawan-kawan ketangkap pun kita *nggak* kenal, dengan syarat mereka harus menceritakan kronologi penangkapan yang kebanyakan dari mereka adalah di tuduh sebagai provokator. Juga mereka harus mengaku sebagai anggota FRAM. Jadi sekarang kelompok kita adalah massa cair coy. Tapi memang agak susah mengidentifikasi mayat yang tanpa pengenal karena mereka rata-rata adalah sudah telanjang bulat, memang di telanjang bulat kan, dan hal yang memberatkan lagi mereka yang di cap provokator itu adalah orang-orang yang bertato *cuy*..”

“Lantas kalo mereka bertato itu kenapa ...?”

“Aku tahu coy kalo kita sudah selesai dengan wacana bahwa tato itu bukan kriminal tapi bagaimana dengan masyarakat luas,... pun itu adalah bagaian dari budaya bangsa.. tapi kini wacana di pegang oleh penguasa *cuy*..”

Dan diskusi dihentikan dengan teriakan salah seorang relawan yang tergabung di relawan mahasiswa Semanggi Peduli yang pingsan karena meminum aqua dari pengirim yang setelah di telusuri membawa nama kawan dari Trisakti karena aku juga yang termasuk menyaksikan penerimaan barang tersebut yang kuingat di bawa oleh seorang bapak-bapak. Memang aku juga masih sebagai relawan mahasiswa peduli (yang satu-satunya yang bukan seorang mahasiswa, tapi mahasiswa jalanan yang kampusnya di tiap halte hehehe).

Di bulan Oktober 1999 kurasakan dari Rumah Sakit Jakarta keadaan yang seperti Afghanistan .

“Wooi ini Jakarta apa Palestina sih..”

“Berisik luh, maju kedepan kalo lu laki..”

Hampir saja terjadi perkelahian itu terjadi, memang ujuk rasa yang tertahan di depan kampus Atma Jaya itu terus tertahan hingga malam tadi aku sempat tertidur di sekitar jam 2 malam dimana masih terjadi aksi penyerbuan aparat hingga mereka masuk ke dalam kampus UNIKA ATMA JAYA hingga ada beberapa mobil remuk bahkan supir minibus yang mengangkut teman-teman UI juga di pukuli namun aku yang kepergok justru dibiarkan pergi karena kami sama-sama kaget. Untungnya dia tidak menembakku. Kalau terjadi kami langsung mati karena ledakan puluhan molotov tersebut. Untungnya tidak.

Lalu setelah kami terdesak hingga ke Rumah Sakit Jakarta lalu kami keluar hingga berhamburan ke Jalan Casablanca hingga ke Rasuna Said dan mengevakuasi diri ke STIE Perbanas karena kami di-press dari Jembatan Semanggi hingga Bundaran HI dan aku membatin “ini mirip sekali dengan film perang vietnam” Bahwa kami sedang di ‘burger’ coy dan kami berhamburan di Jalan Jend Sudirman yang lampunya di padamkan dan ketika sedang berlarian menuju Bundaran HI terdengar suara brak, brak, brak, dari kejauhan tampak seperti pentul korek api yang berjejer dan aku langsung berlari ke belakang dan memberi tahu ke ke kawan-kawan untuk segera berbalik dan ke arah kampus Perbanas.

Namun besoknya kami melanjutkan perlawanan menuju MPR\DPR lagi dengan kekuatan yang sama dan kami sempat melewati jembatan Semanggi dan akhirnya kembali ke depan Atma Jaya hingga gugurnya seorang kawan dari UI Yun Hap. Namun yang ku dengar kawan dari pengamen dan tukang parkir di Benhil juga kawan yang tinggal di kolong jembatan menghilang hingga kini tak diketemukan, memang mereka bukan mahasiswa tapi mereka ikut dalam rombongan unjuk rasa melawan ketidakadilan, pun harus di bayar dengan nyawa.

Pun mereka tak pernah tercatat sebagai pejuang kebenaran atau *kebeneran* mereka mati pada saat unjuk rasa melawan tirani. Yang harus di ingat dalam Ingatan sejarah, rakyat tak pernah diam pun luka lama di biarkan pun kalo ada yang ingin membuka nya harap di ingat bahwa peristiwa Semanggi adalah contoh bahwa rakyat ikut berjuang menyuarakan ketidakadilan di negeri ini. Namun nama mereka tak pernah tercatat dalam sejarah orang yang gugur dalam peristiwa tersebut karena mereka bukan mahasiswa juga karena di tubuhnya ada tato.

## Peristiwa Semanggi: Keji Tak Henti<sup>6</sup> Savic Aliel'ha<sup>7</sup>

“Banyak dari kami yang tidak pernah membayangkan akan mengalami kejadian macam ini. Berhadapan dengan ribuan tentara negeri sendiri, lengkap dengan bedil, tameng, sangkur dan sepatu lars. Tak lupa mobil-mobil penghalau massa, *water canon*, serta panser. Beberapa mengenakan helm pelindung gas beracun, seakan sedang menghadapi teroris bersenjata gas pembunuh massal”.

\*\*\*

Itulah pemandangan di depan kampus Atma Jaya, 13 Nopember 1998. Puluhan ribu massa dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa, berkumpul di Jl. Jendral Sudirman. Mereka meneriakkan satu tuntutan: menolak Sidang Istimewa MPR yang hendak mengukuhkan BJ. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan pendahulunya, Jenderal Besar Soeharto, yang telah mundur beberapa bulan sebelumnya. Sementara di depannya, ribuan pasukan bersenjata lengkap menghadang, menunggu, hingga pecah bentrokan itu.

Awalnya, semua berharap tidak terjadi apa-apa. Apalagi situasi seperti itu sudah sering terjadi, terhitung sejak tergulirkannya reformasi. Namun malang tak bisa ditolak. Tanpa pernah tahu apa pemicunya, rombongan bersepatu lars tersebut melangkah maju, pertama pelan, dan kemudian cepat menerjang.

Didahului oleh semprotan *water canon*, deru suara tembakan mulai terdengar, yang membuat puluhan ribu massa yang sebelumnya cukup tertib itu menjadi buyar berhamburan. Satu persatu mulai jatuh korban. Ada yang tertembus peluru atau sekadar kena tendang atau hantaman pemukul karet dan rotan.

Akhirnya, tercatat 6 orang tewas menjadi korban: Benediktus Norma Irmawan [mahasiswa Atma Jaya], Engkus Kusnaedi [mahasiswa Unija], Sigit Prasetyo [mahasiswa YAI], Heru Sudibyo [mahasiswa Universitas Terbuka], Tedi Mardani [mahasiswa ITI], serta Lukman Firdaus [pelajar].

Aku sendiri tidak yakin korbannya hanya itu, mengingat intensitas bentrokan tak seimbang berdurasi lebih dari 2 jam. Belum lagi jika dihitung yang cacat maupun luka ringan.

---

<sup>6</sup> Tulisan ini merupakan artikel yang pernah dimuat di detikcom, 15 November 2005.

<sup>7</sup> Savic Aliel'ha adalah pelaku Peristiwa Semanggi, Aktivistis Famred (Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi) dan Mantan Ketua Umum FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia).



Kini, 7 tahun telah berlalu. Peristiwa Semanggi I, yang hingga kini masih menyisakan banyak permasalahan. Rasanya sulit untuk mengerti mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Hampir tidak ada alasan yang bisa membenarkannya. Jendral Wiranto, Pangab (Panglima ABRI) saat itu, mengatakan bahwa massa sudah anarkis, brutal, dan inkonstitusional.

Di sini saya katakan: Tidak! Massa saat itu baik-baik saja, saat dimana penembakan belum dilakukan. Mereka relatif tertib seperti aksi-aksi sebelumnya. Tidak ada mobil yang dirusak, gedung yang terbakar, atau nyawa yang melayang. Tuntutan mereka juga bukan sesuatu yang inkonstitusional, atau yang dalam bahasa pemerintah waktu itu: 'makar'.

Sejak awal dimulainya gerakan 98, mahasiswa sudah menginginkan adanya sebuah 'reformasi total'. Karena hanya dengan itulah perubahan mendasar di Indonesia mungkin dilakukan. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung hampir di seluruh penjuru Indonesia sejak akhir 1997 bukan semata menuntut Soeharto mundur, melainkan menuntut adanya reformasi. Bangunan politik dan kekuasaan yang ingin dibenahi, bukan sekedar Presiden yang diganti. Bahkan matra reformasi itulah yang pertama-tama dipakai, ketika gerakan masih kecil, takut-takut dan malu-malu, karena langsung menuntut Soeharto mundur dirasa belum strategis, jika bukan terlalu berbahaya.

Sidang Istimewa [SI] yang bertendensi hanya mengukuhkan BJ. Habibie jelas tidak bisa diterima oleh kalangan yang menginginkan reformasi. Siapapun tahu bahwa Habibie adalah salah satu dari anak emas Soeharto, anak kandung rezim Orde Baru. Mengamini pengukuhanannya adalah memuluskan pewarisan tahta dari seorang penguasa otoriter yang sudah tua kepada anak didiknya yang masih muda. Itulah logika yang mendasari gerakan saat itu.

Namun logika dan argumentasi seperti itu tidak berlaku buat para jenderal yang sedang berkuasa saat itu. Dengan alasan seperti yang sudah disebutkan, yakni anarkis dan makar, mereka memilih mengerahkan pasukan dan memuntahkan senapan. Tidak penting berapa dan siapa yang akan menjadi korban, karena itu bukan anak-anak mereka, bukan darah daging mereka. Mengabdikan pada kekuasaan lebih penting daripada melindungi dan membela generasi penerus masa depan. Sehingga, hingga hari ini, mereka merasa tidak perlu meminta maaf atau sekedar mengakui kesalahan.

Sikap itu mereka tunjukkan jelas dalam proses penyelesaian kasus ini. Tidak ada satu pun jenderal yang mau datang saat ingin dimintai keterangan oleh Komnas HAM, dalam hal ini KPP Trisakti, Semanggi I dan II. Alasan mereka: aparat justru sedang melaksanakan tugas negara. Demikian kata Wiranto dalam kesempatan dengar pendapat dengan Panitia Khusus [Pansus] DPR yang menangani Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, yang mana sikap itu mendapat dukungan dari Mabes TNI.

Bukan hanya alibi pelaksanaan tugas yang sering dilontarkan, melainkan juga serangan atas korban dan keluarga korban. Dengan mengatakan, bahwa kami

semua pada saat itu sedang berupaya makar, maka seakan mereka ingin mengatakan bahwa kami semua pengkhianat negara. Padahal siapapun tahu, bahwa menolak penguasa otoritarian adalah kewajiban. Dan pembelaan atas penguasa tiran bukan sebuah tugas kenegaraan melainkan penyelewengan kekuasaan.

Dengan beragam cara, orang-orang yang terlibat dalam kekerasan di Semanggi juga selalu membangun opini bahwa demonstran saat itu sudah tak ubahnya perusuh yang menciptakan kekacauan. Dan terhadap keluarga korban tidak jarang juga ada tuduhan bahwa mereka didukung dan dibiayai oleh NGO-NGO yang didanai pihak asing.

Penembakan yang mereka lakukan di Semanggi tampaknya belum cukup, dan jika ada kesempatan rasanya mereka ingin membunuh korban untuk kedua kali (*Victimizing victim*), itulah yang terjadi.

Ironisnya, bukan hanya Mabes TNI yang membela para jenderal itu. DPR pun berlaku sama. Setelah proses Pansus beberapa lama, Sidang Paripurna DPR menyatakan bahwa apa yang terjadi di depan kampus Atma Jaya 13 Nopember 1998 itu hanya pelanggaran biasa. Dan ini berseberangan dengan hasil KPP Komnas, yang menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I. Tentu ini sesuatu yang ganjil, mengingat DPR praktis tidak pernah melakukan 'penyelidikan', selain sebagai lembaga legislatif DPR juga tidak berwenang memberi penilaian atau putusan.

Namun asal-usul sikap dan keputusan itu mudah ditebak. Hal ini mengingat konstelasi politik saat itu, dimana ada ketegangan antara pemerintahan Abdurrahman Wahid dan sebagian besar kalangan di DPR. Kondisi ini membuat pihak-pihak di DPR ingin mengambil hati dan dukungan kalangan jenderal, agar militer mengambil posisi yang sama dalam pertempuran dengan Wahid.

Begitulah, ketika politik berbicara, hukum seringkali tersingkir jauh entah dimana. Dan kondisi semacam itu masih terjadi hingga saat ini, dimana tidak ada kepastian hukum terhadap kasus ini. Meski KPP Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya dan telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejaksaan, namun tetap tidak ada tanggapan. Justru dengan berbagai alasan yang berubah-ubah dan terkesan dicari-cari, beberapa kali Kejaksaan mengembalikan berkas yang diserahkan Komnas HAM.

Maka, lengkap sudah penderitaan para korban. Keadilan kian sulit diharapkan, karena tidak adanya pemihakan dari kekuasaan. Pemerintah SBY-Kalla—yang 'berkomitmen' menegakkan hukum dengan jargon pemberantasan korupsi—lupa, bahwa untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, harus diselesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hanya dengan itulah kita sebagai bangsa bisa belajar tentang apa yang harus dihormati dan apa yang harus dibasmi, apa yang mestinya dibela dan apa yang mestinya singkirkan paksa.

Harapan keluarga korban akan dibentuknya Pengadilan Ad Hoc atas kasus ini kini berhadapan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang memunculkan kekhawatiran akan menjadi lembaga impunitas (kejahatan tanpa hukuman). Namun demikian penulis ingin mengingatkan, bahwa Pengadilan Ad Hoc pun bukan jaminan jika belum didukung oleh kekuasaan yang pro keadilan dan keluarga korban. Kasus Tanjung Priok adalah buktinya, dimana Pengadilan Ad Hoc tidak sanggup menyentuh kalangan-kalangan yang paling bertanggung-jawab.

Kini, 7 tahun telah berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Belum ada penyidikan oleh kejaksaan, sehingga sulit diharapkan akan segera ada sebuah pengadilan. Kenyataan ini terkadang mengundang frustrasi, sebagaimana telah dialami oleh banyak kalangan di negeri ini. Sebut saja kenaikan BBM yang membuat makin sulitnya bertahan hidup di negeri ini. Sehingga, terkadang ada perasaan sia-sia atas apa yang dulu kami jalani.

Dulu, kami semua, anak-anak muda, tanpa kenal lelah dan sering lupa kuliah, menceburkan diri dalam gerakan penuh resiko demi cita-cita bersama: reformasi dan membangun kembali negeri ini. Namun kini, mimpi itu rasanya kian jauh pergi. Karena bukan reformasi yang kami dapati, melainkan oligarki. Bukan transformasi besar yang sedang terjadi, melainkan kerusakan besar. Sementara para korban dan keluarga korban, kian sendiri. Memperjuangkan keadilan yang entah kapan akan mereka dapatkan.

Namun, putus asa tampaknya bukan pilihan yang bijak. Sejarah telah beberapa kali berbuat kebaikan, dan kita masih punya harapan melakukan kembali. Jika bukan saat ini, mungkin nanti. Tergantung seberapa besar dan kuat kita berusaha dan memperjuangkannya. Apapun yang terjadi saat ini, kebenaran harus terus dikabarkan, dan keadilan harus terus diperjuangkan. Seperti dinyanyikan Iwan Fals, *kenyataan harus terus dikabarkan, dan orang-orang mesti dibangunkan*. Dan mari kita terus bernyanyi menjadi saksi.

## **Refleksi Mei 1998: Ketika Korban Tak Jadi Inspirasi Politik<sup>8</sup>**

Usman Hamid<sup>9</sup>

JAKARTA terbakar. Di banyak wilayah, pertokoan dijarah, dihancurkan, dan dibakar. Lalu lintas kacau, ribuan orang tewas terpenggang, dan sejumlah perempuan dilaporkan mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan. Jakarta berduka. Indonesia berduka. Bahkan, dunia pun saat itu turut berduka.

Semua terjadi begitu cepat, tanpa penjelasan mengapa aparat keamanan tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi penjelasan mengapa warga Indonesia menjadi begitu beringas; menjarah, merusak, dan membakar. Peristiwa ini menyusul terjadinya penembakan di kampus Universitas Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa. Beberapa bulan kemudian, saat mahasiswa menentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, kembali terjadi penembakan terhadap pelaku demonstrasi damai di depan kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Peristiwa ini menelan korban jiwa tidak sedikit, bahkan hampir mengarah pada bentuk kekacauan sosial seperti yang terjadi pada Mei 1998. Kini, semua peristiwa itu masih gelap. Entah sampai kapan kita harus menunggu.

Enam tahun, tentu bukan waktu yang panjang. Ia juga bukan waktu pendek jika ukurannya deretan elite di kekuasaan. Dalam enam tahun itu, secara bersama kita telah melalui empat presiden dan dua kali pemilu. Bahkan, tidak berapa lama lagi kita akan melangsungkan pemilihan presiden secara langsung, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini juga berarti kita akan sampai pada presiden kelima.

Bagi korban dan keluarganya yang penuh harap, tempo enam tahun adalah waktu yang panjang. Hanya asa yang bergelora yang mampu membuat mereka bisa menjelajahi waktu selama enam tahun. Mereka menunggu kepastian kembalinya ayah, anak, atau suami yang hilang, atau ingin tahu di mana kuburnya jika telah tewas. Atau menunggu untuk tahu siapa pelaku yang menculik dan membunuh anggota keluarganya dan mengapa malapetaka menimpa.

Waktu enam tahun juga begitu panjang bagi korban jika melihat saat ini mereka yang mestinya duduk di kursi pesakitan, bebas bergerak tanpa takut hukuman. Sebagian lain yang duduk di kursi pesakitan di hadapan majelis keadilan dan divonis juga masih bebas berkeliaran. Ada di antaranya, yang seakan menepuk dada, tanpa dosa berebut mencalonkan diri meraih kekuasaan.

---

<sup>8</sup> Tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Kompas, Kamis, 13 Mei 2004

<sup>9</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

WAKTU enam tahun terasa begitu pendek jika ukurannya adalah apa yang bisa diupayakan agar keadilan bisa dicecap korban. Sejumlah kelompok masyarakat yang bersama korban, keluarga korban, dan segenap pihak yang berempati dan bersimpati berupaya melihat waktu enam tahun itu tak bisa banyak mengubah keadaan korban dan keluarganya. Bertolak dari keadaan itu, mungkin mau tidak mau diperlukan waktu berkali lipat dari jangka enam tahun itu. Dibutuhkan berlaksa dukungan agar perubahan bisa diwujudkan. Namun, yang penting bagi kita dalam perjalanan waktu ini, merawat harapan agar ia tidak mati layu.

Sayangnya, pergantian elite dan pemimpin terasa tak berfaedah untuk menciptakan keadilan. Institusi yang bisa memberi keadilan itu sendiri tenggelam dalam lautan kolusi dan korupsi. Kini, betul-betul barisan korban seakan berlomba tiada henti untuk bertambah.

Pertanyaan yang hadir adalah mengapa deretan korban terus bertambah seakan kita sebagai bangsa seperti si pandir yang terperosok ke lubang yang sama beberapa kali? Jawabnya tak lain karena kita mungkin dipimpin elite yang pandir dalam mengurus hajat orang banyak.

Elite politik yang kerdil tentu tidak mampu menjadikan korban sebagai inspirasi dan motivasinya dalam membuat dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Mereka merasa kedudukan yang mereka peroleh seperti durian runtuh dari langit atau karena jampi-jampi dukun dan sogokan. Dalam suasana batin elite politik seperti ini, segala bentuk perubahan bertumpu dan tertuju hanya kepada bagaimana memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memperkaya pundi-pundi.

Pada titik inilah kekuasaan dan politik kehilangan etos dan etikanya. Kekuasaan dijalankan bukan ditujukan untuk kemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan klik atau gerombolan politik. Politik bukan lagi menjadi seni dalam mencari kemungkinan, tetapi hanya sekadar mengakali berbagai kemungkinan. Karena itu, politik yang menuntut tanggung jawab dan kewajiban kepada publik jadi berhenti, politik beralih makna hanya menjadi praktik jegal-menjegal untuk kepentingan jangka pendek dan sesaat.

SAYA berharap perubahan politik saat ini bukan sekadar pergantian giliran berkuasa, apalagi giliran untuk korupsi. Sebab, di tahun 1998, perubahan dituntut dan ditujukan untuk mengakhiri praktik politik yang banal seperti itu. Politik yang banal itu hampir selama 30 tahun melenyapkan keadilan di negeri ini. Mambang malapetaka kemanusiaan yang terulang dalam lima tahun reformasi ini terjadi, tak lain dan tak bukan, karena korban tidak lagi menjadi cermin dan inspirasi bagi elite politik.

Jika kini para punggawa, kacung, bahkan antek Orde Baru berani terbuka menyatakan hendak masuk kembali ke kancah politik, tak lain merupakan buah pahit kegagalan rezim saat ini dalam memutus rantai kuasa masa lalu.

Rezim baru ternyata bukan kereta kencana yang akan membawa keadilan ke haribaan korban dan menjadikan korban sebagai inspirasi dan motivasi praktik politik.

Di sini, jalan menuju keadilan bagi korban ditegaskan kembali sebagai jalan panjang menggapai keadilan penuh liku dan onak duri. Jalan yang telah diretas dalam waktu enam tahun baru merupakan tapak langkah awal sebuah perjalanan panjang. Dalam menapaki jalan panjang yang melelahkan dan penuh rintangan, korban tentu tidak bisa sendirian. Penting kiranya kita terus menata barisan dan berbagi peran dalam perjalanan itu agar kita bisa berbagi rasa dan berbagi kritik untuk saling mengingatkan.

Refleksi ini tidak ditujukan untuk memperingati mundurnya Soeharto, tetapi lebih ingin memaknainya sebagai refleksi keprihatinan. Keprihatinan karena belum banyak yang bisa diperbuat untuk mengubah keadaan, apalagi menciptakan keadilan bagi korban. Sekaligus upaya untuk saling memperteguh pendirian dan mempererat jabat tangan dalam berikhtiar.

Refleksi ini juga tidak bermaksud mengabaikan kemenangan-kemenangan kecil yang telah diraih, tetapi coba memaknai kemenangan itu sebagai tantangan yang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Tanpa komitmen semua komponen bangsa, termasuk pemimpin baru, aneka perubahan takkan berarti dan mungkin takkan pernah berarti apa-apa.

## **Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian**

### **12 Mei 1998**

Peristiwa Trisakti. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut perubahan akan pemerintahan yang demokratis dan reformasi total. Empat orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie, tewas ditembak aparat. Korban luka-luka sebanyak 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

### **8 - 14 November 1998**

Peristiwa Semanggi I. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyso dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.

### **24 September 1999**

Peristiwa Semanggi II. Mahasiswa berdemonstrasi merespon rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat otoriter tak jauh dari UU Subversif. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang. Represifitas aparat juga diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, tiga orang mahasiswa diantaranya, yaitu Yusuf Rizal (mahasiswa Bandar Lampung) dan Saidatul Fitira (mahasiswa di Lampung) serta Meyer Ardiansah (mahasiswa IBA Palembang).

---

### **6-Juni-1998**

Pengadilan militer untuk kasus Trisakti dimulai di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Heryanto dan Letda Polisi Pariyo.

### **10-Februari-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Puspom TNI- Danpuspom tidak bisa menerima, dengan alasan sedang tidak ada ditempat.

### **15-Februari-1999**

Puspom TNI mengeluarkan keterangan pers berkenaan dengan kasus Semanggi I, yaitu bahwa mahasiswa tidak bersedia memberikan kesaksian. Peluru yang sudah diuji balistik belum ada yang identik dengan senjata aparat jenis SS-1

dan M-16. Belum diketahui siapa pelaku penembakan baik dari ciri-ciri maupun tanda-tandanya. PANGAB menyatakan bahwa ada peluru yang bukan standar ABRI.

#### **4-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke F-ABRI DPR RI, yang diterima Mayjen TNI Siregar, Laksad dalam sinuraya, Kol. Djawijaya (kowad). F-ABRI menyatakan desakan pengusutan kasus Semanggi akan disampaikan kepada pimpinan fraksi ABRI DPR RI

#### **15-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan dan Soegiri. Komnas HAM menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus semanggi.

#### **29-Maret-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya, Danpomdam Jaya tidak bersedia menerima dengan alasan kontraS bukan lembaga pengacara. hanya diterima Kep.Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor CPM Ir. YW. Wempi Hapan, MSc, eng. yang menyampaikan bahwa kasus Semanggi belum bisa diungkap karena keterangan saksi baru dari pihak tentara, sedangkan keterangan dari pihak sipil belum memadai. Untuk itu keluarga korban diminta bersabar menunggu penjelasan Panglima TNI

#### **31-Maret-1999**

Enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2-10 bulan.

#### **Mei-1999**

Uji balistik di Kanada. Diketahui bahwa jenis senjata yang ditembakkan proyektil peluru dalam peristiwa penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi 1998 berasal dari senjata yang dimiliki TNI.

#### **14-Mei-1999**

Aksi long march ke Istana Merdeka untuk kasus Semanggi I, menuntut penuntasan kasus dan tanggungjawab pemerintah

#### **10-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Dephankam. Delegasi hanya diterima oleh Kasubag Audio Visual Humas, letkol Oma Rubama. Delegasi memilih untuk tidak mengadakan dialog karena Menhankam tidak mau menerima secara langsung.

#### **22-Juli-1999**

Aksi kasus Semanggi I ke Puspom TNI, menuntut Kapuspom melakukan penyelidikan.



**16-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke F-PPP DPR-RI. Diterima oleh pimpinan fraksi PPP, Zarkasih Nur. PPP menyatakan akan merekomendasikan pemerintah untuk mengusut kasus TSS.

**29-Juli-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya. Danpomdam tidak bisa menerima dengan alasan mengikuti rapat di Polda, untuk mempersiapkan acara peringatan 17 Agustus. Kep. Bag. Penyidik Pomdam Jaya, Mayor (CPM) Ir. YW. Wenpi Hapan, Msc, menyatakan kasus Semanggi belum bisa disidangkan karena alat bukti belum cukup. Selanjutnya keluarga korban diusir keluar gedung/balai pertemuan.

**4-Agustus-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke DPP-PKB diterima ketua umum DPP-PKB, Matori Abd Jalil. PKB menyatakan akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**5-Agustus-1999**

Audiensi kasus Semanggi I ke Pomdam Jaya diterima Danpomdam Jaya, Kol (CPM) Mungkono. Danpomdam Jaya menyatakan peluru yang mengenai para korban sudah dilakukan uji balistik, tetapi tidak bisa lagi diidentifikasi karena mantel-peluru tersebut sudah rusak.

**6-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PAN diterima Sekjen DPP PAN, Faisal Basri. PAN berjanji akan memperjuangkan pengusutan kasus Semanggi.

**16-Agustus-1999**

Audiensi ke DPP PDI Perjuangan diterima Dimiyati Hartono. PDIP menjanjikan akan memperjuangkan pengusutan kasus semanggi.

**19-Agustus-1999**

Audiensi ke Kantor perwakilan PBB untuk HAM (UNHCR) di Jakarta, diterima kepala kantor UNHCR Sam S. Souryal. UNHCR berjanji akan mengirim rekomendasi penuntasan kasus Semanggi ke instansi terkait, dan mendesak pemerintah RI untuk mengusut kasus Semanggi.

**15-September-1999**

Aksi damai kasus Semanggi I ke Dephankam, dihambat oleh aparat di Jl Thamrin, dekat Mc. Donald-pasar Sarinah. Aparat merepresi massa aksi, dengan penganiayaan dan penembakan dengan peluru karet.

**13-Oktober-1999**

Audiensi ke fraksi Utusan Golongan MPR RI diterima ketua fraksi utusan golongan MPR RI Marzuki Usman, Ny, Gedong Oka, Djoko Wijono. Mereka berjanji akan berusaha mengangkat kasus Semanggi dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999.

### **15 Oktober-1999**

Panglima TNI memerintahkan TNI untuk menuntaskan kasus TSS.

### **25-November-1999**

Siaran pers bersama, mendesak Presiden RI, Bapak K.H. Abdurrahman Wahid untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan semua kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa. Secara khusus, mendesak dibentuknya pengadilan HAM atau Pansus DPR bagi kasus-kasus kekerasan mahasiswa dan segera memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan tersebut.

### **2-Desember-1999**

Rektor Usakti membentuk Tim Penuntasan Kasus 12 Mei melalui surat keputusan No.343/USAKTI/SKR/XII/1999. dengan tujuan menyeret para pelaku ke Pengadilan.

Tim menulis surat ke Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Laksmana Widodo A.S yang intinya mendesak Puspom TNI melanjutkan seluruh proses hukum pengungkapan kasus Trisakti.

### **28-Desember-1999**

Kasum TNI Laksamana Muda TNI Yoost F. Mengko menjawab surat Tim Trisakti, menjelaskan bahwa Panglima TNI tidak tinggal diam dan bahwa sejak 15 Oktober 1999 telah memerintahkan TNI untuk menuntaskan kasus TSS

### **31-Desember-1999**

Kasum TNI letjen. Suaidi Marabessy menulis surat kepada Kapolri No. B/2678-01/03/06/SRT meminta Kapolri mendukung kelancaran penyelesaian kasus, dengan memerintahkan kepada Kapuslabor Mabes TNI agar menyerahkan anak peluru pembeding kepada penyidik Puspom TNI. Dan meminjamkan alat mikroskop pembeding. dengan adanya surat tersebut, Kapolri baru mau menyerahkan peluru pembeding ke Puspom TNI

### **17-Februari-2000**

Penyerahan barang bukti di Puslabfor disaksikan Kol. CPM Hendarji dan para anggota tim. Jada selisih jumlah barang bukti, jumlah tertulis 46 buah, namun yang ada hanya 40 buah. Setelah dibuatkan berita acara hilang barang bukti dan ancaman praperadilan . tidak lama kemudian barang bukti 6 buah peluru pembeding yang semula “hilang” ada di tempatnya kembali.

Pihak Polri masih tidak percaya sepenuhnya kepada penyidik, mereka meminta ikut ke Belfast dan tidak menyerahkan saja sepenuhnya ke penyidik.

### **20-Februari-2000**

Barang bukti penembakan (peluru dan senjata) dibawa ke Belfast (Inggris) untuk diuji oleh lembaga kepolisian Inggris yang memiliki Laboratorium IBIS yang menggunakan alat *Leica DMC Comparison Microscope*

### **22-Februari-2000**

Audiensi ke Komnas HAM diterima oleh Asmara Nababan, BN Marbun. Keduanya menyatakan usulan pembentukan KPP HAM kasus Semanggi akan dibicarakan pada rapat pleno komnas HAM (29/2)

### **24-Februari- 2000**

Garry Elliott Montgomery selaku *Forensic Scientist* melaporkan hasil uji balistik di Belfast. Pada intinya dari isi dapat dipastikan bahwa anak peluru yang dijadikan barang bukti ditembakkan dari senjata larang panjang SS1 dan Steyr.

### **7-Maret-2000**

Pertemuan Tim 12 Mei dengan Kapolri, meminta Kapolri membantu penuntasan kasus Trisakti dan tidak melindungi anak buahnya yang terlibat. Kapolri berjanji akan memenuhi permintaan tim. Aksi damai ke Istana Merdeka untuk menjumpai Presiden, tetapi tidak berhasil.

### **13-Maret-2000**

Pertemuan tim 12 Mei dengan Danpuspom Mayjen. TNI Djasri Marin. Disampaikan tentang kendala yang dihadapi Puspom TNI, berkenaan dengan sikap Polri yang setengah hati terhadap Puspom TNI

### **14-Maret-2000**

Aksi damai ke Istana Merdeka untuk menjumpai Presiden, namun pihak istana tidak bersedia menerima.

### **3-April-2000**

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-PKB, F-PPP, dan F-Reformasi guna meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Arthur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

### **10-April-2000**

Puspom TNI menyatakan bahwa perkara penembakan mahasiswa Trisakti sudah akan bisa disidangkan sebelum tanggal 12 Mei 2000

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-TNI meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Arthur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

### **19-April-2000**

Tim 12 Mei mengadakan pertemuan dengan F-PDIP, F-Golkar, diterima Akbar Tanjung untuk meminta bantuan DPR untuk memanggil para aktor intelektual

dibalik peristiwa 12 Mei, seperti Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, mantan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata, dan Atrhur Damanik, selaku perwira yang saat peristiwa berada di lapangan. Fraksi-fraksi tersebut setuju untuk membentuk PANJA setelah reses

#### **4-Mei-2000**

Audiensi ke fraksi PDI-P diterima Paulus Widiyanto, Panda Nababan, Firman Jaya Deli. F-PDI-P berjanji akan meminta Danpuspom TNI datang ke DPR untuk menjelaskan perkembangan kasus Semanggi. Jika TNI tidak memenuhi undangan, fraksi PDI-P akan menandatangani Puspom TNI. akan memfasilitasi pertemuan antara panglima TNI dan Danpuspom TNI dengan keluarga korban (Trisakti dan Semanggi). Dan PDI-P akan berupaya kasus semanggi diangkat dalam rapat-rapat di DPR.

#### **4- Mei-2000**

Tim 12 Mei mengadakan seminar tentang Pusat Laboratorium forensik yang mandiri dan Obyektif, perbandingan dengan laboratorium forensik di luar negeri.

#### **13-Juni-2000**

Monitoring rapat kerja komisi I dan II DPR RI dengan Kapolri dan Panglima TNI DPR RI. Panda nababan, Teras Narang, dan Firman Jaya Daeli Fraksi PDI-P mengangkat kasus Semanggi. Dan Polri menyatakan sudah menyelesaikan tugasnya dalam memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Pomdam Jaya, sehingga penanganan kasus semanggi I dan II kini menjadi tanggung jawab Puspom/Pomdam Jaya

#### **16-Juni-2000**

Audiensi ke Polda Metro Jaya diterima Kaditserse Polda Metro Jaya, Kol. Pol. Alex Bambang Riatmojo. Disampaikan bahwa: l. laporan hasil penyidikan kasus semanggi II sudah dilaporkan Polri ke Pomdam Jaya, dan siapa nama penembaknya sudah dapat diketahui dari hasil penyidikan tersebut. Sedangkan perkembangan kasus Semanggi I tidak banyak diketahui karena ditangani Kaditserse yang terdahulu.

#### **6-Juli-2000**

Audiensi keFraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI diterima Drs. Ali Masykur Musa, (Wakil ketua fraksi PKB), dan Drs Susono Yusuf (Wakil sekretaris). F PKB menyatakan akan segera menulis surat kepada Panglima TNI, dan Puspom TNI serta Kapolri untuk menanyakan perkembangan pengusutan kasus semanggi I dan II.

#### **13-Juli-2000**

Audiensi Ketua MPR RI diiterima Dr Amin Rais. Ketua MPR berjanji akan bersama-sama dengan keluarga korban peristiwa semanggi I dan II, dan peristiwa Mei 98, akan mendatangi pihak-pihak yang terkait ; Presiden, Menhankam, dan Panglima TNI.

### **6-Februari 2001**

Dalam RDPU DPR RI, Pansus mengundang korban Trisakti, Semanggi I untuk memberikan masukan yang akan dipakai untuk materi pembahasan TSS di Pansus.

### **9-Juli-2001**

Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutarjodjo Surjoguritno. Isi laporan : 1. F-PDI P, F PDKB, F PKB (3 fraksi ) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II terjadi unsur pelanggaran HAM Berat. Sedangkan F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7 fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

### **13-Juli-2001**

Audiensi danaks i ke Komnas HAM di terima Mohammad Salim dan Soegiri. Menuntut kesungguhan Komnas HAM dalam melakukan penuntasan kasus TSS.

### **18-Juli-2001**

Audiensi ke Istana Presiden, diterima Presiden Abdul Rahman Wahid. Presiden menyatakan Pernyataan: 1.Status pengadilan tragedi Trisakti, Semanggi I dan II seharusnya menjadi kewenangan kejaksaan Agung, sehingga penuntasan kasus TSS bisa diteruskan sampai ke proses banding di pengadilan tinggi, dan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. 2.harus dipisahkan antara TNI/Polri sebagai institusi dengan dan pribadi-pribadi yang bersalah. 3. Presiden berjanji akan mempelajari kasus Trisakti, semanggi I dan II bersama anggota kabinet dan Jaksa Agung. 4. keluarga korban diharapkan untuk tidak berhenti memperjuangkan keadilan.

### **30 Juli 2001**

KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II dibentuk oleh Komnas HAM

### **4-September- 2001**

Audiensi ke Mahkamah Agung diterima M Taufiq (Wakil Ket MA), Laica Marzuki (Hakim Agung), Said Harahap, Abdul Rahman Saleh, Mugihardjo (Direktur Pidana), Girman Hudiarjo (ket Muda Urusan Militer. Dinyatakan bahwa rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan II DPR RI tidak berketentuan hukum. Karena Rokemendasi bukan bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa di uji oleh MA.

### **7-September-2001**

Audiensi ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM Merespon rekomendasi pansus Trisakti, semanggi I dan II DPR RI yang menyatakan tidak ada pelanggaran M berat pada kasus TSS.

### **5 Oktober 2001**

Temuan awal KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Pelanggaran HAM terjadi berupa pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan seksual.

### **13-November-2001**

Audiensin ke Komnas HAM, diterima pimpinan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II: Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, menanyakan perkembangan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

### **Januari 2002**

Sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dihukum 3-6 tahun penjara.

### **23-Januari-2002**

Audiensi ke Kantor Perwakilan PBB meminta dorongan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan mensosialisasikan kasus T di tingkat Internasional. Perwakilan PBB di Jakarta menyatakan bahwa pernyataan sikap AKKRA (aliansi korban kekerasan Negara) akan dikirim ke PBB.

### **13 Februari 2002**

Audiensi ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat, diterima Rudy As'ad (Wakil Ketua) dan Andi Samsam Nganro (Humas), meminta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil keputusan sesuai hukum dan rasa keadilan, serta tidak mudah patah ditengah jalan karena tekanan TNI/ Polri, terkait tindakan Mabes TNI/Polri telah mengajukan surat keberatan atas permohonan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II untuk melakukan upaya pemanggilan paksa para jendral. Dan pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menghadapi kesulitan dalam memutuskan permintaan bantuan KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II, karena ketua pengadilan sedang melakukan ibadah Haji. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rusky As'ad meminta KPP Trisakti Semanggi melengkapi berkas pemanggilan sub poena (pemanggilan paksa) terhadap sejumlah jenderal dan perwira TNI/Polri yang menolak panggilan KPP HAM.

### **20-Februari-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diiterima Djoko Sugianto (ketua Komnas HAM). Joko menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan tindakan proses hukum dengan meminta bantuan ke kejakung untuk mendapatkan dokumen dari TNI/Polri dan pengadilan negeri jakarta pusat untuk memanggil paksa para jendral TNI/Polri

### **21-Februari-2002**

Mengajukan somasi kepada presiden, karena presiden tidak mendukung pengusutan dan penyelesaian kasus Trisakti, semanggi I dan II.

Aktivis mahasiswa 98 mengadakan konfrensi pers didepan keluarga korban untuk klarifikasi adanya oknum-oknum mahasiswa yang mencatut nama dan memalsukan tanda tangan beberapa mahasiswa dengan mengatasnamakan gerakan eksponen 98 yang menentang dibentuknya KPP HAM Trisakti, semanggi I dan II.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui keabsahan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II yang selama ini menjadi pro kontra.

### **27 Februari 2002**

Rapat Pleno Komnas HAM menyetujui perpanjangan masa tugas KPP HAM TSS yang berakhir 28 Februari 2002, selama sebulan. Bila dalam tenggat waktu perpanjangan itu KPP HAM tidak juga mampu memanggil para jenderal TNI/Polri untuk bersaksi, Komnas HAM akan mengambil alih seluruh tugas KPP.

### **11-Maret-2002**

Audiensi ke Ke Komnas HAM diterima pimpinan KPP HAM TSS Dr Albert Hasibuan dan Usman Hamid, disampaikan bahwa pemanggilan terhadap Jendral Purn Wiranto untuk memberikan keterangan kepada KPP, jam 10.00, tetapi s.d. jam 11.30 Wiranto belum juga memenuhi undangan.

Keluarga korban bersilaturahmi ke rumah jend. Wiranto sesuai alamat surat pemanggilan KPP HAM untuk mengingatkan bahwa Wiranto ditunggu kedatangannya di komnas HAM. Surat dan setangkai bunga untuk Wiranto disampaikan melalui Suharlan (ajudan)

### **21 Maret 2002**

KPP HAM TSS menyimpulkan 50 perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Selain itu, dalam tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan, yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakat sipil.

### **22 April 2002**

Rapat pleno Komnas HAM memutuskan laporan akhir KPP HAM TSS ke Kejaksaan Agung.

### **21 Mei 2002**

Pengembalian berkas pertama. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan 1). BAP Komnas HAM atas tiga kasus hanya berupa transkrip wawancara. 2) Mempertanyakan sumpah jabatan penyelidik.

Komnas HAM menyatakan : 1). Pengakuan keterangan hanya berupa wawancara karena fungsi penyelidikan memang tidak mewajibkan untuk membuat berita acara seperti yang dibuat di kepolisian. 2) Fungsi penyelidik KPP HAM sama dengan penyelidik polisi sehingga tidak harus disumpah. Tugas KPP HAM adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan.

### **23 Mei 2002**

Komnas HAM mengembalikan berkas sesuai pasal 20 ayat 3 UU tentang Pengadilan HAM. Berkas diterima oleh Sekretariat HAM Ad hoc Kejaksaan

Agung yang diterima oleh Umar Bawazier, Barman Zahir dan Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

### **12-September-2002**

Audiensi ke Komnas HAM diterima Garuda Nusantara, Djuwaldi dan Hasto Atmojo. Komnas menyatakan bahwa posisi Komnas berhadapan dengan DPR dan Kejaksaan Agung yang tidak mendukung hasil penyelidikan kasus trisakti, semanggi I dan II.

### **13 Agustus 2002**

Pengembalian berkas kedua. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM melalui surat bernomor R-177/1/HAM/08/2002 dengan alasan belum lengkapnya berkas serta : 1). Penyelidik yang tidak disumpah. 2). Telah adanya pengadilan militer kasus Trisakti dan Semanggi II.

### **3 September 2002**

Komnas HAM memutuskan untuk tidak memperbaiki kembali semua berkas yang dikembalikan, dengan alasan : 1). Dalam UU Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyelidik. 2). Penyelidik Jaksa Agung harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak panggilan Komnas HAM. 3. Kasus ini bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM sesuai wewenangnya.

### **13 September 2003**

Pengembalian berkas ketiga. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM.

### **22 September 2002**

Menurut Kapuspenkum Barman Zahir, Kejaksaan Agung akan meneliti kembali dan memperdalam hasil penyelidikan KPP HAM TSS. Penyempurnaan diketuai oleh BR Pangaribuan dan akan melibatkan tim KPP HAM.

### **30 Oktober 2002**

Pengembalian berkas keempat. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM bernomor R751/F/FE.2/10/2002 yang berisi penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Surat ditandatangani oleh Jam Pidsus, Haryadi Widyasa.

### **20-Desember -2002**

Orasi di Tugu Proklamasi, dan testimoni penembakan Irmawan (wawan) dalam kegiatan peringatan hari HAM.

### **11 Maret 2003**

Kejaksaan Agung menolak melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti Semanggi I dan II karena tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali (prinsip ne bis in idem). BR Pangaribuan, Ketua Satgas Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke



pengadilan. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa prinsip *ne bis in idem* tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utamanya belum diadili.

#### **14 Maret 2003**

Siaran pers bersama, merespon sikap Jaksa Agung yang menolak menyidik kasus Trisakti - Semanggi. Keluarga korban menganggap hal ini merupakan ancaman serius bagi penegakan HAM.

#### **19 Maret 2003**

Komnas HAM mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, meminta pimpinan DPR meninjau kembali putusan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Tim penyelidik Komnas HAM menemukan adanya sejumlah bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran HAM berat.

#### **8 Juni 2003**

Dimulainya Mahkamah Militer untuk kasus Semanggi II. Mahkamah Militer mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, anggota Yon Armed Kostrad yang menjadi terdakwa penembak Yap Yun Hap. Ia didakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan tewasnya orang lain.

#### **19 Juni 2003**

Siaran Pers bersama Korban Trisakti-Semanggi I dan II, AKKRA, TPK 12 Mei, Kompak, Truk dan Kontras menuntut agar (1). Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II, (2). DPR RI untuk mencabut rekomendasi pansus Trisakti, Semanggi I dan II, (3). Menolak pengadilan militer atas peristiwa Semanggi II.

#### **8 Juli 2003**

Audiensi dengan Pimpinan DPR. Diterima oleh Ir Akbar Tanjung, Akil Muhtar, Baharudin Aritonang dan Agung Gunanjar. DPR menyatakan akan mengadakan rapat kerja gabungan antara komisi III-Kejaksaan Agung- Komnas HAM untuk membahas masalah rekomendasi DPR tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

#### **11 September 2003**

Audiensi dengan pihak Komnas HAM, yang diwakili oleh Zoemrotin. Ia bersedia untuk menanyakan kelanjutan kerja DPR dalam meninjau ulang rekomendasinya.

#### **27 Oktober 2003**

Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim G Nusantara bertemu dengan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung. Komnas HAM meminta DPR untuk mengkaji putusan kasus Trisakti Semanggi I dan II. DPR bersedia mengkaji ulang putusannya. Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung, BR. Pangaribuan menyambut baik hal ini dan siap melakukan penyidikan jika DPR telah mencabut rekomendasi Pansus 2001.

### **19 November 2003**

Diundang pansus RUU KKR DPR RI untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Korban Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Mei 98, Talangsari, IKOHI, Tanjung Priok, 65 menolak RUU KKR, karena : (1). Substansi RUU mengarah kepada pemberian impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM, (2). Anggota DPR RI periode 1999-2004 adalah mesin politik orde baru yang tidak mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

### **12 Januari 2004**

Rapat pimpinan DPR RI memutuskan untuk mengkaji dan mempelajari permintaan Ketua Komnas HAM. Pimpinan DPR meminta Komisi II untuk memeriksa kembali status hukum kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

### **14 Januari 2004**

DPR RI memberikan surat kepada Komnas HAM yang menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menugaskan Komisi II untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut surat Komnas HAM berkenaan dengan penyelesaian kasus Trisakti Semanggi I dan II.

### **5 Februari 2004**

Siaran pers bersama, mendesak DPR untuk segera memberikan rekomendasi baru untuk terhadap kasus TSS sebagai bentuk tanggung jawab moralnya untuk mendukung *good governance* aparaturnya penegak hukum dan supremasi hukum itu sendiri serta Kejaksaan Agung juga harus bersikap pro aktif mendesak DPR untuk mengubah rekomendasinya.

### **14 Maret 2004**

Kejaksaan Agung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengatakan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat.

### **1-15 April 2004**

Tim Penuntasan Kasus 12 Mei 1998 mengirimkan wakilnya untuk mensosialisasikan kasus pada sidang Tahunan PBB. Terjadi kesepakatan dengan *Special Rapporteur* PBB untuk memberikan peringatan terhadap Pemerintah Indonesia, yang direalisasikan kemudian dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tekanan beberapa lembaga dan negara terhadap Indonesia.

### **12 Mei 2004**

Peringatan peristiwa Trisakti. Aksi ke Istana negara dan DPR.

### **25 Mei 2004**

Aksi mahasiswa Trisakti dan keluarga korban menginap di Kejaksaan Agung. Mahasiswa Trisakti mendesak Jaksa Agung, MA Rahman untuk memberi kepastian penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

**26 Mei 2004.**

Kapuspenkum Yahya Harahap dan Direktur Penanganan HAM I Ketut Murtika menerima aksi mahasiswa dan keluarga korban.

**23 September 2004**

Peringatan Semanggi II. Aksi longmarch dan tabur bunga di Atma Jaya dan Bundaran HI.

**26 September 2004**

Peringatan Semanggi II. Ziarah makam Yun Hap di Pondok Rangun.

**26 Oktober 2004**

Audiensi Kejaksaan Agung, mendesak Jaksa Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti Semanggi I dan II. Diterima oleh Soehandoyo (Kapuspenkum) dan I Ketut Murtika (Direktur Penanganan Berat HAM) yang menyatakan bahwa hambatan terletak pada persoalan teknis politis.

**8 November 2004**

Peringatan Semanggi I. Ziarah makam Sigit Prasetyo

**10 November 2004**

Peringatan Semanggi I. Ziarah makam BR Norma Irmawan.  
Aksi ke Kejaksaan Agung, mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

**14 Desember 2004**

Komnas HAM menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali kasus ini disertai dokumen-dokumen hasil penyelidikan kepada DPR.

**29 Desember 2004**

Audiensi Kejaksaan Agung, mendesak Jaksa Agung membentuk tim penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Diterima oleh Abdurahman Saleh (Jaksa Agung), Soehandoyo (Kapuspenkum) dan I Ketut Murtika (Direktur Penanganan Berat HAM). Jaksa Agung mengusulkan kepada korban untuk melakukan audiensi dengan DPR dan mengamendemen UU No. 26 tahun 2000 serta meminta pencabutan hasil Pansus DPR 2001 yang menyebutkan tidak adanya pelanggaran HAM berat kasus ini.

**25 Januari 2005**

Audiensi dengan DPR RI, mendesak DPR untuk mengambil peran berkaitan dengan terhambatnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus TSS. Diterima oleh Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuan, Arbaba Paperweka, Mahfudz MD, Trimedya Panjaitan. Komisi III sedang membuat tim penelitian atas kasus-kasus yang terhambat di Kejaksaan Agung dan akan mencabut rekomendasi tersebut DPR tersebut.

### **29 Januari 2005**

Audiensi dengan Kejaksaan Agung, mempertanyakan kinerja penyidik Trisakti Semanggi I dan II pada masa 100 hari pemerintahan SBY - JK. Diterima oleh I Ketut Murtika, Direktur Penanganan HAM berat yang menjelaskan bahwa dalam laporan program 100 harinya, Jaksa Agung hanya melaksanakan penelitian atas berkas Mei dan Trisakti, Semanggi I dan II dan mengembalikannya ke Komnas HAM dengan alasan belum lengkap (disertai petunjuk).

### **7 Februari 2005**

Rapat Kerja DPR dan Jaksa Agung. Keluarga korban mendesak agar kedua belah pihak segera merealisasikan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus ini. termasuk menyelesaikan semua permasalahan hukum yang berkembang agar segera terbuka kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban.

### **12 Mei 2005**

Peringatan Trisakti. Audiensi dengan Komisi III DPR RI.

### **1 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Meminta F PKS untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS serta merekomendasikan kepada Presiden bagi pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Muzamil Yusuf dan Ustad Anwar yang menyatakan bahwa Fraksi PKS akan menyuarakan kasus TSS merupakan pelanggaran HAM Berat dan akan mengusulkan pencabutan rekomendasi Pansus DPR periode yang lalu. F PKS menjanjikan target pencabutan dilakukan pada bulan Juni.

### **6 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta F PDIP untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PDIP merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima oleh Jakobus, Gayus Lumbuan dan Meliala Sembiring yang menyatakan bahwa PDIP akan tetap konsisten mendukung kasus TSS sebagai pelanggaran Berat HAM pada Pansus 2001 serta akan mencabut rekomendasi Pansus DPR periode lalu dan mendukung penyelesaian kasus TSS melalui pengadilan HAM.

### **10 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meminta F PPP untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PPP dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima oleh Hafid Maksam, Hifin Syarkawi, Maysasak Johan dan Johan Mahya yang menyatakan bahwa F PPP mendukung pencabutan rekomendasi pansus DPR RI periode 1999 - 2004 untuk kasus TSS.

### **10 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Golkar, meminta F Golkar untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F Golkar merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Akil Mukhtar yang menyetujui hasil laporan KPP HAM TSS dan akan membawa kasus ini ke Komisi III untuk mencabut rekomendasi pansus.

### **15 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Amanat Nasional, meminta F PAN untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PAN merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Hj. Azlaini Agus yang menerima korban menyatakan bahwa F PAN membutuhkan waktu untuk mengkaji kasus TSS dan akan membawa lewat mekanisme Pansus. Namun sorenya, pernyataan Azlaini Agus dianulir oleh Arbab yang menyatakan bahwa sikap F PAN mendukung pencabutan rekomendasi Pansus.

### **20 Juni 2005**

Audiensi ke Fraksi Partai Kesatuan Bangsa, yang meminta F PKB untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan meminta F PKB dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Masduki Baidlowi, Drs. H. Saifullah Ma'sum dan Badriyah yang menerima korban menyatakan bahwa PKB tetap pada sikap awal, dengan menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS. F PKB akan membahas hal ini dalam rapat komisi dan forum lintas fraksi.

### **23 Juni 2005**

Audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat, yang meminta F Partai Demokrat untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 tentang tidak adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS dan merekomendasikan kepada Presiden untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. Diterima Sutaji dan Ziki Wahab yang akan menyampaikan hal ini dalam rapat fraksi.

### **27 Juni 2005**

Fraksi F PDIP (109 kursi), F PPP (57 kursi), F PKB (52 kursi), F PAN (53 kursi) dan F PDS (13 kursi) telah menyerahkan pandangan fraksi ke Komisi III DPR RI, yang meminta rekomendasi DPR ditinjau ulang.

### **28 Juni 2006**

Keluarga korban Trisakti, Rektor Usakti dan Presma Usakti melakukan audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden meminta proses penegakan kasus ini dilakukan secara cermat, bijak, adil dan terlepas dari persoalan politik. Presiden meminta rakyat untuk melihat kasus ini lebih jernih dan meletakkannya dalam konteks sejarah bangsa.

### **30 Juni 2005**

Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti Semanggi I dan II dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat paripurna DPR RI, 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari Fraksi-fraksi di DPR, yaitu F PKS, F PDIP dan F PDS.

### **5 Juli 2006**

Tidak ada pembahasan hasil kajian Komisi III dalam rapat paripurna, karena belum dibahas dalam rapat pimpinan.

### **6 Juli 2005**

Rapat Pimpinan DPR gagal mengagendakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat. Padahal beberapa hari sebelumnya di tingkat Komisi III DPR telah bersepakat untuk membatalkan rekomendasi tersebut.

### **8 Juli 2005**

Aksi damai di depan gedung Nusantara II DPR RI sambil membentangkan spanduk, meminta anggota DPR untuk konsisten mencabut rekomendasi Pansus DPR RI serta membagi-bagikan selebaran dan press release kepada anggota DPR RI yang keluar atau memasuki rapat penutupan paripurna.

### **12 Juli 2005**

Audiensi ke Komnas HAM, yang diterima oleh Abdul Hakim G Nusantara. Ia menyatakan bahwa dalam 4 kali Rapat Dengar Pendapat Umum Komnas HAM dengan Komisi III DPR, Komnas HAM meminta DPR untuk membuat tim untuk mengaudit kerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk kasus TSS, Mei dan Tanjung Priok. Namun hingga saat ini belum ada respon.

### **31 Juli 2005**

Komisi III DPR RI (Hukum dan HAM) merekomendasikan agar kasus TSS dibuka lagi.

### **15 Agustus 2005**

Keluarga Korban Trisakti menerima Penghargaan Pejuang Reformasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan Keputusan Presiden No. 057/TK/2005.

### **18 Agustus 2005**

Diskusi Publik “Mengurai Benang Kusut kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II”. Pembicara terdiri dari I Ketut Murtika dan Situmeang dari Kejaksaan Agung, Benni K Harman dari DPR RI dan Usman Hamid dari KontraS.

### **14 September 2005**

Audiensi dengan Ketua DPR RI untuk, meminta DPR RI segera mencabut rekomendasi Pansus DPR RI terhadap kasus TSS melalui rapat paripurna dan meminta Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan Komnas HAM. Ketua DPR

menyatakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 22 September 2005 akan mengagendakan kasus Trisakti dan Semanggi I dan II.

**18 september 2005**

Peringatan Semanggi II. Ziarah ke makam Yap Yun Hap di Pondok Rangun.

**20 September 2005**

Peringatan Semanggi II di FISIP UI dengan pembicara Papang Hidayat (Kontras) dan Ibu Ho Kim Ngo.

**23 September 2005**

Peringatan Semanggi II. Diskusi Publik di Jaringan Relawan Kemanusiaan. Pembicara Fadjoel Rahman (Calon anggota KKR), Budiman Tanuredja (Kompas), dan Firman Jaya Daeli (PDIP).

**24 September 2005**

Peringatan Semanggi II. Aksi massa dan happening art di HI ke Atmajaya. Aksi mendesak DPR agar tidak melakukan kebohongan publik, segera mencabut rekomendasi kasus TSS serta mendesak Presiden membentuk Kepres untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc.

**11 Januari 2006**

Menyurati Ketua DPR HR Agung Laksono, mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan pembahasan Penuntasan Kasus TSS pada sidang Paripurna DPR tanggal 12 Januari 2006, guna pencabutan rekomendasi Pansus DPR TSS masa jabatan 1999-2004 serta meminta Jaksa Agung DPR RI segera melakukan penyidikan atas kasus TSS. Ketua DPR berjanji akan membahas kasus Trisakti di BAMUS pada hari 19 Januari 2006.

**12 Januari 2006**

Menyebarkan statement dan DVD “Perjuangan Tanpa Ahir kepada” kepada wartawan dan anggota dewan di Gedung DPR pada masa pembukaan sidang ke III DPR. Meminta DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR masa jabatan 1999-2004 dan menuntut DPR membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian TSS. Dalam Rapat Paripurna, Nursyahbani Katjasungkana (Komisi III) dan Almuzammil Yusuf (F-PKS) mendesak Ketua DPR membuka lagi Kasus Trisakti Trisakti dan Semanggi I-II. Ketua DPR Agung Laksono Berjanji Lagi akan bahas kasus TSS Trisakti di Bamus 19 Januari

**16 Januari 2006**

Menyurati ketua DPR RI Agung Laksono. mendesak Ketua DPR untuk memenuhi janjinya pada rapat Paripurna 12 Januari untuk mengagendakan kasus TSS pada rapat BAMUS 19 Januari 2006.

**18 Januari 2006**

Menyurati pimpinan-pimpinan fraksi Golkar, F-PDI, F-PPP, F-Demokrat, F-Bintang Pelopor, F-PKB, F-PAN, F-PKS, F-Bintang Reformasi. mendesak

pembahasan Agenda TSS pada rapat BAMUS dan pencabutan rekoemndasi Pansus DPR 2001.

Fahri Hamzah (Wakil ketua Fraksi PKS) : *F PKS tidak setuju kasus tragedi Trisakti Semanggi dibahas di DPR. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tak dilakukan secara parsial. Sebaiknya diselesaikan lewat KKR.*

Nadrah Izahari (Anggota Komisi Fraksi PDIP) : *Fraksi PDI perjuangan sudah memastikan sudah mengirim surat kepada BAMUS untuk mendukung komisi hukum. Dengan adanya temuan pelanggaran HAM, wajar kalau kasus-kasus itu dibuka kembali Belum tahu rencana pembahasan kasus Trisakti dalam rapat BAMUS.*

Lukman Hakiem (Sekretaris Fraksi PPP) : *Belum tahu rencana pembahasan kasus Trisakti dalam rapat BAMUS. Mendukung pembahasan selama tujuannya murni untuk pengusutan. Kalau ada nuansa politik untuk menghantam institusi TNI, tak akan selesai.*

Syarief Hasan (ketua F Partai Demokrat) : *Fraksi partai demokrat belum akan ada pembahasan kasus TSS pada rapat BAMUS*

Andi Matallata (Ketua Fraksi partai Golkar) : *Mempersilahkan jika ada fraksi yang mengusulkan pembahasan kasus Trisakti, semanggi asalkan disetujui sidang paripurna*

### **19 Januari 2006**

Menyurati anggota BAMUS meminta masing-masing anggota BAMUS memasukan kasus TSS pada Agenda BAMUS 19 Januari 2006. karena Rapat BAMUS 19 Januari tidak membahas penyelesaian kasus TSS sebagaimana dijanjikan ketua DPR.

Siaran Pers meminta Ketua DPR Agung Laksono tidak mempermainkan kasus TSS dan empertanyakan konsistensi, komitmen, dan sikap segenap pimpinan serta para anggota DPR terkait penyelesaian kasus Trisakti, dan Semanggi I-II, yang hampir sewindu terkatung-katung

### **20 Januari 2006**

Siaran pers berisi pernyataan :-kekecewaan terhadap batalnya BAMUS 19/1 yang tidak membahas TSS, dan kegagalan rapat Paripurna 2006 membahas TSS. Serta kegagalan DPR menyetujui hasil kajian komisi III DPR dan mengingatkan ketua DPR Agung Laksono untuk tidak mempermainkan masalah ini dengan alasan tehnis prosedural

### **27 Januari 2006**

Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak perlu ada pembahasan lagi terhadap tragedi yang terjadi tahun 1998. Rapat pimpinan menyatakan bahwa belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat



paripurna DPR periode 1999-2004 Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak etis membuka kasus yang sudah diputuskan DPR periode 1999-2004.

#### **07 Februari 2006**

Menyurati ketua komisi III Trimedya Panjaitan, dan Wakil ketua komisi III M. Akil Mochtar, H. Djuhad Mahdja, Mulfahri Harahap, Almuzammil Yusuf. meminta mereka mendesak ketua DPR, Sekjen DPR untuk membahas kasus TSS, perihal pencabutan rekomendasi Pansus DPR pada rapat BAMUS 9 Februari 2006

Menyurati komisi III, terkait RDP komisi III dengan Kejagung 20 Februari, meminta komisi III menanyakan penuntasan kasus TSS yang terhenti di Kejaksaan Agung

#### **12 Februari 2006**

Rapat BAMUS berlangsung tertutup, pimpinan DPR menolak mengagendakan kasus TSS. Pimpinan DPR menilai membatalkan rekomendasi DPR periode 1999-2004 tidak etis. Wakil ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno dari fraksi PDI-P Tardjo menyepakati untuk tidak membatalkan rekomendasi DPR yang lalu.

#### **20 Februari 2006**

Komisi III tidak membahas penuntasan kasus pelanggaran HAM TSS .

#### **21 Februari 2006**

Audiensi dengan Komisi III, diterima Trimedya Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nusyahbani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asmara, Panda Nabababan dll mendesak penolakan putusan RAPIM DPR yang memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak bisa dibatalkan.

Panda Nababan menyatakan, 1).tidak ada mekanisme pimpinan DPR memutuskan sesuatu. Mekanismenya dari BAMUS lalu ke Paripurna. 2). Pansus 2001 kental dengan kepentingan karena banyak fraksi TNI, 7 fraksi tidak menyetujui adanya pelanggaran HAM berat sedangkan yang menyetujui hanya 3 fraksi. 3).BAMUS 23 Januari akan mengagendakan kasus TSS

Nusyahbani Katjansungkana menyatakan; 1). Tatatertib tentang UU 26/2000 tidak dilakukan dengan tertib. 2). Meminta terus dilakukan pemantauan terhadap BAMUS. 3).Kejagung mengembalikan penuntasan kasus TSS kepada DPR. 4).Ada perbedaan prosedur pemeriksaan saksi antara Komnas HAM dan Kejagung- Kejagung harus dingatkan untuk tidak tergantung rekomendasi DPR. 5). Mengusulkan agenda Komisi III untuk menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus TSS.

Trimedya Panjaitan menyatakan; 1) akan terus mengusahakan TSS dibawa ke Paripurn. 2). pada 23 februari akan bertemu ketua DPR untuk membicarakan TSS- meminta KontraS dan keluarga korban melakukan loby fraksi, untukantisipasi kesolidan komisi III dan fraksi agar tidak di mentahkan pada Paripurna.

### **23 Februari**

Aksi di depan ruang rapat BAMUS DPR (Badan Musyawarah DPR), menuntut rapat BAMUS 23 Februari mengagendakan pembahasan kasus TSS untuk dibawa ke sidang Paripurna, mendesak DPR segera mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Hasil Rapat BAMUS merekomendasikan komisi III untuk kembali membuka kasus TSS

### **21 Maret 2006**

Menyurati 58 Anggota Komisi III DPR RI, meminta kepada seluruh anggota Komisi III untuk:1). Segera mengkaji kembali kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi, guna pencabutan rekomendasi Keputusan Pansus DPR (1999-2004) yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. 2). Segera membawa hasil peninjauan Komisi III ke Sidang Paripurna, untuk selanjutnya merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad Hoc kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

### **25-26 Maret 2006**

Menyebarkan sticker TSS “Jangan Diam” dan Sticker “Jangan Temani Pelanggaran HAM” di Dago dan lapangan Gasibu Bandung bersama JPK, AKRA.

### **28 Maret-25 April 2006**

Roadshow TSS di Bandung Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian”; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Selasa 28 Maret 2006, Kampus Universitas Pasundan (UNPAS), Selasa 4 April 2006, Kampus Universitas Langlang Buana (UNLA), Selasa 11 April 2006, Kampus Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Selasa 18 April 2006, Kampus Universitas Padjadjaran (UNPAD), Selasa 25 April 2006.

### **29 Maret 2006- 30 maret**

Roadshow TSS di Cirebon Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian; pemutaran film, diskusi, penyebaran sticker, pentas seni kritis, Pameran foto TSS, dan penandatanganan kartupos dukungan penuntasan kasus TSS untuk ketua DPR dan Presiden. Di kampus Unsuagati dan halaman DPRD Cirebon.

### **4 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan berisi permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan kasus TSS, namun tidak direspon

### **8 Mei 2006**

Roadshow TSS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bentuk:1.Pameran Foto TSS. 2. Diskusi Publik Kasus TSS Penantian dalam ketidakpastian”, Penyebaran Poster, sticker TSS “Jangan Diam” dan pengisian kartupos dukungan

penuntasan kasus TSS untuk DPR dan Presiden, dan orasi elemen gerakan mahasiswa.

### **12 Mei 2006**

Aksi ke DPR menuntut DPR mencabut rekomendasi Pansus 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada kasus TSS

### **16 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk untuk mempertanyakan perkembangan kasus TSS dan menyerahkan kartupos dukungan penuntasan kasus, namun tidak direspon

### **18 Mei 2006**

Peringatan Trisakti. Aksi ke DPR dan penyerahan postcard ke DPR. Permohonan tidak ditanggapi. Aksi dan Audiensi ke Istana di terima Jubir Presiden Andi Malarangeng, menyerahkan 1.666 kartupos dukungan penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.. Isi kartupos ditujukan kepada ketua DPR untuk segera mencabut rekomendasi keputusan Pansus DPR 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM pada kasus TSS, dan segera merekomendasikan presiden agar membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Andi A Malarangeng, selaku Jubir Presiden menyatakan:1. berjanji presiden SBY senantiasa akan terus melakukan perbaikan di bidang HAM.

Panggung Bersama “Sewindu Reformasi”. Diskusi publik “Pengadilan Suharto” dengan pembicara Hendardi dan Fadjroel Rahman. Pembacaan Resolusi korban Pelanggaran HAM oleh seluruh korban dan keluarag korban pelanggaran HAM

### **30 Mei 2006**

Menyurati ketua Komisi III Trimedya Panjaitan; permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS oleh komisi III. Komisi III tidak bisa memenuhi dengan alasan masih harus menunggu hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR

Menyurati Ketua DPR Agung Laksono; permohonan audiensi untuk menyerahkan 1762 kartupos dukungan penuntasan kasus TSS yang berisi desakan pencabutan rekomendasi keputusan Pansus DPR (1999-2004) dan segera merekomendasikan Presiden agar membentuk pengadilan HAM ad hoc. Namun tidak direspon

### **30 Mei 2006**

Menyurati Ketua Komisi III DPR RI, berisi permohonan audiensi dengan komisi III untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus TSS, namun tidak direspon

### **14 Juni 2006**

Rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Komisi III DPR diminta melakukan pengkajian ulang hasil Pansus DPR 1999-2004 untuk selanjutnya dibawa ke Bamus untuk diagendakan

**9 Juni 2006**

Menyurati Ketua DPR RI Agung Laksono, berisi permohonan audiensi dan penyerahan 1672 kartupos TSS yang ditujukan untuk ketua DPR (hasil roadshow TSS), namun tidak direspon.

**20 Juni 2006**

Rapat BAMUS DPR. Rapat BAMUS kembali menyerahkan kasus TSS kepada Komisi III untuk dilakukan pengkajian.

**4 Juli 2006**

Menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, berisi permohonan audiensi dengan ketua Komisi III, untuk membicarakan penugasan BAMUS DPR RI kepada komisi III perihal penyelesaian kasus TSS, namun tidak direspon

**13 Juli 2006**

Mengirimkan Nota Protes Terbuka untuk Kasus TSS ke Ketua DPR R HR. Agung Laksono, Anggota Komisi III DPR RI., Anggota BAMUS DPR RI., Anggota Fraksi-Fraksi DPR RI., Media massa cetak dan elektronik. Berisi protes terhadap kinerja DPR yang sengaja memperlambat dan mempersulit pencabutan rekomendasi pansus 2001. dengan mengeluarkan keputusan menolak mencabut rekomendasi pansus 2001 oleh ketua DPR, , dan pengulangan penugasan Komisi III untuk mengkaji TSS, serta tidak adanya tindaklanjut terhadap hasil kajian Komisi III.

**18 September 2006**

Menyurati Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan, berisi permohonan audiensi untuk mempertanyakan perkembangan kasus Trisakti Semanggi. Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa berkas yang dikembalikan oleh BAMUS tidak merekomendasikan pembentukan tim di Komisi III.